**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA**

**IDEOLOGI, MILITERISME, DAN MEDIA MASSA:
Representasi Legitimasi dan Delegitimasi Ideologi
dalam Media Massa**

*Studi analisis wacana kritis media massa dalam situasi krisis di Indonesia
terutama untuk Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha
periode tahun 1965 - 1968*

TESIS

Oleh

Nama : AG. Eka Wenats Wuryanta
NIM : 690111003X

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Magister Sains (M.Si)
Dalam Bidang Ilmu Komunikasi

Depok
Februari, 2004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kajian ilmu komunikasi menjadi sangat menarik ketika komunikasi pada tingkat praksisnya menyentuh aspek kemanusiaan. Tentu saja, aspek kemanusiaan tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, ideologi, psikologi dan kebudayaan manusia itu sendiri (Littlejohn, 2002).

Dalam proses perkembangan kebudayaan manusia, komunikasi massa menjadi proses komunikasi yang mempunyai tingkat pengaruh yang cukup signifikan pada kehidupan sehari-hari.

Berita, dalam konteks komunikasi massa yang berkembang sampai sekarang, selalu muncul dalam benak dan pikiran manusia. Berita yang disusun dalam benak manusia bukan merupakan peristiwa manusia. Berita bukan adalah peristiwa itu sendiri. Berita merupakan usaha rekonstruksi kerangka peristiwa yang terjadi. Berita dalam konteks komunikasi massa, lebih merupakan inti yang disesuaikan dengan kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki makna bagi para pembacanya.

Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembentukan konstruk sosial. Berita, pada titik tertentu,

sangat mempengaruhi manusia merumuskan pandangannya tentang dunia (*Weltanschauung*). Pandangan terhadap dunia adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai pengalaman hidup manusia dimaknai dalam bingkai tersebut. Tanpa adanya bingkai yang jelas, kejadian, peristiwa dan pengalaman manusia akan terlihat “kacau” dan *chaos*. Bingkai pengalaman dapat dilihat sebagai “skenario awal” yang memposisikan setiap pengalaman dan peristiwa dalam plot cerita yang kurang lebih runtut, rasional dan sistematis.

Indonesia dalam konteks kesejarahan juga mengalami banyak peristiwa dan pengalaman. Alur sejarah Indonesia memberi bingkai pokok bagaimana kita -orang Indonesia- mengartikan Indonesia dengan seluruh pengalaman dan peristiwa yang sudah pernah - sedang dan akan dialami. Dengan demikian, sudah banyak berita yang dibuat untuk merumuskan pengalaman sejarah bangsa Indonesia, termasuk ketika orang Indonesia mengalami krisis, baik itu krisis sosial politik - ekonomi - kebudayaan.

Pers Indonesia yang mencoba merekam dan memaknai peristiwa demi peristiwa sejarah Indonesia berperan dalam menentukan bagaimana sejarah Indonesia harus dipahami.

Hampir selama tiga dekade tahun lebih, peristiwa 30 September 1965 oleh Orde Baru, telah diberitakan kepada masyarakat secara lebih berat sebelah (Atmadji Sumarkidjo, 2000). Penyajian fakta yang terseleksi dan dirangkai

sedemikian rupa untuk memberikan membenaran atau legitimasi dasar-dasar kelahiran Orde Baru. Monopoli alat dan media massa yang begitu massif, otomatis secara penuh, informasi dan konsep kebenaran dalam peristiwa 30 September 1965 maupun peristiwa-peristiwa setelah peristiwa tersebut terjadi didominasi dan dihegemonikan oleh Orde Baru.

Kebebasan berpikir dan berpikir secara kritis baik secara individual maupun dalam bentuk media massa ditindas secara sistematis, di mana orang Indonesia harus menerima mentah-mentah informasi dan simbolisasi yang dibuat oleh Orba – di mana kebenaran bercampur kacau dengan kebohongan. Ketika reaksi balik atas fenomena tersebut mencuat, tantangannya adalah bagaimana kita harus merekonstruksi simbolisasi yang telah ter-*desepsi* yang pada akhirnya usaha rekonstruksi informasi dan simbol tersebut hanya sekedar *mirror image*, di mana dorongan rekonstruksi kebenaran itu tetap tidak bisa berpisah atau setidaknya memisahkan antara mitos dan kenyataan.

Salah satu cara untuk mencoba merekonstruksi makna kebenaran yang telah lama disembunyikan adalah dengan menggencarkan kembali analisa diskursus kritis sistem produksi teks dan sistem makro yang dianut serta dipakai oleh media massa pada waktu itu. Setidaknya usaha ini ingin mengembalikan kembali diskursus yang rasional dan sehat – konstruktif untuk menggali dan menemukan kembali makna sejarah yang hampir dalam

kehidupannya selama ini menjadi anak tiri dalam proses pengembangan praksis karakter kebangsaan Indonesia.

Penelitian kali ini mencoba untuk memberikan pandangan awal bagaimana pers Indonesia merajut pengalaman dalam bentuk berita, terutama ketika pers Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri sedang mengalami krisis sosial pada pertengahan dekade tahun 1960-an.

Penelitian ini melihat analisis isi dan analisis wacana kritis teks media yang pernah dibangun dalam pola media massa di Indonesia, terutama pada tahun 1965 sampai tahun 1968 dan secara khusus direpresentasikan oleh harian “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha”.

1.1.1. Latar Historis Sosial Politik (1960-an s/d 1970-an)

Bagi orang Indonesia, tahun 1950 sampai dengan 1970-an merupakan tahun-tahun yang cukup membekas dan berpengaruh. Mengapa ? Karena tahun-tahun tersebut merupakan tahun-tahun yang dipenuhi dengan begitu banyak peristiwa sejarah yang dramatis¹ (Francois Raillon, 1989:123-226, Daniel Dhakidae, 1991 - *unpublished dissertation*) sekaligus banyak peristiwa yang masih terbilang kontroversial.

¹ Raillon juga menyebutkan bahwa peristiwa sejarah itu juga berlaku pada kelangsungan sejarah pers Indonesia itu sendiri

Menjelang tahun 1965, ketegangan politik dan ekonomi sangat mendominasi kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Setelah mendapatkan pernyataan kedaulatan dari Pemerintah Belanda, Indonesia menjalani eksperimen politik yang memberlakukan sistem politik liberal (1950-1959). Terjadi beberapa kali perubahan konstitusi negara dan kabinet politik pada waktu itu. Dalam praksisnya, Presiden Soekarno pada waktu itu, menganggap bahwa eksperimen politik tersebut gagal total. Dalam tahun 1950-an juga, Indonesia juga sedang menerapkan status negara dalam keadaan bahaya, yang disebabkan adanya begitu banyak pemberontakan dan usaha kudeta militer kepada pemerintah yang sah.

Pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang mengawali pemerintahan politik Demokrasi Terpimpin. Secara umum, Dekrit Presiden 1959 lebih menyatakan bahwa UUD 1945 dikembalikan sebagai konstitusi negara. Dekrit Presiden 1959 juga berisi mulainya era kepemimpinan demokrasi terpimpin setelah eksperimentasi politik Indonesia yang bercorak parlementer justru tidak mengembangkan sistem demokrasi yang cocok untuk masa itu tapi justru menjadi ajang persaingan antar partai dan perebutan kekuasaan politik serta kerap kali mengakibatkan ketidakstabilan situasi politik sosial Indonesia.

Drama Demokrasi Terpimpin Soekarno (1960-an) mengalami ujian berat ketika Indonesia berikut masyarakat banyak mengalami banyak masalah,

misalnya peristiwa Trikora dengan proyek pembebasan Irian Barat dari Belanda, momen Dwikora dengan proyek “Ganyang Malaysia” yang hampir saja memperhadapkan Indonesia dengan seluruh Negara Persemakmuran Inggris, keputusan Presiden Soekarno untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusul terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena Malaysia dilihat sebagai negara bentukan poros neo kolonialisme, terbukanya poros Jakarta, Pyong Yang dan Peking sebagai tandingan poros “Nekolim”, Peristiwa Gerakan 30 September². Drama historis tersebut menyatakan bahwa terjadi proses pergulatan ideologi yang berkembang pada waktu itu, yaitu pergulatan ideologi liberal-kapitalisme di satu sisi yang banyak direpresentasikan dengan negara-negara barat kolonialisme dengan ideologi Marxis-Leninisme di sisi lain. Hal ini merupakan kepanjangan dari proses “Perang dingin” yang dilakoni oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet waktu itu.

² Setidaknya dalam penelitian sejarah ada lima skenario yang mau menjelaskan peristiwa pemberontakan itu sendiri. Skenario-skenario itu adalah skenario yang disarikan dari berbagai kepustakaan dan penelitian yang dilakukan. Sedikitnya ada enam versi yang bisa disebutkan. Skenario buku putih yang menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama dari gerakan 30 September 1965 (buku putih versi pemerintah Orba). Skenario masalah internal AD (Cornell Paper, Wertheim). Skenario Soekarno sebagai penanggung jawab (John Hughes dan Anthony Drake). Skenario keterlibatan agensi dinas rahasia Amerika CIA dan Pemerintah Amerika dalam usaha mendongkel kepemimpinan Soekarno (Peter Dale Scott, G. Robinson). Skenario yang menyebut bahwa G30S merupakan gerakan avonturir beberapa oknum Partai Komunis Indonesia tanpa diketahui oleh anggota-anggota politbiro lainnya (Tim ISAI). Skenario yang menyatakan bahwa dalam G30S tidak ada pelaku tunggal (versi Nawaksara, Manai Sophian).

Peristiwa G 30-S dan lahirnya Orde Baru secara dramatis pada tahun 1966, menyebabkan Indonesia mengalami banyak perubahan orientasi dalam bidang politik, ideologi, ekonomi dan sosio-kebudayaan.

Kelompok “junta militer” pimpinan Jenderal Soeharto memanfaatkan momentum pelimpahan wewenang keamanan yang tersurat dalam Surat Perintah 11 Maret 1966 menerima tampuk kekuasaan dari Presiden Soekarno³. Bersamaan dengan itu, mulai usaha sistematis untuk menghancurkan dan mendiskreditkan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia.

Perubahan politik yang luar biasa di tahun 1965, diikuti dengan timbulnya kesadaran yang mendalam tentang keterbelakangan dan mundurnya pembangunan ekonomi di Indonesia setelah 20 tahun merdeka.

Inflasi ekonomi pada tahun 1965 sampai menyentuh kisaran 650 %⁴. Utang luar negeri sebelum G 30-S sebesar \$US 270 juta; sebagian besar digunakan untuk membangun proyek-proyek mercusuar dan simbolisasi politik. Cicilan utang dan bunga yang harus dibayar pada tahun 1966 sebesar \$US 640

³ Peristiwa pergantian tampuk kekuasaan ini terjadi ketika Soeharto mengirim M. Jusuf, Basuki Rachmad dan Amir Machmud (ketiga-tiganya jenderal berbintang satu) untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Hasil pertemuan di antara para jenderal dan Soekarno adalah pemberian Surat Perintah Sebelas Maret yang berisi pelimpahan wewenang kepada Soeharto. Surat ini sebetulnya dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan yang bersifat operasional kepada Soeharto demi pemulihan keamanan dalam negeri. Tapi oleh sebagian para jenderal pada waktu itu surat itu ditafsirkan sebagai surat pelimpahan politik.

⁴ Inflasi yang begitu tinggi menyebabkan kesulitan pengukuran nilai tukar antara rupiah dengan dollar pada waktu itu. Kedutaan Amerika sendiri merasa kebingungan untuk menentukan berapa nilai tukar yang pas untuk rupiah dan dollar pada waktu itu. Kurs rupiah setelah sanering menyebutkan bahwa \$ 1 = Rp 4, padahal sebelum sanering kurs mata uang rupiah sangat kuat, yaitu Rp 1 = \$ 4 jadi dapat dikatakan \$ 1 = Rp 0,25.

juta, sementara pendapatan nasional hanya \$US 400 juta. Biaya impor dan konsolidasi pemerintah mencapai \$ US 500 milyar. Menjelang akhir tahun 1965, total utang luar negeri mencapai \$US 2,4 milyar, sementara keseluruhan pendapatan baik dari sektor minyak - gas dan non minyak - gas hanya \$US 424 juta .

Ekonomi biaya tinggi yang diterapkan oleh pemerintah pada waktu itu, terutama praktek korupsi dan inefisiensi birokrasi yang berlebih turut berperan dalam memperburuk situasi ekonomi Indonesia pada waktu. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia dalam tahun 1960-an, mengalami kemerosotan serta krisis yang panjang dan dramatis.

Turbulensi sosial politik tahun 1960-an sampai tahun 1970-an juga sempat mempengaruhi lembaga pertahanan dan keamanan, yaitu ABRI. Lembaga ini sempat terpecah-pecah dalam friksi-friksi ideologi, angkatan, asal daerah dan sebagainya. Banyak persaingan dan friksi dalam tubuh militer dan kepolisian. Presiden Soekarno pada waktu itu lebih memanfaatkan persaingan dan friksi dalam tubuh militer sekedar untuk memanfaatkan loyalitas pribadi para perwira penting dalam ABRI, terutama Angkatan Darat⁵ (Harold Crouch, 1988:340-352). Terjadinya banyaknya friksi dalam militer Indonesia juga

⁵ Setidaknya dalam militer Indonesia pada waktu itu ada beberapa faksi yang menyolok. Pertama adalah faksi militer Soekarno. Beberapa ahli menyatakan bahwa Jend. Ahmad Yani adalah “lokomotif” kelompok ini. Kedua adalah faksi militer nasionalis yang sebagian pendapat ahli menyatakan Jend. Nasution adalah tokoh untuk faksi militer ini. Faksi lainnya yang harus dicatat adalah faksi militer yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia.

menyulitkan analisa kritis lanjutan terhadap peran militer dan konflik internal dalam ABRI, terutama setelah meletusnya G 30-S.

Paparan sekilas latar sosial politik Indonesia tahun 1960-an ini merupakan salah satu deskripsi latar transisional dan krisis yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Itu semua direkam oleh media massa. Media massa merekam dan sekaligus merepresentasikan seluruh peristiwa krisis tersebut dalam bahasa berita.

1.1.2. Latar Sosial Industri Pers Indonesia tahun 1960-an s/d 1970-an

Mengamati aktivitas dan industri pers Indonesia tahun 60-an sampai tahun 70-an, jelas tidak dapat dipisahkan dengan situasi dan konteks sosial politik Indonesia pada waktu itu. Industri media massa terutama koran pada tahun 1960 ditandai dengan pertumbuhan dan dinamika yang sedemikian menyolok perbedaan. Bila dibandingkan dengan tahun 50-an, pasar dan industri media massa terutama koran, mengalami keadaan yang kurang lebih stabil meski juga tidak bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi politik media massa di Indonesia tidak begitu menonjol.

Dapat dikatakan bahwa pada tahun 60-an, pertumbuhan dan aktivitas media massa mengalami fluktuasi yang luar biasa. Tingkat oplah koran tertentu dengan orientasi ideologi tertentu bisa sedemikian tinggi, meski di lain tempat tidak jarang pembredelan koran-koran yang vokal terhadap pemerintah.

Tingkat sirkulasi koran tahun 60-an sempat menyentuh dimensi yang tidak bisa terkontrol lagi. Selain itu, industri media massa - terutama koran - mengalami pertumbuhan dan dinamika yang rancak dengan tidak meninggalkan warna ideologi yang dipunyai oleh pemiliknya atau para awak jurnalisnya.

Pada awal tahun 60-an, banyak terbit koran-koran atau media massa yang berideologi kanan, dalam arti koran-koran pemerintah⁶. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, banyak koran beraliran kiri dan berideologikan komunis dibreidel bersamaan dengan pembubaran PKI. Meski tidak menutupi kenyataan bahwa pembreidelan pers sudah dimulai sebelum peristiwa G 30-S. Data Achmad Zaini Abar menyebutkan bahwa pembreidelan pers secara lebih “kejam” sudah dimulai semenjak tahun 1957, bertepatan dengan pemberlakuan keadaan darurat perang di seluruh wilayah Indonesia.

Bagan berikut menunjukkan bahwa antara tahun 1957 sampai dengan Oktober 1965 terdapat periode kekejaman yang sangat signifikan terhadap pers Indonesia.

Bagan I

Tahun Pembredelan Pers Nasional 1957 – 1965

Tahun Pembredelan	Jumlah Media Massa dibreidel
1957	32
1958	24

⁶ Contoh yang sangat jelas adalah penerbitan koran Barisan Pendukung Soekarno yang pada akhirnya juga ditutup oleh pemerintah.

1959	38
1960	34
1961	14
1962	2
1963	1
1964	2
Masa ORLA – September	28
Masa Transisi – Oktober	46

(Data diambil dari Edward Smith, 1983:273)

Perubahan konstelasi industri media tahun 65-66 menyebabkan terjadinya kejatuhan pasar media dan berpuncak pada tahun 1967, yaitu jumlah sirkulasi yang turun drastis hingga hanya 2,3 juta saja untuk 274 koran yang terbit sampai tahun tersebut. Pada tahun 60-an, ukuran dan ragam pasar pers Indonesia tergantung pada tingkat produksi dan siklus pertumbuhan-kebangkrutan pers itu sendiri.

Di samping itu, industri pers Indonesia tahun 60-an banyak dipengaruhi dengan pers yang dimiliki oleh partai politik. Ini berarti bahwa banyak industri media massa, penerbitan dan koran Indonesia pada waktu itu terinduksi –kalau tidak mau disebut terkooptasi- secara politis. Bagan berikut akan diperlihatkan secara jelas pola kepemilikan surat kabar pada tahun 1960-an.

Bagan II

Pola Kepemilikan Surat Kabar tahun 1960-an
(dikaitkan dengan Partai Politik Pemilik Media)

Partai Politik	Koran	Jumlah terbitan lain tapi satu group
Partai Nasional Indonesia	Suluh Indonesia	8
Nahdlatul Ulama	Duta Masyarakat	7
Partai Komunis Indonesia	Harian Rakyat	14
IPKI	Api Pancasila	3
PSII	Nusa Putera	4
Partai Katolik	Sinar Bhakti	4
Perti	Fajar Baru	1

data diambil dari Tribuana Said, 1978:

Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila

Sesudah peristiwa G 30-S, dalam masa krisis sekaligus transisional Indonesia, pasar media dipengaruhi dan didominasi – dikendalikan oleh koran serta media Angkatan Darat atau koran nasionalis yang di-*back up* oleh Angkatan Darat. Sementara di sisi lain, koran-koran yang berideologi kiri atau agama dan nasionalis kiri kebanyakan mengalami penurunan begitu tajam. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tahun 1965 dan 1966 merupakan era yang paling dramatis dalam sejarah pers Indonesia⁷. Selain bahwa banyak kejadian yang terekam dalam media massa sebagai pelanggaran kepada kemanusiaan⁸.

⁷ Beberapa tokoh pers yang dihubungi menyatakan bahwa tahun 1965 – 1967 adalah era hubungan yang harmonis antara pers dengan militer. Meskipun tidak menutup fakta bahwa tahun-tahun itu juga banyak koran atau pers cetak yang dibredel secara sepihak oleh pihak militer Indonesia.

Bagan III

Distribusi Media Massa atau Koran dengan Ragam Ideologi (Penerbitan Koran di Jakarta tahun 1966 sampai 1967)

Nama	Afiliasi	Pendirian	1964	1966	1967
Ampera	Buruh	-	-	20000	20000
<i>Angkatan Bersenjata</i>	AD	-	-	40000	75000*
<i>Berita Yudha</i>	AD	1965	-	40000	85000*
<i>Duta Masyarakat</i>	NU	1954	30000	25000	40000*
Kompas	Katolik	1965	-	40000	37000
<i>Sinar Harapan</i>	Protestan	1961	40000	40000	75000*
Harian KAMI	Independen	-	-	15000	25000*
Suluh Indonesia	PNI	1953	45000	-	-
Merdeka	Nasionalis	1945	25000	20000	30000*
Suluh Marhaen	Nasionalis	1966	-	15000	55000*
Pelopop Baru	AD	-	-	15000	35000*
Api Pancasila	IPKI	1965	-	25000	35000*

(Robert H. Crawford *The Daily Indonesian Language Press of Djakarta*, hlm 174-178).

Polarisasi ideologi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno dalam NASAKOM (golongan Nasionalis yang diwakili oleh PNI, golongan Agama yang

⁸ Orang Indonesia pada waktu terancam perang saudara menyusul peristiwa Gestapu. Indonesia menyaksikan proses penghancuran politik terhadap simpatisan PKI. Dalam ukuran konservatif terdapat 500.000 orang dibantai. Ragam perkiraan jumlah korban sangat bervariasi. Jumlah korban akan mempengaruhi implikasi politik di belakangnya. Selain bahwa ada kesulitan untuk menentukan kebenaran jumlah korban yang terbantai. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama, tidak adanya statistik sensus regional yang dapat diperbandingkan. Hal ini bisa menjadi pemicu jumlah yang sangat dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Kedua, tidak adanya catatan arus perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, atau dari satu propinsi ke propinsi lainnya.

direpresentasikan oleh faksi Islam, yaitu NU, golongan Komunis yang diwakili oleh PKI) telah membawa beberapa implikasi dalam pertumbuhan media koran di Indonesia. Setidaknya industri media koran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem patronase dan ideologi partai yang berkembang saat itu.

Daftar di atas memang tidak memuat keseluruhan koran terbitan di Indonesia. Karena dalam sejarah pers, Angkatan Darat memang berkepentingan untuk membuat terbitan untuk mensosialisasikan ide-ide alternatif di samping ide komunisme yang berkembang dan mulai dihabisi setelah peristiwa Gestok. Beberapa terbitan kiri yang jelas dibreidel adalah *Harian Rakjat*, *Kebudayaan Baru (Lekra)*, *Bintang Timoer*, *Warta Bhakti*, *Huo Chi Pao*, *Chung Cheng Pao*, *Warta Bandung*, *Djalan Rakjat (Jawa Timur)*, *Berita Revolusi (Pekan Baru)*, *Bintang Rakjat (Medan)* dan lain-lainnya⁹.

Beberapa awak jurnalis atau wartawan terutama wartawan koran-koran yang berafiliasi ideologi komunis ditahan atau bahkan “hilang”. Pemecatan itu terimplikasi karena keterlibatan mereka atas aktivitas politik Partai Komunis Indonesia. Pemecatan wartawan itu juga disusul pemecatan mereka dari Asosiasi Penerbit Indonesia dan Asosiasi Jurnalis Indonesia (Daniel Dhakidae, 1991:58)

⁹ Menyusul pembreidelan koran komunis, juga dilakukan pemecatan jurnalis atau wartawan pada media atau koran-koran berideologi komunis sebanyak 108 wartawan pada tanggal 22 Oktober 1965. 43 di antaranya adalah wartawan *Harian Rakjat* dan *Kebudayaan Baru* - seperti Nyoto, Naibaho, Machfud dan J.M.H Samosir (semuanya wartawan senior), 37 jurnalis dari *Warta Bhakti*, 12 jurnalis dari *Ekonomi Nasional* dan masih banyak lagi.

Angkatan Darat selain menerbitkan Angkatan Bersenjata¹⁰ dan Berita Yudha juga menerbitkan Pikiran Rakyat di Bandung atau Suara Merdeka di Semarang¹¹. Sinar Harapan sendiri mempunyai koran-koran daerah yang tersebar di Medan atau di Ambon¹² (Daniel Dhakidae, 1991:50-65).

Dari tabel di atas, kita bisa melihat dua hal pokok yang bisa dicermati yaitu, pertama, koran-koran berada di bawah lindungan partai politik atau berada dalam bimbingan perwira militer. Partai politik atau militer mempunyai kontrol penuh terhadap editor koran yang bersangkutan. Kedua, sistem patron klien tertanam kuat dalam industri pers Indonesia itu sendiri. Koran-koran yang mempunyai posisi disebabkan karena koran tersebut memegang peranan kunci dalam partai tertentu, bahkan koran posisional ini mempunyai pengaruh pada koran-koran di daerah yang berasal dari partai politik tertentu.

Kisaran tahun 1961 sampai 1968 memperlihatkan bahwa koran Indonesia dan industrinya mempunyai kadar fluktuasi yang tinggi, tingkat pengaruh pada masyarakat, dan seberapa jauh pers Indonesia dikuasai dan

¹⁰ Sebetulnya ada 2 kategori penerbitan koran pada tahun itu yaitu pers militer dan pers angkatan 66. AB sendiri didirikan pada bulan Februari 65. Setelah kudeta PKI, AB dipakai Angkatan Darat untuk menyebarkan tesis bahwa peristiwa Gestapu adalah konspirasi terselubung Partai Komunis Indonesia. Terlebih lagi AB dipimpin oleh Mayor Jenderal Sugandhi, Kapuspen ABRI.

¹¹ Angkatan Darat di daerah mempunyai perangkat yang disebut dengan Panca Tunggal yang terdiri dari Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kepala Kejaksaan, Ketua Front Nasional. Setiap daerah mempunyai hak untuk menerbitkan koran tapi dengan afiliasi yang sudah ada.

¹² Sinar Harapan sendiri setidaknya mempunyai 7 koran daerah yang tersebar dari Medan, Jakarta, Manado, Ambon dan lainnya.

didominasi oleh struktur makro sosial. Ada beberapa pertimbangan yang perlu digarisbawahi ketika kita mau memahami pers pada waktu itu.

Pertama, usaha dari penghapusan dan penyingkiran koran dan media komunis di Indonesia praktis membuka koran-koran atau media beraliran “kanan”. Hal ini menjelaskan beberapa keanehan yang memperlihatkan kenaikan tajam terbitan koran yang dikelola oleh Angkatan Darat. Koran-koran independen dari agama tertentu juga naik tajam terutama Sinar Harapan (Protestan) dan Duta Masyarakat (Islam-NU).

Kedua, pasar media koran Indonesia yang tersegmentasi secara politis mulai pudar (setelah tahun 1966) baik secara formal maupun tidak resmi. Secara formal, koran-koran yang tadinya menginduk atau berlindung pada partai mulai lepas dari partai politik yang melindunginya. Untuk kepentingan bisnis koran-koran tersebut mulai mengubah jenis jurnalisme dan target konsumennya. Sebetulnya pada era ini, sudah mulai terjadi proses depolitisasi pers Indonesia.

1.3. Permasalahan Penelitian

Dalam studi ini, penelitian akan memusatkan pada simpul utama representasi ideologis dan konteks sosial yang mempengaruhi produksi dan pemaknaan tekstual, terutama dalam konteks situasi krisis dan transisi sosial multidimensi yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1965 - 1968

Surat Kabar terutama “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” telah memberikan beberapa pokok produksi teks yang sarat ideologis dan kepentingan pembenaran serta peminggiran sosial suatu kelompok tertentu saja. Artinya, harian surat kabar tersebut telah menciptakan dunia realitas - dalam konteks situasi krisis, sistem kebenaran simbolik yang menindas, penuh manipulasi dan sarat dengan kepentingan politis belaka.

Dari studi-studi dan simpul penelitian tersebut maka penelitian ini akan lebih menfokuskan diri pada tiga pertanyaan pokok sekaligus tujuan penelitian ini.

Satu, bagaimana pola pembingkai teks media massa yang dipengaruhi oleh proses legitimasi dan delegitimasi ideologi ? Melalui cara apa sebuah ideologi dalam komunikasi krisis mempengaruhi teks media terutama dalam harian Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata periode 1965 - 1968 ?

Dua, representasi krisis macam apa yang direkam oleh media massa, terutama koran “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” ? Bentuk representasi ideologi kapitalisme macam apa yang menjadi kecenderungan dua harian surat kabar “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” ?

Tiga, mengapa ideologi dalam komunikasi krisis macam itu yang akhirnya banyak mempengaruhi proses legitimasi dan delegitimasi dalam seluruh proses kognisi sosial masyarakat Indonesia ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang mau dilakukan ini mempunyai tujuan akademis, yaitu untuk mencari pemahaman yang utuh dan penjelasan yang relatif lengkap mengenai hubungan antara media massa, proses ideologisasi dan dinamika militerisme dalam konteks politik masyarakat dunia ketiga. Terutama dalam konteks hubungan media massa, ideologi dan militerisme di Indonesia, belum banyak ditemukan penelitian yang secara intensif menyoroti hal tersebut. Apalagi penelitian yang langsung masuk dalam dinamika pers militer tahun 1960-an, hal tersebut masih jarang dilakukan. proses komunikasi krisis yang dilakukan oleh media massa Indonesia, terutama ketika media massa harus menjadi alat mediasi sosial dalam situasi krisis. Tentu saja proses komunikasi krisis tersebut tetap ditempatkan dalam pola produksi teks, situasi historis dan pemaknaan realitas yang diangkat dalam setiap media massa yang dipilih sebagai bahan material penelitian ini. Selain bahwa penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam wacana intelektual sejarah sistem komunikasi di Indonesia dan wacana studi komunikasi krisis yang sedang berkembang dalam ilmu komunikasi pada umumnya.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

2.1. Perspektif Penelitian

Penelitian yang berupaya membongkar keterkaitan ideologi, media massa dan politik militerisme di Indonesia termasuk dalam kategori perspektif ekonomi politik. Mosco (1996: 22-38) menyebutkan bahwa

"...Ekonomi politik komunikasi berupaya menjadikan media bukan sebagai pusat perhatian, dengan konsentrasi lebih diarahkan pada kajian mengenai keterkaitannya dengan ekonomi, politik dan faktor-faktor lainnya. Menjadikan media bukan sebagai pusat perhatian berarti memandang sistem komunikasi sebagai terintegrasi dengan proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya fundamental dalam masyarakat."

Dalam kajian media, perspektif ekonomi politik media merupakan bagian dari perspektif kritis selain *cultural studies*, teori kritis, feminisme, teori resepsi pesan, dan semiotika (Mohammadi & Mohammadi, 1990:15).

Pendekatan ekonomi politik merupakan sebuah kajian yang diidentifikasi sebagai kelompok pendekatan kritis (McQuail, 2000:82). Pendekatan ekonomi politik memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika industri media, dan ideologi media itu sendiri.

Perhatian penelitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan

sistem politik. Karakter utama pendekatan ekonomi politik adalah produksi media yang ditentukan oleh: pertukaran nilai isi media yang berbagai macam di bawah kondisi tekanan ekspansi pasar dan juga ditentukan kepentingan ekonomi-politik pemilik dan pembuat kebijakan media (Garnham dalam Mcquail, 2000:82). Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horisontal.

Menurut Mosco (1996:5), pengertian ekonomi politik bisa dibedakan dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan, yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya termasuk sumber daya komunikasi. Dalam pengertian luas kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Dewasa ini ini setidaknya terdapat tiga konsep penting yang ditawarkan Mosco untuk mengaplikasikan pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi: komodifikasi (*commodification*); spasialisasi (*spatialization*); dan strukturasi (*structuration*).

Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu melibatkan para awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila masing-masing di antaranya mempunyai kepentingan (Mosco,

1996:10-25). Nilai tambah produksi berita akan sangat ditentukan oleh kemampuan berita tersebut memenuhi kebutuhan sosial dan individual.

Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media. Ukuran badan usaha media dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut adalah bentuk-bentuk konglomerasi, monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat vertikal adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh kontrol dalam produksi media.

Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, proses sosial dan praktek sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara agen dengan struktur sosial yang melingkupinya (Mosco, 1996:212-245).

Secara makro, Peter Golding dan Graham Murdock (Currant & Gurevitch, 1991:15 – 32) menunjukkan bahwa perspektif ekonomi politik komunikasi massa bisa dibedakan menjadi dua macam paradigma yaitu perspektif ekonomi politik dalam paradigma liberal; dan perspektif ekonomi politik dalam paradigma kritis.

Perspektif ekonomi politik liberal memfokuskan diri pada proses pertukaran pasar dimana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Semakin besar kekuatan pasar memainkan perannya, semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan pilihannya. Mekanisme pasar itu, diatur oleh apa yang disebut Adam Smith sebagai “tangan tersembunyi” (*the invisible hand theory*). Media massa menurut pandangan liberal ini benar-benar dilihat sebagai sebuah produk kebudayaan yang harus diberikan kesempatan secara bebas dan luas untuk dimiliki oleh siapapun juga dan untuk berkompetisi secara bebas dalam pasar tersebut.

Varian ekonomi politik liberal merupakan aliran pemikiran yang memberikan penekanan pada peran media massa di dalam mempromosikan kebebasan untuk berbicara (*freedom of speech*). Pemikiran ini memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah masyarakat dipahami sebagai kelompok-kelompok yang saling bersaing. Ini berarti kelompok yang berkuasa atau kelompok yang dominan tidak terdapat. Kriteria kedua adalah media dilihat sebagai sistem organisasi yang memiliki batas, mendapatkan otonomi dari negara, partai-partai politik serta kelompok penekan. Kriteria ketiga adalah kontrol media dimiliki oleh elit manajerial yang otonom, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas terhadap profesional media. Kriteria keempat adalah hubungan antara institusi media dan khalayak bersifat simetris.

Dalam perspektif ekonomi politik kritis, perspektif ekonomi politik mengikuti Marx untuk memberikan perhatian pada pengorganisasian properti dan produksi pada industri budaya ataupun industri lainnya, bukannya pada proses pertukaran sebagaimana dilakukan liberalisme. Perspektif ini tidak mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen maupun konsumen industri budaya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh produsen dan konsumen itu dilihat dalam struktur yang lebih luas lagi.

Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media mereka pada paradigma kritis. Menurut Golding dan Murdock, perspektif ekonomi politik kritis berbeda dengan arus utama dalam ilmu ekonomi dalam hal holistisisme, keseimbangan antara usaha kapitalis dengan intervensi publik; keterkaitan dengan persoalan-persoalan moralitas semacam keadilan, kesamaan, dan kebaikan publik.

Sifat holistik dalam penelitian (terutama dalam konteks analisa ekonomi politik kritis) ini merupakan satu dari beberapa pertimbangan yang dibuat dalam konteks perspektif ekonomi politik kritis. Holistik disini berarti menunjukkan adanya keterkaitan saling mempengaruhi antara organisasi ekonomi dan kehidupan politik, sosial, dan kultural. Analisisnya bersifat historis dan secara moral menunjukkan keterkaitannya dengan persoalan *public good*. Aspek historis dalam sifat holisme perspektif ekonomi politik kritis

berpusat pada analisa pertumbuhan media, perluasan jaringan dan jangkauan perusahaan media, komodifikasi dan peran negara.

Analisa ekonomi politik kritis memperhatikan perluasan dominasi perusahaan media, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi budaya yang langsung dilindungi oleh pemilik modal. Tentu saja, ekstensifikasi dominasi media dikontrol melalui dominasi produksi isi media yang sejalan dengan preferensi pemilik modal. Proses komodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar (dalam penelitian ini terlihat faktor militer yang menentukan makna dan isi pasar). Proses komodifikasi justru menunjukkan menyempitnya ruang kebebasan bagi para konsumen media untuk memilih dan menyaring informasi.

Dalam konstelasi di atas, maka tidak mengherankan apabila peran media di sini justru menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media melalui produksi kesadaran dan laporan palsu tentang realitas objektif yang sudah bias karena dibutnuk oleh kelompok kepentingan baik secara politik maupun ekonomis. Perjuangan kelas biasanya didasarkan pada antagonisme ekonomi-politik. Posisi dan peran media adalah menutupi dan merepresentasi secara bias dan manipulatif antagonisme tersebut. Ideologi dimanfaatkan untuk menghapus dan mengeliminasi perjuangan kelas. Kontrol atas kelas dibuktikan dengan mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan kepentingan kelas yang dominan.

Perspektif ekonomi politik kritis juga menganalisa secara penuh pada campur tangan publik sebagai proses legitimasi melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang harus diambil karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi. Dalam konteks ini dapat juga disebut adanya distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang ada. Sedangkan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh analisa ekonomi politik kritis terdiri dari tiga kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat kapitalis menjadi kelompok (kelas) yang mendominasi. Kedua, media dilihat sebagai bagian dari ideologis di mana di dalamnya kelas-kelas dalam masyarakat melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan ke dalam norma-norma budaya dominan.

Perspektif ekonomi-politik kritis memiliki tiga varian utama. Ketiga varian tersebut adalah instrumentalisme, kulturalisme, dan strukturalisme. Dalam penelitian ini, varian yang digunakan adalah perspektif instrumentalisme. Perspektif ini memberikan penekanan pada determinisme ekonomi, di mana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini melihat media sebagai instrumen dari kelas yang mendominasi. Dalam hal ini kapitalis dilihat sebagai pihak yang menggunakan kekuatannya - untuk kepentingan apapun -

dalam sistem pasar komersial untuk memastikan bahwa arus informasi publik sesuai dengan kepentingannya.

Apabila *mainstream* ilmu ekonomi melihat persoalan ekonomi sebagai satu hal dominan yang terpisah dan khusus, maka perspektif ekonomi politik kritis melihat persoalan ekonomi itu berada dalam hubungan dengan kehidupan politik, sosial, dan budaya. Liberalisme menekankan pada kedaulatan dan kebebasan individual dalam kapitalisme, maka paradigma kritis memberikan penekanan pada relasi sosial (*social relations*) dan kekuasaan (*power*).

Penelitian teks media yang akan dilakukan oleh penulis lebih diletakkan dalam kesadaran bahwa teks atau wacana dalam media massa mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia (Littlejohn, 2002: 163-183). Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat dilakukan dalam teks media massa. Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan idea, kepentingan atau ideologi tertentu kelas tertentu. Pada titik tertentu, teks media pada dirinya sudah bersifat ideologis (Littlejohn, 2002:217).

Teks media tidak hanya selalu bersifat ideologis tapi juga terutama adalah kemampuan manusia untuk membedakan antara kuasa teks itu sendiri dengan kuasa struktur makro yang secara sengaja atau tidak sengaja

merekonstruksi, merepresentasikan dan memaknai teks tersebut (Shoemaker & Reese, 1991: 53-205). Dalam arti bahwa, meski konsumen dan produsen teks media punya opsi bagaimana teks harus disimbolisasikan dan dimaknai tetap saja ada bingkai aktivitas dan opsi mereka yang terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar jangkauan kendali sadar konsumen atau produsen teks media.

Hubungan pertama yang perlu diterangi adalah kaitan antara media massa dengan ideologi (perspektif Althusser). Althusser menyatakan bahwa media dalam konteks ideologi modern akan banyak berperan sebagai *ideological state apparatus* (Eriyanto, 2001:87-102). Media dalam konteks pembicaraan ini bisa menjadi alat efektif persuasi dan propaganda yang melegitimasi fungsi dan praksis ideologis tertentu. Media masa mempunyai kapasitas persuasi dan propaganda serta didukung dengan modal serta aparat legal negara. Dengan demikian, media massa berfungsi sebagai ranah dan dasar pembenaran praktek represi yang dilakukan negara kepada para warganya. Hal ini berarti juga bahwa media massa secara langsung maupun tidak langsung, mampu mendorong penguatan, akselerasi distribusi, penetrasi nilai ideologi dominan terhadap kelompok sosial yang didominasi.

Hubungan kedua adalah bahwa media massa mampu melakukan proses *interpelasi* ideologi (Eriyanto, 2001:98). Proses interpelasi dalam dunika komunikasi menyatakan bahwa seluruh tindakan komunikasi adalah tindak

penyapaan. Praksis penyapaan mengandung usaha penempatan individu dalam posisi dan relasi sosial tertentu. Hal ini juga termuat dan terintegrasi dalam seluruh proses ideologisasi.

Hubungan ketiga adalah media massa atau teks media mampu menjadi instrumen efektif-efisien bagaimana nilai atau wacana dominan didistribusikan dan dipenetrasikan dalam benak orang sehingga bisa menjadi konsensus kolektif. Proses hegemoni yang ditawarkan dalam produksi berita menjadi pola yang halus dan sering tidak disadari oleh para konsumennya. Dalam proses produksi media massa, proses hegemoni ideologi bisa berjalan seakan-akan wajar karena nilai-nilai tersebut tersamar dalam opini, teks berita yang dibuat secara logis, rasional dan sistematis.

Hubungan keempat dalam perkembangan media modern, media justru juga mempunyai ideologi dan praksis hegemoni. Proses ekonomi politik yang terdapat dalam pola produksi, konsumsi dan distribusi media baru merupakan bagian yang integral. Nilai subjek dan lingkungan mampu dijadikan komoditas baru. Proses komodifikasi subjek - objek realitas telah menciptakan ideologi dan hegemoni baru di mana media massa justru menjadi kelompok dominan di luar kekuasaan politik negara atau ekonomi pasar.

2.2. Ekonomi-Politik Produksi Teks

Produksi makna dalam sebuah teks merupakan konsekuensi kekuasaan yang berdampak pada lingkup konsumsi budaya. Golding dan Murdock menyatakan bahwa ekonomi merupakan faktor penentu penting untuk praktek produksi teks media. Alasannya adalah bahwa ekonomi merupakan organisasi pembuat keuntungan dan institusi industri budaya yang sangat terbuka pada tekanan proses komodifikasi dan strukturasi, dan institusi yang punya pola kepemilikan yang khas. Luas dan besarnya kepemilikan media di tangan konglomerat atau pemegang kekuasaan secara tidak langsung telah membuat media menjadi lebih terintegrasi pada kepentingan pemilik serta memperdalam ikatan mereka dengan kepentingan kelas kapitalis.

Dalam perspektif ekonomi politik produksi tetap dibuka kemungkinan faktor instrumentalisme dan strukturalisme dalam analisa penelitian. Instrumentalisme berpusat pada cara dan sarana kaum kapitalisme atau pemilik modal menggunakan kekuasaan ekonomi dengan sistem pasar komersial untuk menjamin arus informasi publik yang harmonis dengan kepentingan mereka. Akibatnya, kontradiksi di dalam sistem tersebut bisa dilupakan. Posisi kaum instrumentalis menyatakan bahwa kepemilikan media secara privat merupakan instrumen dominasi kelas (Currant & Guravitch, ed., 1991). Media berfungsi menggerakkan dukungan untuk kepentingan kelas yang berkuasa (Chomsky, 1988:87-143).

Dengan demikian, terdapat lima saringan yang dilalui oleh pesan media. Pesan media melayani kekuasaan yang mapan, diproduksi oleh suatu industri atau institusi yang terkonsentrasi pada sejumlah besar korporasi, tergantung pada sumber ekonomi utama, tergantung pada pejabat pemerintah sebagai sumber, selalu ditekan oleh kelompok penekan dan diwarnai oleh ideologi tertentu (Herman & Chomsky, 1988; Downing, Mohammadi, 1990). Ketika sebuah media massa menawarkan pandangan yang kontra dan mempublikasikan skandal maka sebetulnya mereka menginginkan legitimasi mereka atau melegitimasi sistem kapitalisme secara keseluruhan dan medelegitimasi sistem yang dianggap lawan.

Dengan menggunakan kekuasaan ekonomi dan sistem sosial yang mau ditawarkan, kelas dominan akan menangani lingkup wacana dan representasi. Penanganan lingkup wacana dan representasi ini bisa terwujud dalam bentuk perbaikan premis wacana, keputusan mana yang boleh dilihat dan dianggap penting oleh masyarakat umum dan menangani opini publik melalui propaganda.

Sebetulnya dalam konteks ekonomi politik media massa, terdapat pola kepemilikan media. Model pertama adalah model pola resmi, di mana media dikontrol negara. Model kedua adalah pola komersial, di mana media merefleksikan ideologi para pemegang modal. Model ketiga adalah pola kepentingan di mana media merefleksikan kepentingan partai politik dan

kelompok keagamaan. Model keempat adalah pola informal di mana isi media merefleksikan ide dan konsep kontributor media tersebut.

2.3. Ekonomi-Politik Konsumsi Teks

Wilayah ekonomi politik konsumsi teks adalah wilayah yang mau menggambarkan hubungan antara ketidakseimbangan antara materi dan budaya. Analisnya bersandar pada pandangan bahwa masyarakat berdaulat untuk mempunyai makna mereka sendiri dan interpretasi masalah yang begitu kompleks. Akan tetapi, kapasitas untuk mempunyai akses pada hasil dan fasilitas komunikasi sangat tergantung pada kemampuan tiap individu. Begitu juga dengan perubahan kondisi dan distribusi artifak budaya dari publik menjadi privat. Perubahan ini menandakan adanya perubahan substansial yang menyangkut kesempatan bagi kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk mempunyai akses terhadap artifak budaya tersebut (Currant & Guravitch, 1991:152-175).

Teks media dikonsumsi dalam konteks wilayah privat. Teks juga dikonsumsi melalui berbagai respon dan interpretasi yang menghasilkan berbagai makna dari berbagai kategori dalam masyarakat. Dari aspek konsumsi teks, persoalan variabilitas praktek diskursif adalah tatanan wacana apa yang ditarik masyarakat dari teks media yang cocok ? Apakah mereka bicara tentang

teks media dalam perwacanaan kehidupan privat atau dalam wilayah publik ?

Faktor sosial apa yang relevan dengan pilihan tersebut ?

2.4. Wacana Media, Ideologi Dan Hegemoni

Dalam penjelasan sebelumnya, media selalu berhubungan dengan ideologi dan hegemoni. Hal ini berkaitan dengan cara bagaimana sebuah realitas wacana atau teks ditafsirkan dan dimaknai dengan cara pandang tertentu.

Pendapat Golding dan Murdock (Currant & Guravitch ed., 1991:188) menunjukkan bahwa studi wacana media meliputi tiga wilayah kajian, yaitu teks itu sendiri, produksi dan konsumsi teks. Kerangka teoritis semacam ini adalah kerangka teoritis yang senada dikembangkan oleh Norman Fairclough. Perbedaan analisis Golding dan Murdock jika dibandingkan dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough terletak pada wilayah analisis teks, produksi dan konsumsi sebagai kajian tersendiri. Fairclough mempunyai kerangka teks, praktek wacana dan praktek sosial budaya sebagai wilayah analisis kritisnya. Dari konteks perspektif analisis di atas maka teks ditafsirkan.

Wacana teks selalu melibatkan dengan apa yang disebut dengan alternasi atau peralihan timbal balik antara dua fokus kembar analisis wacana, yaitu kejadian komunikatif (teks, praktek wacana dan praktek sosial budaya) dengan tatanan wacana (genre dan jenis perwacanaan).

Kejadian komunikatif meliputi aspek teks, praktek wacana dan praktek sosial budaya. Wilayah teks media merupakan representasi yang berkaitan dengan realitas produksi dan konsumsi. Fairclough melihat bahwa wilayah teks merupakan wilayah analisis fungsi representasional-interpersonal teks dan tatanan wacana. Fungsi representasional teks menyatakan bahwa teks berkaitan dengan bagaimana kejadian, situasi, hubungan dan orang yang direpresentasikan dalam teks. Ini berarti bahwa teks media bukan hanya sebagai cermin realitas tapi juga membuat versi yang sesuai dengan posisi sosial, kepentingan dan sasaran yang memproduksi teks. Fungsi interpersonal adalah proses yang berlangsung secara simultan dalam teks.

Wacana untuk konsumsi publik bukan dilihat dalam keadaan mentah tapi sebaliknya wacana dalam konteks publik adalah wacana yang diorganisasi ulang dan dikontekstualisasikan agar sama dengan bentuk ekspresi tertentu yang sedang digunakan. Bentuk ekspresi teks tertentu mempunyai dampak besar atau apa yang terlihat, siapa yang melihat dan dari perspektif sudut pandang macam apa.

Wacana teks media juga membutuhkan analisis intertekstualitas. Analisis ini lebih ingin mengetahui hubungan antara teks dengan praktek wacana. Intertekstualitas ini bisa berproses dalam cara-cara pemaduan genre dan pewacanaan yang tersedia dalam tatanan wacana untuk produksi dan konsumsi teks. Selain itu, analisis ini juga ingin melihat cara transformasi dan

relasi teks satu dengan teks yang lain. Dalam perspektif ekonomi politik kritis, analisis ini memperlihatkan proses komodifikasi dan strukturasi.

Pemaknaan dan makna tidak *an sich* ada dalam teks atau wacana itu sendiri (Fiske, 1988:143-144). Hal ini bisa dijelaskan bahwa ketika kita membaca teks, maka makna tidak akan kita temukan dalam teks yang bersangkutan. Yang kita temukan adalah pesan dalam sebuah teks. Sebuah peristiwa yang direkam oleh media massa baru mendapat makna ketika peristiwa tersebut ditempatkan dalam identifikasi kultural di mana berita tersebut hadir. Peristiwa demi peristiwa diatur dan dikelola sedemikian rupa oleh para awak media, dalam hal ini oleh para wartawan. Itu berarti bahwa para awak media menempatkan peristiwa ke dalam peta makna. Identifikasi sosial, kategorisasi, dan kontekstualisasi dari peristiwa adalah proses penting di mana peristiwa itu dibuat bermakna bagi khalayak.

Para awak media dalam konteks pemberitaan teks media selalu memperhatikan aspek konsensus sosial. Meskipun demikian, pemahaman awak media terhadap suatu proses produksi media sangat dipengaruhi oleh proses pengolahan peta ideologi pada setiap awak media, dalam hal ini adalah wartawan.

Dalam konteks ini, menarik apabila menyimak pendapat Daniel Hallin mengenai peta ideologi dalam seluruh konstelasi pemahaman suatu teks (Shoemaker, 1996:237). Dia berpendapat bahwa dunia jurnalis dibagi dalam tiga

bidang ideologi, yaitu bidang penyimpangan, bidang kontroversi dan bidang konsensus.

Bidang-bidang dalam pemetaan ideologis ini akan mempengaruhi bagaimana para awak media dan media massa membingkai dan menyeleksi suatu peristiwa untuk dijadikan berita media. Dalam konteks pemetaan ideologis tersebut juga dapat terlihat proses dinamika perilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan secara berbeda. Hal tersebut bisa dilakukan karena realitas yang sama tersebut dijelaskan dalam kerangka yang berbeda. Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam bagan sederhana di bawah ini:

Bagan IV

Pertautan bidang ideologi dan Dinamika Pembingkai Teks Media

(Shoemaker, 1996:227; Eriyanto, 2002:127)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makna diproduksi dalam situasi yang dinamis. Pembaca dan pembuat makna yang mencoba untuk memaknai suatu teks tertentu terjalin dalam lingkaran relasi dengan sistem nilai yang lebih besar. Sistem nilai yang lebih besar itu adalah ideologi.

2.4.1. Ideologi

Istilah ideologi sendiri adalah istilah yang banyak dipakai atau digunakan khususnya dalam lingkungan ilmu sosial. Hanya memang ironinya adalah terminologi ideologi menjadi istilah yang mempunyai ketidakjelasan arti. Hanya memang dalam perdebatan ilmu sosial kontemporer, debat ideologi banyak mengambil wacana yang dikembangkan oleh Gramsci. Gramsci menyatakan adanya 2 wilayah analisis yang bisa difungsikan sebagai sarana evaluatif hubungan antagonistik antara kaum borjuis dengan kelas pekerja (Kolakowski, 1978:220-250). Hubungan antagonistik klasik ini pada akhirnya menjadi penentu pandangan analisa kultur dan ideologi yang diletakkan dalam perspektif teori Marxis kritis. Tradisi awal Marxisme melihat bahwa hubungan kultural dan ideologi antara kelas dominan dengan kelas subordinat bukan menjadi hal yang pokok. Tradisi Marxis awal lebih melihat perjuangan untuk “hegemoni” moral, kultur, intelektual dan kepemimpinan politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ideologi mempunyai dua pengertian yang berbeda¹³. Pengertian dalam tataran positif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas pandangan dunia (*world-view*, *welttanschaung*) yang menyatakan sistem nilai kelompok atau komunitas sosial tertentu untuk melegitimasi kepentingannya. Sementara itu, pengertian dalam tataran negatif menyatakan bahwa ideologi dipersepsikan sebagai realitas kesadaran palsu. Dalam arti, bahwa ideologi merupakan sarana manipulatif dan *deceptive* pemahaman manusia mengenai realitas sosial (Mannheim, 1991:59-116).

Dalam perkembangan ilmu sosial, terminologi ideologi mengalami banyak pemaknaan. Tapi secara ringkas, ideologi dapat dilihat dalam tiga ranah acuan pokok. Pertama, ideologi sebagai realitas yang bermakna netral. Artinya, ideologi dimaknai sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai dan sikap dasar rohani suatu kelompok sosial dan komunitas kebudayaan tertentu¹⁴.

Kedua, ideologi sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Pengertian ideologi sebagai kesadaran palsu menyatakan bahwa ideologi merupakan sistem berpikir yang sudah terdistorsi, baik secara sengaja maupun

¹³ Klasifikasi positif dan negatif di sini tidak dimaknai sebagai dua klasifikasi baik dan buruk dalam pengertian moral atau etika. Klasifikasi di sini untuk membagi secara sederhana pengertian ideologi dalam pengertian persepsi orang yang mencoba memaknainya.

¹⁴ James Lull menyatakan ideologi adalah ekspresi terminologi yang tepat untuk mendeskripsikan nilai dan agenda publik dari suatu bangsa, kelompok agama, organisasi bisnis, sekolah dan lainnya (Lull, 1982:2).

tidak disengaja. Ideologi dalam pengertian ini adalah sarana kelas atau kelompok sosial tertentu untuk mensahkan atau melegitimasi asal-sumber dan praksis kekuasaan secara tidak wajar¹⁵. Dalam pengertian ini, makna ideologi justru bernilai negatif. Artinya, ideologi merupakan perangkat *claim* yang tidak wajar atau sebuah teori yang tidak berorientasi pada nilai kebenaran¹⁶, melainkan sudah mengambil sikap berpihak pada kepentingan tertentu.

Ketiga, ideologi sebagai sistem keyakinan yang tidak rasional. Artinya, bahwa ideologi merupakan hanya sekedar rangkaian sistem kepercayaan dan keyakinan subjektif (*belief system*). Konsekuensinya adalah ideologi tidak membuka kemungkinan pertanggungjawaban rasional dan objektif (Magnis, 1992:230-231).

Sementara itu, kita bisa melihat ideologi mempunyai tiga ragam perwujudannya. Pertama, ideologi dalam arti penuh. Ragam ideologi dalam arti penuh bermakna bahwa ideologi merupakan ajaran, pandangan dunia, filsafat sejarah yang memerlukan tujuan-tujuan dan norma sosial politik - yang diklaim sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan lagi serta sekaligus

¹⁵ Dalam hal ini, pandangan Karl Marx dan F. Engels akan lebih banyak senada dengan pandangan tersebut. Mereka berpendapat bahwa ideologi merupakan instrumen pemalsuan kesadaran yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu untuk membenarkan identitas, cara berpikir dan bersikap, cara bertindak sendiri. Lebih lanjut dalam pandangan neo-marxis, ideologi dinyatakan sebagai realitas yang ada dalam pikiran dan tindakan.

¹⁶ Meskipun kategori kebenaran bisa sangat bersifat relatif. Objektivitas kebenaran merupakan jalinan dan rangkaian kebenaran subjektif yang disepakati bersama sebagai kebenaran objektif.

sudah mapan dan harus dituruti secara penuh-paripurna. Ideologi arti penuh berarti ideologi yang mempunyai status moral absolut dan menuntut ketaatan mutlak. Ragam ideologi tertutup ini diambil dari konsiderasi elit yang harus dipacu, dipropagandakan dan dipublikasikan (Franz Magnis: 232-235).

Ragam selanjutnya adalah ragam ideologi yang terbuka. Ideologi terbuka lebih merupakan cita-cita etika politik yang terbuka pada pluralitas operasionalisasi tindakan konkretnya. Justru cita-cita atau nilai tersebut menjamin kebebasan masyarakat untuk melaksanakan cita-cita tersebut. Dalam ideologi terbuka, cita-cita dilaksanakan tanpa ada paksaan. Terakhir, ideologi implisit. Ideologi implisit adalah keyakinan atau sistem nilai hakikat realitas dan cara bertindak masyarakat yang tidak dirumuskan secara eksplisit. Meskipun implisit, ideologi tersebut diyakini dan diresapi dalam seluruh gaya hidup, merasa, berpikir bahkan bermasyarakat.

Hal penting dalam pembahasan tulisan ini adalah konsep ideologi yang dikemukakan oleh Louis Althusser. Althusser melihat ideologi sebagai dialektika yang dicirikan dengan kekuasaan yang dominan (Eriyanto, 2001:98). Ideologi dalam perspektif ini dilihat secara lebih jauh. Ideologi dilihat sebagai praksis sosial. Argumentasi ideologi sebagai praksis didasarkan pada asumsi bahwa negara mempunyai dua hakiki yang tidak terpisahkan, yaitu represif dan

ideologis. Dua hakikat ini berkaitan erat dengan cara keberadaan negara sebagai alat perjuangan kelas¹⁷.

Bahasan penting lainnya dalam tema ideologi Althusser adalah soal subjek. Ideologi membutuhkan subjek. Subjek membutuhkan ideologi. Ideologi merupakan hasil rumusan dari subjek-subjek tertentu. Keberlakuan nilai ideologi menuntut adanya subjek-subjek pelaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa ideologi menciptakan subjek. Artinya, bahwa ideologi menempatkan individu bukan hanya dalam posisi dalam relasi sosial tapi juga hubungan antara individu dengan relasi sosial tersebut (Diane Mac Donell, 1987:37). Dalam hal ini, Stuart Hall juga mencoba memberikan makna ideologi sebagai sebuah kesatuan interpertatif (Eriyanto, 2001:119-137). Pertama, ideologi tidak terdiri dari konsep yang terpisah dan terisolasi secara sosial. Ideologi mengartikulasikan elemen atau unsur yang berbeda menuju perbedaan makna.

Kedua, statuta ideologis selalu dibuat secara individual tapi ideologi sendiri tidak selalu produk kesadaran individual. Hal ini berarti bahwa ideologi sudah ada sebelum individu ada. Ideologi bersifat aktif dalam masyarakat. Proses transformasi ideologi merupakan proses kolektif. Proses ideologisasi lebih banyak berlangsung secara tidak sadar. Ketiga, ideologi bekerja melalui konstruk

¹⁷ Pandangan Althusser sering diklasifikasikan sebagai aliran marxisme-strukturalis. Pandangan Althusser ini lebih didasarkan pada pandangan klasik Karl Marx yang menyatakan bahwa negara adalah alat perjuangan kelas elit untuk melanggengkan kepentingannya.

sosial untuk posisi subjek individual dan kolektif dari keseluruhan identifikasi dan pengetahuan yang ditransmisikan dalam nilai-nilai ideologis.

2.4.2. Dominasi, Legitimasi dan Hegemoni

Di atas dikatakan bahwa perspektif Althusser, ideologi merupakan dialektika yang dicirikan dengan kekuatan yang dominan dan legitim. Kata kunci dominasi dan legitimasi menjadi penting dalam pembahasan ini. Hal ini paralel dengan teori ideologi Althusser yang menyatakan bagaimana kekuasaan dijalankan secara dominan dalam arti bahwa kekuasaan tertentu mampu mengontrol dan menguasai kelompok lain.

Pertimbangan pertama adalah pertimbangan nilai dominasi ideologis yang melahirkan, pada point tersebut, teori yang menyatakan realitas hegemoni. Dari sekian banyak teori hegemoni, teori hegemoni Antonio Gramsci mempunyai kedudukan yang penting. Gramsci membangun teori yang menyatakan bagaimana akseptasi kelompok yang didominasi oleh dan dengan keberadaan kelompok dominan. Proses akseptasi tersebut berlangsung dalam proses yang damai tanpa represi kekerasan. Atau dengan kata lain, hegemoni borjuis bukan melalui proses pemusnahan kelas pekerja tapi melalui artikulasi budaya dan afiliasi ekonomi-politik masyarakat.

Ini berarti bahwa proses kekuasaan dan dominasi tidak hanya bersifat material tapi juga bersifat kultural¹⁸. Dominasi yang bersifat immaterial tersebut meliputi perluasan dan pelestarian “ketaatan sukarela” dari kelompok yang didominasi oleh kelas elit penguasa melalui pemanfaatan kekuasaan intelektual, moral dan politik. Melalui hegemoni, penyebaran (distribusi) ide, nilai, *belief system*, - dipenetrasikan secara “seakan-akan wajar”. Dalam arti tertentu, ideologi yang hegemonik mengandaikan percampuran dengan praksis sosial.

Oleh sebab itu, ideologi yang hegemonik selalu beroperasi dalam konsensus sosial. Dalam konteks ini, ideologi yang hegemonik merupakan dinamisasi penciptaan cara berpikir terhadap wacana tertentu sebagai sesuatu yang benar dan yang lain salah (Eriyanto, 2001:103-108).

Dominasi dan hegemoni memerlukan pertimbangan kedua, yaitu legitimasi. Legitimasi adalah wewenang keabsahan individu atau kelompok tertentu memegang mandat kekuasaan. Keabsahan di sini selalu diartikan sebagai sifat normatif. Mempertanyakan keabsahan wewenang kekuasaan berarti memperbandingkan wewenang dengan norma. Apabila sesuai dengan norma yang berlaku, maka wewenang itu sah, apabila tidak, wewenang itu tidak sah.

¹⁸ Sesungguhnya Gramsci meletakkan kritik baru terhadap proses kapitalisasi modern (dan hal ini melengkapi kritik Marx terhadap kapitalisme) yang cenderung mendominasi seluruh kehidupan manusia.

Dalam paham umum legitimasi, legitimasi selalu mempunyai dua objek yang jelas, yaitu legitimasi materi wewenang kekuasaan dan legitimasi subjek wewenang. Legitimasi materi wewenang adalah keabsahan kewenangan dari segi fungsi. Legitimasi subjek wewenang adalah dasar absah wewenang individu atau kelompok untuk membuat dan melaksanakan wewenang kekuasaan. Legitimasi subjek wewenang terbagi dalam tiga ragam legitimasi, yaitu legitimasi religius, legitimasi eliter dan legitimasi demokratis.

Dominasi dan kekuasaan maka legitimasi mempunyai tiga kriteria pokok. Kriteria pertama adalah legitimasi sosiologis. Legitimasi sosiologis adalah legitimasi mekanisme motivatif yang membuat masyarakat menerima wewenang penguasa atau elite dominatif. Kriteria kedua adalah kriteria legalitas. Kriteria legalitas adalah kriteria legitimasi kesesuaian kekuasaan dengan hukum yang disepakati dan berlaku. Kriteria ketiga adalah kriteria legitimasi etis. Kriteria ketiga ini mempersoalkan kewenangan dan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Kriteria ini muncul dalam dua konteks dasar, yaitu bahwa setiap tindakan negara harus dan dapat dipertanyakan dari norma-norma moral serta bahwa setiap tindakan kekuasaan negara selalu mempunyai dasar kekuasaan politik itu sendiri.

Ketika berbicara tentang konteks legitimasi, maka hal tersebut tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan delegitimasi. Legitimasi dan delegitimasi merupakan aksi sosial kompleks yang bisa dilakukan serta dipertegas melalui

percakapan atau teks. Konteks legitimasi dan legitimasi merupakan aktivitas diskursif dan dapat menunjukkan bahwa melalui kegiatan persuasi, suatu wacana dapat menghasilkan efek perubahan format perilaku dan ideologi dominan suatu kelompok tertentu. Dalam konstelasi semacam ini, maka wacana dapat dilihat sebagai medan konflik ideologi kelompok dominan dengan kelompok sub-dominan dalam suatu masyarakat. Setiap kelompok bersaing dan berlomba untuk memenangkan wacana, perspektif dan klaim kebenaran masing-masing. Dalam perlombaan semacam ini, strategi legitimasi dan delegitimasi diimplementasikan dalam bentuk representasi diri positif dan representasi diri negatif.

Van Dijk (1998:100-136) pernah menyatakan bahwa delegitimasi dalam level wacana dilakukan ketika perangkat represif dan koersif tidak efektif meminggirkan wacana-wacana alternatif. Strategi delegitimasi dapat dilakukan dengan memakai beberapa cara.

Pertama, delegitimasi dilakukan dengan fokus konteks produksi, akses dan penggunaan wacana. Dalam perang wacana, kelompok dominan kerap kali mempraktekkan strategi ini dengan menggugat legitimasi kelompok sub-dominan serta menegasi peran-legalitas-latar belakang-pengetahuan dan visi anggota kelompok sub-dominan. Peran media dalam hal ini berfungsi untuk menghalangi akses kelompok delegitim ke media massa atau dengan

merepresentasikan aktivis-aktivis perubahan sebagai sumber-sumber berita yang *unreliable*.

Kedua, delegitimasi juga dipraktekkan dengan fokus unsur-unsur negatif sebuah wacana, penekanan pelanggaran terhadap nilai umum, atau deskripsi negatif terhadap pihak tertentu. Dalam situasi semacam ini, merupakan sebuah kewajaran bahwa bila dalam domain berita politik, kelompok-kelompok sub-dominan (di luar sistem) tidak pernah akan dibiarkan mendominasi sumber pemberitaan dan wacana berita yang terbentuk.

Ketiga, delegitimasi juga dapat ditempatkan pada isu kemungkinan-kemungkinan efek wacana. Dapat saja proses delegitimasi dilakukan dengan penayangan posisi berita di halaman depan, sisi halaman yang tidak menarik, menghambat proses produksi wacana, mempersulit distribusi media dan lain-lainnya.

Strategi legitimasi dan delegitimasi akan sangat efektif bila mampu berasosiasi dengan akal sehat, norma dan ideologi yang berlaku secara umum. Wajar apabila dalam kepentingan ini, kelompok dominan cenderung mengontrol institusi yang mempunyai akses terhadap ilmu pengetahuan dan opini publik. Institusi ilmu pengetahuan dan opini publik mempunyai otoritas yang kuat bahkan dapat disebut sebagai pusat “klaim kebenaran”. Klaim kebenaran bukan semata-mata karena mereka mempunyai akses utama terhadap media massa

atau wacana publik, tapi semata-mata karena institusi tersebut mempunyai hasil atau produk yang *incontrovertible*, dapat diandalkan, dan ilmiah.

2.4.3. Media Massa - Ideologi Dan Hegemoni

Setelah membahas beberapa kata kunci, terutama sosial ideologi, legitimasi dan hegemoni, ada baiknya kalau dalam bagian ini bahasan mulai mencoba mencari kaitan antara ideologi-hegemoni dengan media massa.

Hubungan pertama yang perlu dijelaskan adalah kaitan antara media massa dengan ideologi (perspektif Althusser). Althusser menyatakan bahwa media dalam konteks ideologi modern akan banyak berperan sebagai *ideological state apparatus*. Media dalam konteks pembicaraan ini bisa menjadi alat efektif persuasi dan propaganda yang melegitimasi fungsi dan praksis ideologis tertentu. Media masa mempunyai kapasitas persuasi dan propaganda serta didukung dengan modal serta aparat legal negara.

Dengan demikian, media massa berfungsi sebagai ranah dan dasar pembedaan praktek represi yang dilakukan negara kepada para warganya. Hal ini berarti juga bahwa media massa secara langsung maupun tidak langsung, mampu mendorong penguatan, akselerasi distribusi, penetrasi nilai ideologi dominan terhadap kelompok sosial yang didominasi.

Hubungan kedua adalah bahwa media massa mampu melakukan proses interpelasi ideologi. Proses interpelasi dalam dunia komunikasi menyatakan

bahwa seluruh tindakan komunikasi adalah tindak penyapaan. Praksis penyapaan mengandung usaha penempatan individu dalam posisi dan relasi sosial tertentu. Hal ini juga termuat dan terintegrasi dalam seluruh proses ideologisasi.

Hubungan ketiga adalah media massa atau teks media mampu menjadi instrumen efektif-efisien bagaimana nilai atau wacana dominan didistribusikan dan dipenetrasikan dalam benak orang sehingga bisa menjadi konsensus kolektif. Proses hegemoni yang ditawarkan dalam produksi berita menjadi pola yang halus dan sering tidak disadari oleh para konsumennya. Dalam proses produksi media massa, proses hegemoni ideologi bisa berjalan seakan-akan wajar karena nilai-nilai tersebut tersamar dalam opini, teks berita yang dibuat secara logis, rasional dan sistematis.

Hubungan keempat dalam perkembangan media modern, media justru juga mempunyai ideologi dan praksis hegemoni. Proses ekonomi politik yang terdapat dalam pola produksi, konsumsi dan distribusi media baru merupakan bagian yang integral. Nilai subjek dan lingkungan mampu dijadikan komoditas baru. Proses komodifikasi subjek - objek realitas telah menciptakan ideologi dan hegemoni baru di mana media massa justru menjadi kelompok dominan di luar kekuasaan politik negara atau ekonomi pasar.

2.5. Pandangan Kritis: Eksistensi dan Fungsi Media Massa - Wacana Media.

Ada beberapa pandangan krusial yang dikemukakan oleh paradigma kritis tentang keberadaan dan fungsi media serta wacana media yang ada. Ini berarti bahwa paradigma kritis mempunyai pandangan tersendiri mengenai sumber bagaimana media memproduksi, posisi media, wartawan yang menghasilkan liputan, khususnya dalam konteks struktur makro sosial yang ada.

Setidaknya ada beberapa titik kritis dalam hal ini yang bisa diungkapkan. Titik kritis pertama adalah soal pemahaman tentang fakta yang diangkat oleh media atau teks berita yang ada. Fakta yang diangkat oleh media lebih banyak dipahami sebagai fakta semu. Maka dapat dikatakan berita lebih merupakan ranah pergulatan wacana antara berbagai ideologi wartawan atau media. Set fakta yang dibuat dalam media massa lebih merupakan area konflikktual kepentingan sosial.

Titik kritis kedua adalah posisi media itu sendiri. Titik kritis ini mau mengatakan bahwa media adalah instrumen elit untuk menyebarkan ideologi dominan (David Barrat, 1994: 48-52). Media dan berita media massa adalah subjek yang mengkonstruksi realitas melalui simbol dan pemaknaan yang dibuat oleh media massa, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya. Titik krusial lainnya untuk memahami posisi media adalah soal politik simbol dan pemaknaan yang dibuatnya. Makna tidak dipengaruhi

oleh struktur tapi lebih banyak dibentuk oleh praksis pemaknaan yang ada dalam masyarakat. Media massa menentukan definisi realitas melalui pemilihan simbol dan bahasa yang tepat. Masalah penting yang ditemukan oleh paradigma kritis dalam konteks ini adalah siapa yang memegang kendali dalam proses definisi dan pemaknaan realitas yang dilakukan oleh media massa ? Dalam struktur sosial, kelompok mana yang lebih banyak diuntungkan dalam proses pemaknaan dominan yang terjadi ? Siapa yang mendefinisikan apa ? Kelompok mana yang terus menerus menjadi objek penderita dalam proses pemaknaan seperti itu ?

Titik krusial lainnya, menurut paradigma kritis dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, adalah posisi wartawan. Wartawan tetap saja menjadi partisipan dari kelompok yang ada dalam masyarakat. Wartawan mempunyai latar belakang sosial ideologi, nilai politik yang akhirnya mempengaruhi bagaimana ia menghasilkan, memilih simbol dalam seluruh pemberitaannya. Wartawan dan profesionalisme wartawan tidak dapat melepaskan diri dari proses praksis kelas. Dengan demikian, proses dan kerja media tidak didasarkan oleh dasar profesionalisme “objektif” tapi lebih meletakkan pada landasan ideologi dan hegemoni yang terjadi. Profesionalisme merupakan bagian yang integral dari kontrol kelas. Kebebasan media lebih merupakan rangkaian kontrol dan konsep kelas yang telah dibuat oleh elit dominan.

Terakhir adalah titik krusial tentang hasil liputan. Persoalan liputan yang objektif selalu menjadi masalah. Paradigma kritis melihat bahwa bukan objektivitas berita yang seharusnya dicari. Persoalannya adalah apakah media atau berita yang diproduksi itu mengandung bias atau tidak. Persoalan lainnya adalah bahwa kenyataan wartawan merupakan bagian kecil dari seluruh struktur sosial yang lebih besar. Permasalahannya bukan terletak pada hasil liputan atau sang wartawan itu sendiri, melainkan bahwa struktur sosial di luar wartawan begitu kuat mempengaruhi seluruh isi berita media massa (James. V. Carey,1982:24).

2.6. Praksis Analisa Wacana Kritis

Nilai-nilai mengenai ideologi berikut masalah legitimasi-delegitimasinya akan diteliti dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang didasari oleh perspektif teori kritis. Secara umum, analisis wacana kritis merupakan studi mengenai struktur pesan yang memfokuskan diri pada pemikiran bagaimana suatu makna dibangun (Littlejohn, 2002). Atau dapat dikatakan bahwa analisa wacana kritis adalah analisa bahasa yang “melampaui apa yang terkalimatkan”.

Analisis wacana pada pandangan kritis tidak dipusatkan pada kebenaran ataupun ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran, melainkan memberikan penekanan pada konstelasi kekuatan yang

terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subyek yang netral, dimana ia bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan apa yang dipikirkannya, karena sangat berhubungan serta dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangan ini bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya.

Analisa wacana kritis melihat wacana (pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan) sebagai bentuk dari praktek sosial. Bagaimana bahasa sebagai faktor penting digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat yang terjadi. Ia menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung serta mengajukan versinya masing-masing.

Analisis wacana tidak semata-mata melihat isi media dari segi bahasa. Analisis ini juga menaruh perhatian pada dimensi ideologis dan politis dari pesan media (Van Dijk, 1991:109). Menurut Van Dijk, setiap pesan membawa implikasi (hal. 113), sesuatu yang implisit. Inilah bagian pesan yang '*unsaid*', tidak eksplisit diekspresikan. Disinilah terletak analisis mengenai dimensi ideologis pesan. Setiap struktur teks (isi media) memiliki "*underlying*" makna, opini dan ideologi. Untuk mengkajinya, dilakukan analisis konteks kognitif, sosial, politik dan kultural. Penekanan di sini sekaligus pada teks dan interaksinya dengan budaya pembuat atau penerima (Fiske, 1992:157). Artinya,

yang menjadi fokus adalah peranan komunikasi dalam rangka membangun serta memelihara nilai-nilai.

Ada lima karakteristik penting yang dimiliki analisa wacana kritis (Eriyanto, 2001: 8-14). Pertama adalah tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Dengan demikian, wacana berasosiasi atas realitas yang bersifat interaktif. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa bagaimana wacana harus dipandang. Pertama-tama adalah wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang diluar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

Kedua adalah Konteks. Analisa wacana kritis selalu mempertimbangkan konteks dari wacana. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang diproduksi, dimengerti, serta dianalisis pada suatu konteks tertentu. Setidaknya ada beberapa hal penting dalam pengertian wacana kritis, yaitu: teks, konteks, dan wacana itu sendiri. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, suara dan sebagainya. Wacana lalu dimaknai sebagai menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.

Ketiga adalah aspek sejarah. Dengan menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, artinya wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks sejarah yang menyertainya.

Keempat adalah aspek kekuasaan. Analisa wacana kritis melihat unsur kekuasaan (*power*) dalam seluruh perangkat analisisnya. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apa pun, dianggap sebagai bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan menjadi kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Kekuasaan dalam wacana pada gilirannya diperlukan untuk melihat adanya kontrol. Kontrol dalam wacana bisa dilihat dari penonjolan atau pemakaian kata-kata tertentu.

Kelima dan yang terakhir adalah ideologi. Wacana media, termasuk di dalamnya teks berita, merupakan bentuk dari praktek ideologi atau refleksi ideologi tertentu. Ideologi merupakan sarana yang mengatur masalah tindakan dan praktek individual maupun kelompok. Ideologi membuat anggota suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, serta memberikan kontribusi dalam bentuk solidaritas dan kohesi dalam kepentingan kelompok.

2.6.1. Analisis Wacana Kritis Menurut Fairclough

Norman Fairclough (1995:85-182) membangun model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada

linguistik serta pemikiran sosial politik dengan perubahan sosial. Ia memusatkan perhatian wacana pada bahasa dan mengemukakan bahwa wacana merujuk pada penggunaan bahasa sebagai praktek sosial. Hal ini mengandung beberapa implikasi, yaitu wacana adalah bentuk dari suatu tindakan dan ada hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial (Eriyanto, 2000:286).

Menurut Fairclough analisis wacana dapat dilakukan melalui dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif *communicative events*. Analisis Wacana kritis dari perspektif ini adalah analisis hubungan antara tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah teks (*text*). Dimensi kedua adalah praktek wacana (*discourse practice*, yaitu proses produksi. Dimensi ketiga adalah praktek sosiokultural (*sociocultural practice*), di mana dalam penelitian ini level yang dianalisis adalah level masyarakat atau budaya.

Fairclough berpendapat bahwa analisa wacana kritis memperlihatkan bagaimana suatu obyek digambarkan dalam sebuah teks dan seluruh aspek relasi yang mungkin timbul pada relasi antar objek itu sendiri. Ada tiga elemen dasar yang terdapat dalam teks. Elemen-elemen dasar tersebut adalah representasi, relasi, dan identitas. Pada intinya representasi berupaya untuk melihat bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, atau suatu kegiatan ditampilkan pada teks. Relasi berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Sedangkan identitas

terutama dilihat serta dikonstruksi dalam teks pemberitaan (Eriyanto, 2000: 289-305).

Analisis praktek wacana memberikan perhatiannya terutama pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Praktek diskursus membentuk teks serta menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi. Produksi teks dan konsumsi teks adalah dua hal yang menurut Fairclough merupakan dua sisi dari praktek wacana media. Kedua hal ini berhubungan dengan jaringan yang kompleks dimana keduanya melibatkan berbagai aspek praktek diskursif.

Asumsi yang mendasari analisis praktek sosiokultural adalah asumsi konteks sosial yang berada di luar media mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media. Artinya, konteks sosial yang berada di luar media menentukan bagaimana teks diproduksi dan dipahami. Dalam hal ini praktek sosiokultural mempengaruhi teks dengan diperantarai oleh praktek wacana.

Tiga level analisis yang terdapat pada analisis praktek sosiokultural menurut Fairclough adalah level situasional, institusional, dan sosial. Dalam analisis wacana, aspek situasional ketika teks yang dihasilkan harus menjadi titik perhatian. Teks diproduksi dalam suatu kondisi atau suasana yang khas sehingga teks yang satu mungkin berbeda dengan teks yang lain. Level institusional membongkar bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktek produksi wacana. Institusi yang dimaksud bisa berada dalam media sendiri, namun bisa juga berada di luar media. Sedangkan level sosial

merupakan aspek yang lebih makro daripada aspek situasional. Aspek situasional bersifat mikro. Aspek sosial bersifat makro, melihat sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya secara keseluruhan. Sistem itu menentukan siapa yang memegang kekuasaan serta nilai-nilai apa yang mendominasi dalam masyarakat.

2.6.2. Framing Teks Media

Meskipun Fairclough mencoba memadukan analisis diskursif percakapan dengan analisis linguistik sosial, tapi tetap saja Fairclough menerapkan analisa framing waktu membahas analisa intertekstualitas terhadap representasi wacana dalam sebuah media massa. Bisa dikatakan bahwa analisa framing merupakan strategis dasar analisa linguistik-kritis.

Konsep framing sendiri pertama kali dicetuskan oleh Bateson pada tahun 1955 dan kemudian Erwin Goffman mengembangkan konsep tersebut. Konsep ini merupakan konsep yang mencoba untuk menata dan mengorganisasi kejadian sosial dan keterlibatan manusia dalam momen sosial tersebut.

Entman (1993:15-43) menyatakan bahwa framing adalah tindakan menyeleksi beberapa aspek realitas yang ditangkap panca indera dan membuatnya lebih menonjol di dalam teks sedemikian rupa untuk menonjolkan definisi masalah tertentu, interpretasi sebab akibat, penilaian moral atau rekomendasi tindakan represif tertentu. Perhatian pada beberapa aspek realitas

dan sekaligus mengaburkan elemen lain bisa mendorong dan mengarahkan khalayak untuk bertindak atau tidak bertindak tertentu.

Framing isi media selalu mempunyai konsekuensi logis. Akibat yang mengikuti adanya proses framing media dapat dilihat dalam dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang psikologistis menyatakan bahwa efek framing adalah perubahan dalam penilaian dan persepsi yang disebabkan oleh perubahan pada rumusan penilaian dan persepsi atas pilihan-pilihan yang dimaksud. Kedua, sudut pandang sosiologis menyatakan bahwa framing meletakkan titik fokus analisisnya pada alur cerita, simbol dan *stereotype* dalam penyajian sebuah berita. Dapat dikatakan bahwa frame berita dalam batasan dan perspektif nilai (Gamson dan Modigliani, 1989; Gitlin, 1980).

Proses frame dilakukan melalui konteks dan selektivitas isu. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa frame sebagai bentuk manajemen ide, gagasan secara terpusat bagi salah satu aspek tertentu yang diberitakan – dilakukan melalui seleksi, penekanan, kategorisasi, eksklusi dan elaborasi (Severin & Tankard, 1997:45-73, 125-134). Dalam proses framing, para wartawan mampu memproses sejumlah besar informasi secara cepat dan rutin; artinya kesadaran menjadikan sesuatu sebagai informasi, memposisikan informasi tersebut dalam kategori kognitif dan pada akhirnya menyajikannya kepada khalayak. Dengan demikian, alasan organisasional menjadikan framing sebagai proses yang niscaya dalam media massa.

Berdasarkan prinsip framing, para wartawan dapat melakukan penyederhanaan, limitasi sumber berita, fokus fakta, interpretasi dan konstruksi tertentu serta membentuk struktur penceritaan yang lebih bermakna dibanding cerita atau konstruksi berita yang lain. Oleh sebab itu, prinsip framing dalam proses produksi berita akan memberikan proses penilaian atas berita itu sendiri. Nilai berita adalah hasil dari konstruksi wartawan. Ini berarti bahwa semua peristiwa pada semua tempat dan semua waktu mempunyai potensi untuk menjadi berita. Proses seleksi berita inilah yang nantinya disebut nilai berita. Secara umum, nilai berita dapat dibagi dalam lima kategori nilai berita, yaitu *prominance*, *human interest*, *conflict/controversy*, *unusual* dan *proximity*.

Prominance adalah nilai berita yang diukur dari kebesaran atau urgensi berita itu sendiri. *Human interest* adalah faktor nilai berita yang memungkinkan sebuah peristiwa menjadi berita jika peristiwa tersebut mengandung unsur sedih, dramatika dan menguras emosi khalayak. Konflik dan kontroversi adalah unsur nilai berita yang menjadikan peristiwa menjadi berita apabila peristiwa tersebut mengandung nilai konflik atau kontroversi. *Unusual* adalah faktor nilai berita yang menyatakan bahwa berita selalu mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi. Proksimitas adalah nilai berita jika peristiwa yang diliput relatif dekat dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik secara fisik maupun emosional.

Nilai berita merupakan hasil dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial menentukan apa dan mana yang layak disebut sebagai berita. Dengan demikian, semua peristiwa berpotensi menjadi berita. Tapi tidak semua peristiwa layak menjadi berita. Merujuk beberapa faktor nilai berita maka peristiwa yang layak menjadi berita adalah peristiwa yang negatif, konflik, jarang terjadi atau peristiwa yang tidak umum. Semakin penting, semakin jarang dan semakin berkaitan peristiwa tersebut dengan khalayak banyak maka semakin dapat dianggap sebagai berita¹⁹.

2.7. Komunikasi Krisis

Setelah merunut argumentasi-argumentasi di atas, terlihat bahwa komunikasi mempengaruhi perkembangan masyarakat sekaligus perkembangan sosial masyarakat mempengaruhi perkembangan komunikasi. Keterpengaruhannya satu sama lain itu akan sangat ditentukan oleh sistem politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Pengaruh media massa sedemikian besar ketika situasi krisis melanda. Krisis dapat diartikan sebagai proses dan kondisi yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki dengan durasi dan pengaruh terbatas dengan hasil yang ambivalen. Dengan demikian, situasi

¹⁹ Nilai berita dapat disebut standar apabila berada dalam situasi yang demokratis liberal. Standarisasi nilai berita tidak ada dalam negara yang totaliter atau situasi yang buruk. Dalam negara semacam ini, apa yang boleh, apa yang harus diberitakan dan apa yang tidak perlu, tidak ditentukan oleh derajat urgensi berita tapi ditentukan oleh penguasa. Pada negara dengan sistem semacam ini, semua elemen dan perangkat nilai berita tidak termasuk dalam ukuran ini.

krisis dapat dikarakterkan dengan konsekuensi yang tinggi, tingkat probabilitas akibat yang rendah dan waktu pengambilan keputusan yang pendek. Oleh sebab itu, situasi krisis membuat suasana pengambilan keputusan yang unik dan mengancam.

Pada era tahun 1965-1968, akan sangat terlihat bahwa perspektif pemanfaatan media massa mempergunakan pendekatan fungsionalisme struktural. Perspektif fungsionalisme struktural menjelaskan begitu banyak kegiatan yang melembaga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pers. Masyarakat merupakan sistem, dan media massa adalah subsistem di dalamnya. Media diharapkan menjadi fungsi integrator, dinamisator, adaptor dan motivator masyarakat. Ini berarti media harus memampukan dirinya menjadi alat respons yang tepat bagi realitas yang sebenarnya.

Media dipandang berfungsi sebagai cermin yang menceritakan realitas secara objektif. Dalam kaitan ini, koran atau surat kabar era tahun 65-68 berada dalam situasi yang sangat krusial. Di satu pihak, pers Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ke arah jurnalisme yang lebih profesional. Di lain pihak, pers Indonesia juga ditarik untuk tetap menjadi pers politik yang berada dalam situasi krisis.

Pers Indonesia dalam situasi krisis sebaiknya tetap mengacu pada kaidah jurnalistik yang berlaku secara umum²⁰. Artinya, media dalam menyajikan suatu berita krisis atau pengalaman krisis sosial yang terjadi pada tahun 65-68, hendaknya tetap memperhatikan kaidah berita seimbang dan objektif

Masalahnya adalah dalam hal *balance news*, banyak pemberitaan situasi krisis memuat ragam sumber yang relevan. Ketika beberapa surat kabar hanya mengutip atau diberi pernyataan sumber berpihak yang mendukung kepentingan tertentu atau sikap wartawan, bagaimana soal nilai pemberitaan yang seimbang ? Bagaimana kalau memang terjadi monopoli pemberitaan berita yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kekuatan memaksa ? Apakah memang benar terjadi manipulasi pemberitaan pada era 65-68 sehingga opini publik terbentuk karena pers secara tidak seimbang memuat pemberitaan yang diberikan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat ?

Kecenderungan yang memperlihatkan ketidakseimbangan berita terutama pada waktu krisis membuat berita yang pada dasarnya merepresentasikan kenyataan menjadi tidak tepat dan akurat, pemberitaan yang tidak imbang, tidak menghormati asas praduga tak bersalah dan sebagainya.

²⁰ Kaidah jurnalistik yang berlaku universal adalah kaidah jurnalistik yang mengindahkan kebenaran, imparsialitas, independensi, berita yang berimbang, objektif.

Dalam situasi krisis, media sering tidak menjadikan dirinya sebagai mediator, tapi telah digunakan untuk menebarkan sikapnya mengenai “suatu hal” kepada publik (McQuail, 1994). Hal ini bisa menjebak surat kabar justru menjadi media propaganda. Dalam konteks tahun 65-68, apakah memang terjadi proses dominasi dan hegemoni yang pada akhirnya menjadikan pers Indonesia pada waktu itu menjadi koran propaganda, terutama untuk Angkatan Darat ? Sistem lambang apa yang sering dipakai surat kabar tertentu untuk menggambarkan realitas menurut ideologi pemilik, pemberi informasi, para wartawannya dan sebagainya ?

Dalam konteks di atas, ada tiga faktor yang menyebabkannya. Pertama, pentingnya menyajikan berita terbaru pada kesempatan pertama justru memaksa editor atau para wartawan mengalahkan faktor nilai berita. Wartawan dalam situasi krisis lebih dipaksa untuk mendahului informasi terkini dibandingkan dengan akurasi berita.

Kedua, memang dalam seluruh kebijakan media, ada pers yang mereproduksi dan mengkomodifikasikan berita secara selektif sesuai dengan kriteria kepentingan politik media yang bersangkutan.

Ketiga, organisasi media atau pers terdiri atas jaringan manusia. Setiap wartawan mempunyai minat, aspirasi, tujuan dan kebutuhan sendiri. Perbedaan dalam jaringan manusia menyebabkan hasil berita yang berbeda pula.

Dalam kaitan pers era 65-68, ketiga faktor tersebut bisa menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya bias atau justru banyaknya realitas objektif yang bisa direpresentasikan. Tapi sejauh mana bias atau kebenaran objektif tersebut bisa direkam oleh pers Indonesia waktu itu ? Dalam pola lambang macam apakah ?

Kebenaran dalam ideologi kebebasan pers telah menjadi nilai yang perlu diperdebatkan. Kebenaran dalam situasi krisis harus bermakna apa ? Kebebasan pers diartikan sebagai kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat melalui media. Memiliki dan menyatakan pendapat itu dengan sendirinya menjadi hak oleh setiap warga negara. Dalam situasi krisis, bagaimana kita harus mengartikan dan mengimplementasikan kebebasan pers ?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Paradigma Kritis Dan Wacana Teks Media

Penelitian teks media yang akan dilakukan oleh penulis lebih diletakkan dalam kesadaran bahwa teks atau wacana dalam media massa mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa pada manusia (Littlejohn, 2002: 163-183). Seluruh aktivitas dan pemaknaan simbolik dapat dilakukan dalam teks media massa. Pada dasarnya teks media massa bukan realitas yang bebas nilai. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat kepentingan. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas yang memihak. Tentu saja teks dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan idea, kepentingan atau ideologi tertentu kelas tertentu. Pada titik tertentu, teks media pada dirinya sudah bersifat ideologis (Littlejohn, 2002:217).

Pembahasan yang harus disadari adalah bukan hanya terletak bahwa teks media selalu bersifat ideologis tapi terutama adalah kemampuan untuk membedakan antara kuasa teks itu sendiri dengan kuasa struktur makro yang secara sengaja atau tidak sengaja merekonstruksi, merepresentasikan dan memaknai teks tersebut (Shoemaker & Reese, 1991: 53-205). Dalam arti bahwa, meski konsumen dan produsen teks media punya opsi bagaimana teks harus disimbolisasikan dan dimaknai tetap saja ada bingkai aktivitas dan opsi mereka

yang terbentuk dan dipengaruhi oleh faktor yang berada di luar jangkauan kendali sadar konsumen atau produsen teks media.

Pengenalan dan pemahaman yang cukup komprehensif atas struktur sistem produksi media, rasionalitas dan ideologi yang berada di balik teks media yang bersangkutan menjadi hal yang penting. Diperlukan paradigma penelitian dan metode penelitian yang mampu menelanjangi, menggali dan mengeksplorasi struktur, rasionalitas dan ideologi yang kesemuanya bersifat laten termuat dalam sebuah teks media (Dedy N. Hidayat, 2000: 127-164).

Penelitian ini akan menilai bahwa diskursus teks media dalam konteks penelitian yang dimaksud bisa diterangi atau didiskusikan secara lebih mendalam dalam perspektif paradigma kritis. Alasan dan argumentasi yang mau diajukan di bawah ini adalah argumentasi preferensi untuk paradigma kritis dalam konteks usaha penelitian yang mau dilakukan.

3.2. Wacana Media, Paradigma Dan Teori Kritis

Ilmu komunikasi dapat dikategorikan dalam ilmu pengetahuan yang mempunyai aktivitas penelitian yang bersifat multi paradigma. Ini berarti, ilmu komunikasi merupakan bidang ilmu yang menampilkan sejumlah paradigma atau perspektif dasar pada waktu bersamaan (Hidayat, 1999:431-446). Istilah paradigma sendiri dapat didefinisikan sebagai:

“a set of basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principles...a world view that defines, for its holder, the nature of the ‘world’...(Guba, dalam Denzin & Lincoln, 1994:107).

Paradigma merupakan orientasi dasar untuk teori dan riset. Pada umumnya suatu paradigma keilmuan merupakan sistem keseluruhan dari berfikir. Paradigma terdiri dari asumsi dasar, teknik riset yang digunakan, dan contoh seperti apa seharusnya teknik riset yang baik (Newman, 1997:62-63).

Terlepas dari segala variasinya, perbedaan antara paradigma yang satu dengan paradigma yang lain dapat dikelompokkan berdasarkan hal yang mendasar. Hal-hal tersebut adalah hal yang berkaitan dengan konsep dan ide dasar ilmu sosial, atau asumsi-asumsi tentang masyarakat, manusia, realitas sosial, opsi moral, serta komitmen terhadap nilai-nilai tertentu.

Setidaknya ada empat paradigma yang bisa dikelompokkan dalam teori-teori penelitian ilmiah komunikasi. Paradigma-paradigma itu adalah sebagai berikut paradigma humanis radikal (*radical humanist paradigm*), paradigma struktural radikal (*radical structuralist paradigm*), paradigma interpretif (*Interpretive paradigm*), dan terakhir adalah paradigma fungsionalis (*fungsionalist paradigm*).

Guba & Lincoln (1994:17-30) juga menyusun beberapa paradigma dalam teori ilmu komunikasi. Paradigma yang dikemukakan itu terdiri dari paradigma positivistik, paradigma pospositivistik, paradigma kritis, dan paradigma konstruktivisme. Beberapa ahli metodologi dalam bidang ilmu sosial

berpendapat bahwa paradigma positivistik dan pospositivistik merupakan kesatuan paradigma, yang sering disebut dengan paradigma klasik. Implikasi metodologis dan teknis dari dua paradigma tersebut, dalam prakteknya, tidak punya banyak perbedaan. Adanya konstelasi paradigma di atas maka teori dan penelitian biasa dikelompokkan dalam tiga paradigma utama, yaitu paradigma klasik, paradigma kritis dan paradigma konstruktivisme. Apabila terjadi tiga pembedaan paradigma dalam ilmu sosial, maka terjadi perbedaan pemahaman terhadap paradigma itu sendiri.

Bagan V

Tabel Tiga Paradigma Ilmu Sosial

PARADIGMA KLASIK	PARADIGMA KONSTRUKTIVISME	PARADIGMA KRITIS
Menempatkan ilmu sosial seperti ilmu-ilmu alam, dan sebagai metode yang terorganisir guna mengkombinasikan metode logika hipotetiko-deduktif dan pengamatan empiris, guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang dapat dipakai untuk memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu.	Memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap <i>socially meaningful action</i> melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.	Mendefinisikan ilmu sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap struktur sebenarnya dari balik ilusi yang dicitrakan, <i>false needs-consciousness</i> , yang dinampakkan dalam bentuk dan dari dunia materi, dengan tujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar memperbaiki dan mengubah kondisi kehidupan manusia.

(Denzin, 2000:163-189)

Perbedaan antara ketiga paradigma ini juga dapat dibahas dari 4 (empat) dimensi. Keempat dimensi tersebut adalah dimensi epistemologis, dimensi ontologis, dimensi metodologis, serta dimensi aksiologis.

Dimensi epistemologis berkaitan dengan asumsi mengenai hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan

mengenai objek yang diteliti. Seluruhnya berkaitan dengan teori pengetahuan (*theory of knowledge*) yang melekat dalam perspektif teori dan metodologi.

Dimensi ontologis berhubungan dengan asumsi mengenai objek atau realitas sosial yang diteliti. Dimensi metodologis mencakup asumsi-asumsi mengenai bagaimana cara memperoleh pengetahuan mengenai suatu obyek pengetahuan. Sedangkan dimensi aksiologis berkaitan dengan posisi *value judgments*, etika serta pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian.

Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasi dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels (Denzin, 2000: 279-280).

Pengaruh idea marxisme - neo marxisme dan teori kritis mempengaruhi filsafat pengetahuan dari paradigma kritis. Asumsi realitas yang dikemukakan oleh paradigma adalah asumsi realitas yang tidak netral namun dipengaruhi dan terikat oleh nilai serta kekuatan ekonomi, politik dan sosial. Oleh sebab itu, proyek utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana paradigma kritis mencoba membedah realitas dalam penelitian ilmiah, termasuk di

dalamnya penelitian atau analisis kritis tentang teks media. Ada beberapa karakteristik utama dalam seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis yang bisa dilihat secara jelas.

Ciri pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas²¹. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial (Eriyanto, 2001:3-46).

Ciri kedua adalah ciri tujuan penelitian paradigma kritis. Karakteristik menyolok dari tujuan paradigma kritis ada dan eksis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi dan penguatan sosial. Dengan demikian tujuan penelitian paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, seorang peneliti dalam paradigma kritis akan mungkin sangat terlibat dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, membongkar mitos, menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada (Newman, 2000:75-87; Denzin, 2000:163-186).

²¹ Ciri pertama ini lebih banyak dalam kerangka karakteristik paradigma kritis sebagai ciri pendirian metafisis dari paradigma yang bersangkutan.

Ciri ketiga adalah ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setidaknya peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dari proses tersebut, dapat dikatakan bahwa etika dan pilihan moral bahkan suatu keberpihakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari analisis penelitian yang dibuat²².

Karakteristik keempat dari paradigma kritis adalah pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam seluruh penelitian kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang dan akan terjadi.

Dengan demikian, karakteristik keempat ini menempatkan penafsiran sosial peneliti untuk melihat bentuk representasi dalam setiap gejala, dalam hal ini media massa berikut teks yang diproduksinya. Maka, dalam paradigma kritis, penelitian yang bersangkutan tidak bisa menghindari unsur subjektivitas

²² Ciri ini lebih banyak disebut dengan sikap pendirian epistemologis dalam paradigma kritis. Dalam tataran epistemologis, paradigma kritis lebih bersifat transaksional, subjektif. Hal ini mempunyai konsekuensi yang bersifat metodologis juga.

peneliti, dan hal ini bisa membuat perbedaan penafsiran gejala sosial dari peneliti lainnya (Newman, 2000:63-87).

Dalam konteks karakteristik yang keempat ini, penelitian paradigma kritis mengutamakan juga analisis yang menyeluruh, kontekstual dan multi level. Hal ini berarti bahwa penelitian kritis menekankan soal *historical situatedness* dalam seluruh kejadian sosial yang ada (Denzin, 2000:170).

Perkembangan teori kritis semakin jelas ketika Sekolah Frankfurt menjadi

motor penggerak teori tersebut²³. Selain bahwa Sekolah Frankfurt bersentuhan dengan perkembangan ilmu sosial kritis pada waktu itu, Sekolah tersebut juga merefleksikan peran media massa pada masyarakat waktu itu. Tentu saja, konteks Jerman pada waktu itu juga sangat dipengaruhi oleh sejarah Jerman pada waktu pemerintahan Hitler (Nazi).

Dalam perkembangan selanjutnya, Sekolah Frankfurt juga menyatakan bahwa ternyata media bisa menjadi alat pemerintah untuk mengontrol publik, dalam arti tertentu media bisa menjadi bagian dari *ideological state apparatus* (Littlejohn, 2002:213). Dalam hal tertentu, media bukan adalah realitas yang netral dan bebas kepentingan, tapi media massa justru menjadi realitas yang

²³ Sekolah Frankfurt pada awalnya disebut dengan Institut Penelitian Sosial (*Institute for Social Research*) didirikan pada tahun 1923. Sekolah Frankfurt itu sendiri diberikan justru pada tahun 1960-an

rentan dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan dan berkuasa (Rogers, 1994:102-125).

Asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keterangan di atas adalah keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat. Ini berarti paradigma kritis melihat adanya “realitas” di balik kontrol komunikasi masyarakat. Masalahnya siapa yang mempunyai kekuatan kontrol tersebut? Mengapa mengontrol ? Ada kepentingan apa ? Dengan beberapa kalimat pertanyaan itu, terlihat bahwa teori kritis melihat adanya proses dominasi dan marginalisasi kelompok tertentu dalam seluruh proses komunikasi masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa proses penyebaran dan aktivitas komunikasi massa juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat yang bersangkutan.

Proses pemberitaan tidak bisa dipisahkan dengan proses politik yang berlangsung dan akumulasi modal yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Ini merupakan proses *interplay*, di mana proses ekonomi politik dalam media akan membentuk dan dibentuk melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi media itu. Ini berarti bahwa apa yang terlihat pada permukaan realitas belum tentu menjawab masalah yang ada. Apa yang nampak dari permukaan harian belum tentu mewakili kebenaran realitas itu sendiri. Teori kritis pada akhirnya

selalu mengajarkan kecurigaan dan cenderung selalu mempertanyakan realitas yang ditemui, termasuk di dalamnya teks media itu sendiri.

Paradigma kritis tidak cukup puas pada jawaban, pola, struktur, simbol dan makna yang tersedia²⁴. Perlu ada pemaknaan yang lebih komprehensif dan kritis atas media yang ada. Beberapa keyakinan teori kritis menjadi acuan awal pemahaman kita terhadap studi teks media dalam konteks paradigma kritis²⁵.

Teori kritis melihat bahwa media tidak lepas kepentingan, terutama sarat kepentingan kaum pemilik modal, negara atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian ini, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat pada dirinya bias atau terdistorsi.

Selanjutnya, teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks

²⁴ Secara metodologis, Guba menyatakan bahwa paradigma kritis menekankan proses dialog dan dialektika dalam seluruh proses penelitiannya. Sifat transaksional dalam hal ini menuntut keterbukaan yang akhirnya membuka iklim dialog antara peneliti dengan subjek penelitian. Dialog dalam paradigma kritis selalu dipahami sebagai proses dialektis dalam konteks transformasi ketidaktahuan dan ketidakadilan. Pola transformatif ini lebih berusaha untuk membuka selubung ideologi dan pengetahuan dalam konstelasi penderitaan, konflik dan perjuangan kolektif (Guba dalam Denzin, *Handbook of Qualitative Research*, 1994:105-117)

²⁵ Setidaknya paradigma kritis mempunyai keprihatinan pokok dalam hal pencerahan kritis, emansipasi kritis, penolakan terhadap determinisme ekonomi, rekonseptualisasi kekuasaan dan hegemoni, rekonseptualisasi kekuasaan dan ideologi, rekonseptualisasi kekuasaan dan praksis diskursif (praksis bahasa), berfokus pada hubungan antara kebudayaan, kekuasaan dan dominasi, dan peran pedagogi kebudayaan dalam sebuah masyarakat.

pengaruh kesadaran (*manufactured consent*). Dengan demikian, media menyediakan pengaruh untuk mereproduksi dan mendefinisikan status atau memaparkan keabsahan struktur tertentu. Inilah sebabnya, media dalam kapasitasnya sebagai agen sosial sering mengandaikan juga praksis sosial dan politik.

Pendefinisian dan reproduksi realitas yang dihasilkan oleh media massa tidak hanya dilihat sebagai akumulasi fakta atau realitas itu sendiri. Reproduksi realitas melalui media merupakan representasi tarik ulur ideologi atau sistem nilai yang mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, media tidak hanya memainkan perannya hanya sekedar instrumen pasif yang tidak dinamis dalam proses rekonstruksi budaya tapi media massa tetap menjadi realitas sosial yang dinamis.

Reproduksi realitas dalam media pada dasarnya dan umumnya akan sangat dipengaruhi oleh bahasa (Littlejohn, 2002:210-211), simbolisasi pemaknaan dan politik penandaan. Bahasa di samping sebagai realitas sosial, tetap bisa dilihat sebagai sebuah sistem penandaan. Sistem penandaan dalam arti bahwa bahasa atau suatu realitas yang ingin menandakan realitas lainnya (peristiwa atau pengalaman hidup manusia).

Dengan demikian, sebuah realitas dapat ditandakan secara berbeda pada peristiwa yang sama. Atau, dapat dikatakan bahwa pemaknaan yang tidak sama bisa dilekatkan kepada peristiwa yang sama. Masalah terjadi ketika suatu

makna yang ditafsirkan dan dikonstruksi ulang oleh kelompok tertentu dari peristiwa yang sama tersebut cenderung mendominasi penafsiran. Bagaimana mungkin sebuah makna tertentu bisa lebih unggul dan lebih diterima dibandingkan pemaknaan lainnya ?

Mengapa pemaknaan lain di luar pemaknaan yang sudah ditentukan justru dimarginalisasikan ? Dengan kata lain, bahwa sesungguhnya ketika kita melihat proses bahasa dan pemaknaan, sebetulnya kita juga melihat ranah atau wilayah pertarungan sosial (Stuart Hall, 1982:80). Pertarungan sosial tersebut lebih konkret terbentuk dalam sebuah wacana serta terartikulasikan dalam proses pembentukan dan praksis bahasa²⁶.

Kedua, bahasa dalam konteks wacana - terutama dalam konteks wacana komunikasi - sebetulnya mencakup pengiriman pesan dari sistem syaraf satu orang kepada yang lain, dengan maksud untuk menghasilkan sebuah makna sama dengan yang ada dalam benak si pengirim²⁷ (Tubs & Moss, 1994: 66). Pesan verbal selalu memakai kata. Kata selalu merujuk pada keberadaan sebuah bahasa. Ini berarti kita sepakat bahwa kita menggunakan simbol bahasa dalam aktivitas komunikasi.

²⁶ Ini berarti bahwa bahasa adalah suatu kegiatan sosial. Secara sosial, bahasa teritkat, dikonstruksikan dalam kondisi khusus dsan setting sosial yang tertentu.

²⁷ Tubs dan Moss dalam bukunya yang berjudul *Human Communication* mengatakan bahwa *communication involves sending messages from one person's nervous system to another's with the intention of creating a meaning simirlar to the one in the sender's mind. The verbal message does this through words, the basic elemets of language, and words, of course, are verbal symbols.*

Dalam perkembangan ilmu komunikasi modern, bahasa adalah kombinasi kata yang diatur dan dikelola secara sistematis dan logis sehingga bisa dimanfaatkan sebagai alat komunikasi. Dengan demikian, kata merupakan bagian integral dari keseluruhan simbol yang dibuat oleh suatu kelompok tertentu. Jadi, kata selalu bersifat simbolik. Simbol dapat diartikan sebagai realitas yang mewakili atau merepresentasikan idea, pikiran, gagasan, perasaan, benda atau tindakan manusia yang dilakukan secara arbitrer, konvensional dan representatif-intrepretif. Oleh sebab itu, tidak ada hubungan yang berlaku secara alamiah dan selalu bersifat koresponden antara simbol dengan realitas yang disimbolkan.

Ketiga, politik penandaan lebih banyak bermakna pada soal bagaimana praksis sosial pembentukan makna, kontrol dan penentuan suatu makna tertentu. Peran media massa dalam praksis sosial penentuan tanda dan makna tidak melepaskan diri dari proses kompetisi ideologi. Relasi dominasi dan kompetisi ideologis tidak hanya berproses pada tataran aparatur kelompok dominan saja tapi juga melalui produksi dan reproduksi kekuasaan yang berada dalam ruang budaya - tempat di mana makna hidup disusun. Pada proses inilah, terungkap bahwa produksi - konstruksi realitas menghubungkan dimensi politik wacana dengan dimensi politik ruang²⁸ (M.Shapiro, 1992: 1-6). Hal ini

²⁸ Shapiro mengatakan bahwa *a politics of discourse is inextricably tied to a politics of space. Moreovver, this intimate relationship between space and discourse is no one between disparate modes. Because "space" is constituted by the way locations are imagined or given meaning, ii is always*

disebabkan bahwa hanya dalam ruang tertentu saja praksis wacana yang lahir dari sejarah dominasi dan kompetisi kultur yang panjang hingga dimenangkannya kompetisi oleh kekuatan paling dominan dan hegemonis yang pada gilirannya menentukan rekayasa politik wacana.

3.3. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini – baik dalam metodologi dan metode analisa yang akan dilakukan- memakai pendekatan penelitian kualitatif. Berkaitan dengan metode yang mau dipakai dalam penelitian ini, maka perlu disampaikan bahwa penelitian ini akan memakai dua pendekatan metodis dalam penelitian. Ini berarti bahwa penelitian ini menempuh dua tahap penelitian. Tahap pertama akan menempuh penelitian yang memakai metode framing. Analisis framing merupakan tradisi bidang komunikasi yang memberikan penekanan pada pendekatan multi disipliner. Dalam analisa framing, keterlibatan atas konsep konsep sosial, politik dan kultural dapat dimungkinkan dalam menganalisa gejala komunikasi.

Pendekatan framing memungkinkan penelitian dan peneliti menempatkan informasi dalam konteks yang lebih khas sehingga isu tertentu memperoleh alokasi pemberitan yang lebih besar dibandingkan oleh isu yang lain. Analisa framing akan dilakukan pada isi teks media, terutama dalam

already a largely discursive phenomenon

head-line dan liputan utama harian “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” periode 1965 – 1968. Tujuan metode tahap pertama ini lebih merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan masalah no 1. Frame atau bingkai pokok yang dijadikan landasan dan gagasan utama dalam penelitian ini frame atas legitimasi – delegitimasi terhadap Soekarno, peristiwa G30S, Partai Komunis Indonesia dengan ormas-ormasnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jenderal Soeharto.

Adapun model analisa framing yang digunakan adalah model Robert N. Entman. Perspektif framing Entman digunakan untuk mendeskripsikan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Framing Entman memasukkan dua dimensi besar dalam teks media, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek tertentu dari realitas.

Penelitian tahap kedua akan dilakukan dengan memakai metode analisis isi secara kualitatif, yaitu dengan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*). Model yang menjadi kerangka besar analisis wacana kritis dalam penelitian ini memakai model kerangka yang dikembangkan oleh Norman Fairclough.

Dalam kaitan dengan kerangka Norman Fairclough maka penelitian meletakkan teks mikro media sebagai bahan dasar mentah analisa situasional, sementara kajian literatur-dokumenter sebagai bahan dasar analisa institusional dan praktek sosiokultural serta studi dokumentasi (dokumen koran

atau harian yang bersangkutan yang bisa dicari di Perpustakaan Nasional, Gedung Arsip Nasional atau koleksi pribadi-pribadi).

Populasi penelitian ini sesungguhnya adalah keseluruhan teks edisi koran harian “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” dari tahun 1965 - 1968. Sementara unit analisis penelitian ini adalah terutama teks editorial atau tajuk rencana.

Analisa wacana kritis pada setiap frame yang telah dilakukan akan banyak memperhatikan dua unsur utama pengembangan wacana secara kritis, yaitu *communicative events* dan *orders of discourse* (Fairclough, 1995:132-166). Peristiwa komunikatif adalah proses pengolahan refleksi, representasi dan rekontekstualisasi dalam bentuk teks. Analisa teks ini juga meliputi kegiatan produksi dan komunikasi teks serta latar belakang situasional, institusional dan masyarakat, termasuk di dalam ada strategi wacana.

Tatanan wacana adalah praksis diskursif dari suatu komunitas komunikasi. Tatanan wacana adalah suatu domain hegemoni budaya potensial kelompok dominan. Analisa tatanan wacana ini bisa dilihat dari *genre* bahasa dan wacana yang berkembang dalam setiap edisi.

3.4. Tahap-Tahap dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar dan menelanjangi beberapa struktur real yang tertutupi oleh beberapa hal yang dicitrakan dalam media

massa terkait. Dengan kata lain, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kritis terhadap pola-pola pemberitaan dalam situasi krisis. Langkah-langkah konkret penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, persiapan penelitian yang meliputi studi literatur mengenai metodologi, kerangka teori dan metode penelitian yang mau dipakai. Dalam masa persiapan ini, hal yang juga menjadi fokus perhatian dalam pengumpulan data-data literatur yang dijadikan beberapa sumber penulisan konteks makro ekonomi politik.

Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data terutama yang berkaitan dengan penyediaan dan pengadaan beberapa koran “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” yang akan dijadikan beberapa materi dasar penelitian tersebut.

Ketiga adalah tahap analisis dan elaborasi data mikro dengan wacana meso serta makro dalam tatanan wacana kritis.

3.5. Teknik Analisis dan Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Framing dan Metode Framing

Analisis framing merupakan teknik analisa teks mikro pertama yang digunakan digunakan untuk menganalisis teks dalam penelitian ini. *Framing* merupakan upaya media guna memberikan penekanan atau menonjolkan penafsiran atau pemaknaan mereka terhadap suatu peristiwa. Analisis *framing*

dapat diartikan sebagai suatu metodologi penelitian kualitatif dan teknik analisis isi media yang mampu membongkar upaya media di dalam mendefinisikan realitas sosial. Dengan menggunakan analisis framing, peneliti akan mampu mengungkapkan upaya media di dalam mendefinisikan realitas sosial.

Dalam studi ini, analisis *framing* yang digunakan mengacu pada konsep framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman. Entman adalah ahli yang memposisikan dasar-dasar bagi analisa framing untuk penelitian isi media. Entman menyatakan bahwa dalam framing terdapat dua dimensi besar yang perlu diteliti secara mendasar, yaitu seleksi isu dan penekanan aspek tertentu dari realitas isu yang diangkat.

Seleksi isu adalah aspek yang berhubungan dengan soal seleksi fakta. Ini berarti bahwa konsep seleksi isu berhubungan dengan soal bagaimana wartawan atau awak media lebih memilih satu fakta dibandingkan dengan fakta yang lain. Dengan keragaman dan kompleksitas fakta itu sendiri, maka aspek seleksi isu juga menyatakan atas aspek apa saja yang diseleksi untuk ditampilkan dalam sebuah media. Sementara itu, penonjolan isu berhubungan dengan soal penulisan fakta.

Ketika para wartawan atau awak media sudah memilih isu atau fakta, bagaimana aspek tersebut dituliskan. Hal ini sangat berkaitan dengan soal pemakaian kata, kalimat, gambar untuk ditampilkan kepada khalayak. Dengan

demikian, dalam konsep Entman, framing merupakan soal pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam sebuah wacana untuk menekankan kerangka atau cara pandang tertentu atas sebuah realitas (Eriyanto, 2002:65-84).

Dalam perspektif Entman, framing isi media meliputi proses pendefinisian masalah, proses prakiraan masalah, proses pembuatan keputusan moral dan proses penekanan penyelesaian. Proses pendefinisian masalah adalah elemen pokok dari keseluruhan proses framing. Dapat dikatakan bahwa pendefinisian masalah adalah *master frame*. Elemen kedua dalam framing ala Entman adalah proses prakiraan masalah. Elemen kedua ini sesungguhnya memuat proses framing atas siapa yang dianggap sebagai aktor dalam sebuah peristiwa tertentu. Elemen kedua dalam proses framing ini adalah proses framing atas subjek dan objek peristiwa tertentu.

Elemen ketiga adalah elemen penilaian dan keputusan moral. Elemen ketiga adalah elemen yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Elemen yang terakhir adalah elemen penekanan penyelesaian. Elemen ini dimanfaatkan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan.

Bagan VI

Bagan Elemen dalam Framing Robert Entman

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai
---	---

	masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (penekanan penyelesaian masalah)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

(Eriyanto, 2002:188-189)

3.5.2. Analisa Wacana Kritis: Praktek Wacana

Setelah teks mikro dianalisis dengan metode framing, maka penelitian masuk dalam tahap praktek wacana. Ada dua hal yang tercakup dalam praktek wacana, yaitu produksi teks dan konsumsi teks. Apa yang dimaksud dengan teks dapat berupa lisan maupun tulisan. Teks lisan adalah kata-kata yang diucapkan melalui radio atau kata-kata yang diucapkan.

Menurut Fairclough, dipandang dari fungsinya, ada aspek fungsi yang diartikulasikan di dalam sebuah teks. Aspek fungsi yang pertama adalah *ideational function* yang merupakan representasi tertentu dan rekontekstualisasi dari praktek sosial yang membawa muatan ideologis tertentu. Aspek fungsi kedua adalah konstruksi identitas tertentu dari penulis dan pembaca, seperti identitas status dan perannya, atau aspek identitas dan

personalitas dan individualitas yang akan ditampilkan. Aspek yang terakhir adalah konstruksi hubungan antara penulis dan pembaca.

Ideational function (representasi) pada dasarnya ingin melihat bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, kegiatan ditampilkan dalam teks. Representasi dalam pengertian Fairclough dilihat dari 2 hal, yakni bagaimana seseorang, kelompok, dan gagasan ditampilkan dalam anak kalimat dan gabungan atau rangkaian antar anak kalimat (penjelasan dikutip dari Eriyanto, 2001:290-305, lihat juga: Norman Fairclough, 1995b:103-149, dan Norman Fairclough, 1995a:187-213).

Aspek lain yang diperhatikan dalam praktek wacana adalah representasi dalam anak kalimat. Aspek ini berhubungan dengan bagaimana seseorang, kelompok, peristiwa, dan kegiatan ditampilkan dalam teks, dalam hal ini bahasa yang dipakai.

Menurut Fairclough, ketika sesuatu tersebut ditampilkan, pada dasarnya pemakai bahasa dihadapkan pada paling tidak dua pilihan. Pertama, pada tingkat kosakata (*vocabulary*) Pilihan kosakata yang dipakai terutama berhubungan dengan bagaimana peristiwa, seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu dikategorikan dalam suatu set tertentu. Pilihan dapat juga dilihat dari pemakaian metafora yang dipakai. Menurut Fairclough, pilihan pada metafora merupakan kunci bagaimana realitas ditampilkan dan dibedakan dengan yang lain. Metafora bukan hanya persoalan keindahan literer, karena bisa

menentukan apakah realitas itu dimaknai dan dikategorikan sebagai positif ataukah negatif. Kedua, pilihan yang didasarkan pada tingkat tata bahasa. Pertama-tama perbedaan di antara tindakan (dengan aktor sebagai penyebab) dan sebuah peristiwa (tanpa aktor sebagai penyebab atau pelaku). Ini bukan semata persoalan ketatabahasaan, karena realitas yang dihadirkan dari pemakaian tata bahasa ini berbeda. Pemakai bahasa dapat memilih, apakah seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu hendak ditampilkan sebagai sebuah tindakan (*action*) ataukah sebagai sebuah peristiwa (*event*).

Pada tingkat tata bahasa ini, analisis Fairclough terutama dipusatkan pada apakah tata bahasa ditampilkan dalam bentuk proses ataukah dalam bentuk partisipan. Dalam bentuk proses, apakah seseorang, kelompok, kegiatan ditampilkan sebagai tindakan, peristiwa, keadaan, ataukah proses mental. Ini terutama didasarkan pada bagaimana suatu tindakan hendak digambarkan. Bentuk tindakan menggambarkan bagaimana aktor melakukan suatu tindakan tertentu kepada seseorang yang menyebabkan sesuatu. Bentuk partisipan, diantaranya, melihat bagaimana aktor-aktor ditampilkan dalam teks. Apakah aktor ditampilkan sebagai pelaku atau korban dalam teks.

Koherensi dalam kalimat pada titik tertentu menunjukkan ideologi dari pemakai bahasa. Koherensi ini merupakan pilihan. Artinya dua buah anak kalimat dapat dipandang hanya sebagai penjelas, tambahan, atau saling

bertentangan, tergantung apad bagaimana fakta satu dipandang saling berhubungan dengan fakta lain.

Aspek Representasi dalam rangkaian anak kalimat berhubungan dengan bagaimana dua kalimat atau lebih disusun dan dirangkai. Representasi ini berhubungan dengan mana dalam kalimat yang lebih menonjol dibandingkan dengan bagian lain. Rangkaian kalimat itu bukan hanya berhubungan dengan teknis penulisan, karena rangkaian itu bisa mempengaruhi makna yang ditampilkan pada khalayak.

Selain aspek representasi, penelitian ini juga memperhatikan dimensi relasi. Relasi berhubungan dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media disini dipandang sebagai suatu arena sosial, di mana semua kelompok, golongan, dan khalayak yag ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan versi pendapat dan gagasannya. Analisis tentang konstruksi hubungan ini dalam media sangat penting dan signifikan terutama kalau dihubungkan dengan konteks sosial. Pengertian tentang bagaimana relasi itu dikonstruksikan dalam media di antara khalayak dan kekuatan sosial yang mendominasi kehidupan ekonomi, politik, dan budaya adalah bagian penting dalam memahami pengertian umum relasi antara kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat yang berkembang.

3.5.3. Analisa Wacana Kritis: Intertekstualitas.

Salah satu gagasan penting dari Fairclough adalah mengenai intertekstualitas, yang dikembangkan dari pemikiran Julia Kristeva dan Michael Bakhtin. Intertekstualitas adalah sebuah istilah di mana teks dan ungkapan dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya, saling menanggapi dan salah satu bagian dari teks tersebut mengantisipasi lainnya. Setiap ungkapan dihubungkan dengan rantai dari komunikasi. Semua pernyataan atau ungkapan didasarkan oleh ungkapan yang lain, baik implisit atau eksplisit. Disini kata-kata dievaluasi, diasimilasi, disuarakan, dan diekspresikan kembali dengan bentuk lain. Semua pernyataan, dalam hal ini teks, didasarkan dan mendasari teks lain (Eriyanto, 2001:305-306).

Pada penelitian ini produksi teks yang akan dilihat dari karakteristik harian “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” berdasarkan latar belakang sejarah berdirinya, pengamatan mengenai isi media tersebut melalui analisis *intertextuality manifest*. Tentu saja dalam proses intertekstualitas ini, penelitian juga dilakukan terhadap teks-teks dari sumber wacana lainnya.

3.5.4. Analisa Wacana Kritis: Praktek Sosiokultural

Asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media mempengaruhi bagaimana suatu wacana dimunculkan di media adalah asumsi yang mendasari analisis praktek sosiokultural. Penelitian ini merupakan gambaran situasi

ekonomi-politik yang berkaitan dengan ideologi kapitalisme yang mendorong instrumentasi dan proses legitimasi-delegitimasi dalam konteks situasi krisis.

Konteks sosiokultural yang berada di luar media diasumsikan turut serta di dalam memberikan pengaruhnya atas wacana yang hadir di media. Hal ini searah dengan apa yang dipikirkan oleh Fairclough, di mana praktek sosiokultural memberikan pengaruhnya terhadap teks melalui praktek wacana.

3.5. Objek dan Fokus Utama Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Penelitian dilakukan terhadap kedua harian tersebut terbitan tahun 1965 hingga 1968. Terdapat beberapa pertimbangan mengapa koran terbitan kurun waktu tersebut yang dijadikan obyek penelitian.

Alasan pertama adalah alasan waktu atau kurun yang dipilih dalam penelitian ini. Kurun tahun 1965 sampai dengan tahun 1968 adalah era atau kurun waktu pengaruh yang signifikan militer Indonesia dalam seluruh industri pers Indonesia.

Alasan kedua adalah tahun 1965 – 1968 adalah kurun waktu transisional yang mempunyai tingkat krisis sosial yang sedemikian tinggi. Banyak perubahan sosial yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, pemilihan kurun waktu tersebut adalah pemilihan kurun waktu yang krusial demi tujuan penelitian ini.

Alasan ketiga mengapa penelitian memilih dua harian yang dibentuk oleh militer, karena justru penelitian mau masuk lebih dalam dan menulik pada pola-pola komunikasi krisis, instrumentalisasi kapitalisme media dan proses legitimasi-delegitimasi dalam media massa Indonesia. Pemilihan edisi harian yang mau diteliti dilakukan secara purposif.

Mengenai jenjang teks, fokus penelitian akan menitikberatkan pada tajuk rencana, dan kolom editorial dalam harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Alasan fokus penelitian ini lebih didasarkan bahwa tajuk rencana, kolom editorial dan artikel headline, pada dasarnya, merupakan roh bagi sebuah harian. Dapat dikatakan juga bahwa editorial atau tajuk rencana merupakan “perasan dari seluruh perasaan” seluruh isi surat kabar menurut perspektif redaksi. Biasa dalam tajuk atau artikel headline terdapat pandangan, pikiran, impresi dan kritisisme redaksi terhadap beragam peristiwa yang dibangun untuk menghasilkan sebuah titik pandang dan kemudian direpresentasikan ke tengah publik pembaca.

3.7. Keabsahan Penelitian

Studi ini menggunakan paradigma kritis. Kriteria kualitas penelitian ini dengan demikian adalah *historical situatedness*, yaitu sejauh mana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari teks berita. Sebagai prasyarat bagi analisis wacana kritis maka dalam penelitian ini

analisis yang dilakukan harus bersifat historis (lihat Hidayat dalam Eriyanto, 2000, hal. xii).

Penelitian ini berusaha memenuhi kriteria kualitas tersebut dengan cara memberikan gambaran keseluruhan konteks historis tersebut pada bagian analisis sosiokultural. Konteks sosiokultural di luar media yang demikian diasumsikan mempengaruhi bagaimana wacana yang muncul di media. Keseluruhan konteks yang ditampilkan berhubungan dengan ideologi kapitalisme yang mendorong hubungan antara media massa dengan ideologi militeristik waktu itu.

3.8. Keterbatasan Penelitian

Pertama, keterbatasan metodis. Penelitian analisa wacana mengandaikan kepekaan linguistik bagi para peneliti. Keterbatasan kapabilitas mahasiswa komunikasi, seperti penulis ini, juga akan mempengaruhi penulis menjelaskan seluruh proses analisa wacana kritis. Kedua, keterbatasan teknis. Penelitian ini mengacu penelitian koran “Angkatan Bersenjata” dan “Berita Yudha” yang telah terbit tahun 1965-1968. Para wartawan dan redaktur pada waktu itu sudah sulit untuk ditemui (karena meninggal atau tua). Juga, keterbatasan dokumentasi koran tersebut, di perpustakaan nasional dan tempat-tempat pribadi.

BAB IV

KONTEKS DAN ANALISA DATA

4.1. Konteks Diskursus

Pada bab sebelumnya, rangkaian argumentasi yang ditawarkan lebih banyak berisi mengenai latar belakang permasalahan yang mau dijawab, kerangka teoritis yang menjadi acuan dasar argumentasi konseptual dan kerangka yang berisi paradigma metodologis yang dipakai dalam penelitian ini.

Maka dalam bab keempat ini, bagian pertama akan lebih menempatkan konteks sejarah dan diskursus makro sebagai sebuah perspektif yang harus diperhatikan sebelum ada analisa data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Komunikasi dengan segala perangkat dan dinamikanya mempunyai posisi serta peran yang unik dan karakteristik dalam situasi krisis, konfliktual, perang atau konflik yang sarat dengan momen kekerasan. Peran dan fungsi komunikasi mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif-konstruktif atau negatif-destruktif.

Terdapat tahapan dalam dinamika konflik yang sarat dengan momen kekerasan: mulai dari konflik yang masih bersifat laten-potensial, dalam bentuk ketegangan struktural-kultural, sampai dalam bentuk konflik yang sudah menjadi gejala yang nampak serta menjadi konflik yang terbuka, terakhir pada tahap krisis di mana konflik meningkat menimbulkan krisis sosial.

Sejauh mana komunikasi dan media massa memainkan peranan dan posisi penting dalam situasi krisis, jelas akan banyak dipengaruhi dengan tiga faktor tindakan media, yaitu pertama bagaimana informasi dalam sebuah konflik tersedia dan disediakan; dengan demikian hal ini juga berkaitan dengan siapa dan atas kepentingan apa informasi tersebut disediakan. Kedua, bagaimana informasi tersebut disirkulasikan atau didistribusikan pada segenap masyarakat; dengan demikian akan sangat berkaitan dengan cara dan pengendalian ekonomi politik media. Terakhir, bagaimana informasi yang disirkulasikan tersebut ditangkap, dimaknai dan dipersepsikan serta digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk tujuan dan kepentingan mereka.

Informasi mengenai konflik sosial yang tersedia dalam situasi konflik biasanya cenderung mudah dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk tujuan politik dan kepentingan mereka. Hal itu terjadi karena ada kecenderungan yang terbatas dan langkanya ketersediaan informasi yang seimbang dan proporsional tentang konflik dalam situasi krisis sehingga informasi yang ada mudah dan bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkonflik.

4.2. Diskursus Makro Politik Indonesia

Ada beberapa tema besar yang bisa dimasukkan dalam diskursus makro politik Indonesia. Pertama adalah diskursus suhu politik Indonesia dalam

kancah perang dingin setelah perang dunia II selesai, baik pada teater Eropa-Jerman yang diselesaikan oleh pasukan sekutu pimpinan Jenderal Dwight Eisenhower, maupun pada teater Asia Timur Jauh yang diakhiri dengan jatuhnya bom atom pertama di kota Hiroshima dan Nagasaki. Faktor tema pertama ini akan membawa Indonesia pada arena persaingan hegemonik antara negara-negara yang menganut ideologi kapitalisme dengan faksi-faksi negara yang menganut ideologi sosialisme-komunisme

Tema kedua adalah tema eksperimentasi demokrasi sosial politik Indonesia. Setidaknya, eksperimentasi ini sendiri setidaknya merupakan proses sosial yang semestinya menjadi ajang pembelajaran politik Indonesia kontemporer, setelah menerima pengakuan kedaulatan dari Belanda tahun 1949. Tapi di lain pihak, eksperimentasi sosial politik Indonesia juga membawa pengaruh negatif yang tidak sedikit bagi rakyat Indonesia, misalnya ketidakstabilan politik, maraknya pemberontakan militer terutama militer daerah dan lain sebagainya.

Hal lain yang menjadi penting dalam bahasan ini adalah dinamika hubungan antara penguasa politik sipil dan kecenderungan pemimpin militer Indonesia untuk turut berkepentingan dalam seluruh proses politik sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Dalam tema kedua ini sesungguhnya ada beberapa pemeran penting dalam struktur sosial politik Indonesia. Pemeran penting itu adalah Presiden Soekarno sendiri, faksi-faksi militer yang ada di

Indonesia, Partai Komunis Indonesia dan pihak-pihak yang berafiliasi pada kepentingan kapitalisme di Indonesia. Tema kedua ini juga akan ditarik sepanjang proses perpindahan politik semenjak peristiwa G 30-S sampai pada peristiwa Surat Perintah 11 Maret 1966, dari proses politik pembubaran Partai Komunis Indonesia sampai pelimpahan kekuasaan politik dari Presiden Soekarno kepada pejabat Presiden, Jenderal Soeharto. Dan selanjutnya kiprah dan konsolidasi rejim Orde Baru dalam proses pembangunan Indonesia.

Tema ketiga adalah tema peristiwa G 30-S. Tema ini merupakan tema pemicu pergantian rejim sekaligus menjadi acuan pokok delegitimasi kelompok Komunis di Indonesia. Tema ini juga menjadi tema anti klimaks sistem politik demokrasi terpimpin yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu²⁹. Peristiwa G 30-S ini juga menjadi awal peristiwa yang sengaja dikaburkan oleh rezim Orde Baru.

Tema keempat adalah delegitimasi peran sosial politik Soekarno dalam sistem politik Indonesia waktu itu. Proses peminggiran Soekarno juga merupakan proses berjalannya proses legitimasi sistem kapitalisme di Indonesia. Tema proses legitimasi sistem kapitalisme di Indonesia merupakan tema besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa diskursus besar dalam

²⁹ Soekarno dalam ajaran ideologinya memperkenalkan sinergi politik antara unsur Nasionalis (NAS), unsur Agama (A) dan unsur Komunis (KOM), yang kemudian disingkat menjadi NASAKOM. Ajaran NASAKOM ini merupakan intisari pemikiran Soekarno yang mau menyatakan bahwa iklim imperialisme dan kolonialisme rakyat Indonesia bisa terkikis dengan mengadakan sinergi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan atas unsur-unsur nasionalis, kaum agama dan praksis komunisme.

pembentukan opini publik di Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1968 adalah tema diskursus proses ideologisasi kapitalisme liberal di Indonesia. Muara proses ideologisasi kapitalisme liberal merupakan hal yang jelas. Sementara itu, delegitimasi peran sosial politik Soekarno merupakan titik pijak yang harus dilalui kalau proses ideologisasi kapitalisme liberal mau berhasil³⁰.

4.3. Suhu Politik Indonesia Dalam Kancan Perang Dingin

Sangat jelas terlihat bahwa suhu politik Indonesia pada paruh kedua tahun 1950-an sampai dekade tahun 1960-an merupakan suhu politik yang naik tajam berbarengan dengan naiknya suhu politik global dan regional. Politik global sendiri terpolarisasi dalam dua kubu ideologi yang mencoba menarik para pendukungnya, yaitu kubu kapitalisme-liberal yang dipimpin oleh Amerika Serikat berikut sekutunya, yang kebetulan juga menjadi pemenang dalam Perang Dunia II. Kubu polar lainnya adalah kubu sosialisme-komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Republik Rakyat Cina berikut dengan para sekutunya. Peningkatan suhu politik regional mengikuti peningkatan suhu politik polarisasi ideologi global yang tidak jarang menimbulkan konflik-konflik regional, seperti yang terjadi di Vietnam, Semenanjung Korea, dan Kuba.

³⁰ Soekarno dilihat sebagai penghalang keberhasilan penyebaran pengaruh kapitalisme liberal karena dia dianggap sebagai tokoh kunci yang mempunyai pengaruh yang sedemikian besar dalam usaha resistensi pengaruh kapitalisme liberal di Asia khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya.

Selain faktor sosial politik global dan regional, suhu politik Indonesia semakin meningkat dengan posisi serta potensi Indonesia di kawasan Asia. Posisi dan potensi strategis Indonesia di kawasan Asia dan global pada waktu itu menjadikan Indonesia menjadi arena perebutan pengaruh ideologi-ideologi utama global waktu itu. Indonesia sendiri pada waktu itu mempunyai posisi geopolitik yang begitu penting di wilayah Asia Tenggara. Wilayah Indonesia seluas 580.000 mil persegi di samping rangkaian Asia Timur yang strategis yang merentang dari kepulauan Kuril sampai New Zealand.

Bagi kekuatan kapitalisme, penguasaan Asia Tenggara merupakan penguasaan dan pembendungan ideologi komunis yang bergerak ke selatan. Amerika sudah mempunyai front kapitalisme di Filipina sekaligus mempunyai pangkalan militer di Subic³¹. Inggris mempunyai kaitan resmi di Singapura, Malaysia dan Serawak. Secara jangka panjang, penguasaan Indonesia akan menjaga kestabilan sosial-ideologi di wilayah Vietnam Selatan, Thailand, Laos, Kamboja, Malaya dan Singapura. Yang pada akhirnya juga akan menjaga stabilitas politik di Semenanjung Korea, Filipina, Australia dan Selandia Baru.

Tapi dari blok komunis, penguasaan dan pengaruh komunis di Indonesia akan mempengaruhi keseimbangan politik di Asia. Penguasaan Indonesia akan berpengaruh domino di Singapura, Malaysia, Thailand, Laos ke utara sehingga

³¹ Salah satu pangkalan utama Armada V Amerika yang mempunyai tanggung jawab wilayah Asia dan Pasifik.

komunisme tinggal menjepitnya dari Republik Rakyat Cina. Atau penguasaan komunisme Indonesia akan bergerak ke timur ke Papua Niugini, Australia dan Selandia Baru. Sehingga kalau hal ini terjadi maka Jepang, Korea Selatan, Inggris dan Amerika akan terisolasi atau setidaknya terpisah dengan samudera yang luas. Jika Indonesia jatuh ke blok komunis maka Jepang dan Semenanjung Cina (Korea, Hongkong dan Taiwan) akan juga ikut runtuh.

Tahun 1960-an, konstelasi komunisme di Asia telah menjepit saling membelakangi bangsa-bangsa Anglo-Amerika sepanjang garis pantai Laut Cina Selatan. Inggris ada di Borneo-Malaysia dan menguasai perbatasan untuk membendung ekspansionisme barisan Soekarno yang didukung oleh PKI. Sementara itu, Amerika di Vietnam dengan harapan membendung kekuatan komunis dari Cina di Vietnam dan berusaha memelihara kekuatan non-komunis di Vietnam Selatan. Persaingan ideologi tidak hanya berlangsung antara ideologi kapitalisme global dengan sosialisme-komunis waktu itu, tapi intra ideologi sendiri juga terjadi persaingan. Persaingan kapitalisme-global ala neo-keyneisme bersaing dengan kapitalisme kroni-nepotis ala borjuisme-priyayi Indonesia. Persaingan Sosialisme-Leninisme-Stalinisme dengan ideologi Sosialisme-Komunis ala Mao Tse Tung. Persaingan ekstra dan intra ideologi menjadi suasana persaingan menjadi lebih rumit atau kompleks.

Konstelasi persaingan antar ideologi lebih menemukan identitas permanensi konflik lokal dalam persaingan ideologi global. Amerika Serikat

untuk sementara mampu membendung pengaruh komunis di Eropa setelah perang dunia II dengan memberikan bantuan ekonomi yang begitu massif dalam *Marshall Plan*.

Pada dunia ketiga, Amerika memakai cara lain yang lebih murah dan sangat bersifat penetratif³². Untuk kasus-kasus dunia ketiga, Amerika lebih memakai cara-cara subversif dan mengandalkan bantuan lembaga intelijen Amerika (CIA)³³. Suhu perang dingin global juga dirasakan pada dunia ketiga dengan paradigma yang dibawa oleh Foster Dulles yang dengan sederhana menarik garis batas kawan dan lawan dengan menyatakan bahwa yang tidak mendukung Amerika berarti pada saat itu pula menjadi musuh Amerika. Sebetulnya begitu banyak teori mengenai suhu politik Indonesia dalam era perang dingin, tapi yang jelas berbagai macam teori tersebut tidak bisa menjelaskan begitu banyaknya korban yang harus mati di dunia ketiga³⁴, khususnya di Indonesia.

Amerika Serikat mempunyai banyak kepentingan di Asia, khususnya di Indonesia. Selain bahwa Indonesia mempunyai posisi yang strategis dalam peta

³² Dalam setiap operasi terselubung, CIA membonceng badan-badan internasional yang mempunyai kegiatan di Indonesia, yaitu Palang Merah Internasional, badan-badan resmi PBB dan IMF, serta badan-badan multinasional yang menanamkan modal di Indonesia.

³³ Peran Amerika Serikat dalam pemberontakan PRRI/Permesta begitu nyata. Tapi pemberontakan setengah hati bisa ditumpas oleh pasukan Indonesia.

³⁴ Konflik dunia kapitalis dengan ideologi komunis berkembang Asia Tenggara, selain di Indonesia, konflik juga berkembang di Vietnam, Laos, Kamboja. Ingat juga peristiwa perang Vietnam dengan perang horizontal waktu Khmer Merah berkuasa di Kamboja.

politik Asia, juga Amerika mempunyai investasi yang besar dalam bidang perminyakan dan sumber daya alam, yang meliputi minyak di kepulauan Riau dan beberapa penambangan di Irian Jaya.

Dalam peningkatan suhu politik era perang dingin di Indonesia, operasi intelijen merupakan suatu hal yang melekat dan merupakan hal yang wajar dilakukan dalam sebuah proses politik sosial. Dapat dikatakan bahwa peran intelijen begitu signifikan dalam setiap usaha perubahan sosial. Dapat dikatakan operasi intelijen yang dijalankan di wilayah Indonesia merupakan bagian kecil dari operasi intelijen global yang mengubah konfigurasi kekuatan politik dunia pada umumnya dan kekuatan politik nasional Indonesia pada khususnya.

4.4. Eksperimentasi Sosial Politik-Ekonomi Dan Relasi Politik Sipil - Militer

Dimulai tahun 1950-an, Indonesia mengalami proses pembelajaran dan eksperimentasi sosial politik untuk memberikan warna politik kenegaraan segera setelah menerima piagam pengakuan kedaulatan Indonesia dari Kerajaan Belanda. Setidaknya ada tiga pemeran penting dalam fase ini, yaitu beberapa politikus intelektual sipil yang selalu mengusahakan negosiasi politik dalam seluruh proses kemerdekaan, angkatan perang Indonesia yang telah berjuang secara fisik-bersenjata untuk meraih kemerdekaan, dan massa

tradisional Indonesia yang selalu mempunyai harapan akan hadirnya “Ratu Adil” yang membebaskan Indonesia.

Pada awal pengisian kedaulatan Indonesia, sektor pendapatan ekspor Indonesia banyak dipegang oleh para investor asing, organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sendiri belum tertata dengan rapi dan elit politik tidak mempunyai landasan kekayaan ekonomi yang mapan. Peristiwa proklamasi negara kesatuan pada tahun 1950 telah membawa iklim politik yang cenderung sentrifugal dan terjadi banyak perlawanan daerah mulai antara tahun 1950 sampai akhir tahun 1965. Organisasi TNI telah ditata menjadi organ politik yang dominan.

Distribusi ideologi sendiri pada era tersebut dapat dilihat dalam tiga kekuatan utama, yaitu ideologi nasionalisme populistis ala Soekarno, ideologi agama yang dianut oleh kekuatan agama tradisional (NU) dan kaum agamawan modern (Masyumi), ideologi Marxisme yang diinterpretasikan secara nasional dan diwujudkan dalam partai politik yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun dalam praksis politik Indonesia kontemporer pada waktu itu, terjadi pembelahan secara tegas antara ideologi populis Marhaenisme Soekarno yang menyandarkan pada praksis politik homogenitas dan gotong royong dengan PKI yang berkonsentrasi pada soal perjuangan kelas.

Ideologi populis Soekarno selalu menekankan terjadi perjuangan revolusioner yang berkelanjutan. Kepemimpinan Soekarno didasarkan pada

idealisme karismatik dan ditujukan untuk menciptakan kesatuan mistis dalam melawan musuh dari luar (Wertheim, 1971 dan Saskia, 1999). Ideologi perjuangan kelas ala PKI mendasarkan bukan pada pembentukan partai kader yang terdidik, berdedikasi dan komit dengan perjuangan kelas melainkan dibangun atas dasar basis massa yang banyak dan tersebar di mana-mana.

Meski terjadi pembelahan vertikal dalam sistem sosial politik masyarakat, Indonesia pada tahun 1950 menerapkan sistem politik demokrasi parlementer atas dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kekuasaan Presiden waktu itu belum begitu besar. Dalam kerangka UUDS 1950, angkatan bersenjata juga berada subordinasi pada kontrol politisi sipil. Beberapa partai politik memainkan peranan penting dalam eksperimentasi demokrasi parlementer tersebut³⁵. PNI dan PSI memainkan pengaruh yang tidak sedikit dalam membangun kerangka parlementarisme Indonesia. Harga demokrasi parlementer membawa pada ketergantungan stabilitas ekonomi pada investor asing.

Eksperimen demokrasi parlementer tidak membawa hasil yang penting bagi perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Debat dan perlawanan politik menghasilkan destabilisasi sistem politik yang rentan “mosi tidak

³⁵ Adam Malik dalam memoarnya pernah menyatakan bahwa seluruh sistem politik parlementer tampak seperti omong kosong politik, setiap politisi mudah bergoyang ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang untuk menangkap apa saja yang bisa ditangkap....*Menyesuaikan diri dengan citra demokrasi liberal yang merupakan aib nasional hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja* (Adam Malik, 1980:234). Adam Malik dikenal sebagai kader Partai Murba, bentukan Tan Malaka.

percaya”. Tidak bisa diingkari bahwa metode kabinet koalisi tidak bisa juga meredam gejolak ketidakseimbangan politik Indonesia waktu itu. Ir. Soekarno sendiri menyatakan bahwa “demokrasi liberal” telah membawa Indonesia pada kebangkrutan ekonomi yang cukup parah. Ekonomi kolonial yang menyandarkan pada ekonomi perkebunan begitu merosot, ketika Belanda kehilangan kekuasaannya untuk memberlakukan dengan tegas struktur hukum, politik dan fiskal - yang menjadi dasar perekonomian waktu itu.

Secara ekonomis, PNI menghendaki sistem koperasi dalam proses pembentukan awal ekonomi Indonesia. PKI justru berpandangan bahwa ekonomi Indonesia harus diletakkan pada otoritarianisme dan sentralisme ekonomi. Masyumi mempertahankan kepentingan pengusaha pribumi Indonesia (Robinson, 1986:37). Dalam demokrasi parlementer, Indonesia gagal untuk membentuk kapital domestik secara bertahap. Untuk mengimbangi kelemahan kapitalis pribumi, perilaku korup dan sistem patrimonialisme dalam birokrasi yang kuat³⁶, maka pemerintah harus menanggung seluruh proses ekonomi nasional Indonesia.

Salah satu puncak eksperimentasi politik Indonesia waktu itu adalah Pemilihan Umum tahun 1955. Partai Nasional Indonesia berhasil menjaring suara terbanyak, yaitu 22,3% suara. Masyumi mendapat suara: 20,9%. Nahdlatul Ulama mendapat suara 18,4% suara. Partai Komunis Indonesia

³⁶ PNI membangun wilayah “politik-ekonomi” yang luas melalui hubungan kenegaraan dengan sejumlah jaringan perbankan yang telah berkembang waktu itu (Robinson, 1986:49)

mendapatkan kedudukan ke empat dengan 16,4% suara (Herbert Feith, 2001:37-59). Berikut ini juga akan digambarkan peta 4 partai politik berikut aliran pemikiran yang mempengaruhinya. Setidaknya dalam konstelasi empat partai politik tersebut terdapat pertemuan dua aliran filosofi, yaitu filosofi pemikiran barat dengan pemikiran timur. Dari pemikiran barat, pemikiran sosialisme dan komunisme menjadi pemikiran yang cukup dominan waktu itu. Sementara itu, pemikiran timur yang diwakili oleh tradisionalisme Jawa dan islam juga mewarnai ideologi partai politik yang ada. Dari berbagai berbagai ragam pemikiran tersebut maka dapat digambarkan dengan:

Bagan VII

Pola Hubungan Ideologi 4 Partai Politik Berpengaruh di Indonesia tahun 1960-an

(Herbert Feith, 2001)

Pada saat itu juga, sentimen anti PKI mulai muncul dengan pendirian front anti PKI yang dipelopori oleh pembesar-pembesar agama, tentara dan sebagian tokoh PNI³⁷ (Caldwell, 1971:100). Pemilihan umum 1955 justru tidak memperbaiki kondisi tapi justru di satu pihak malah memparah keadaan³⁸. Ketidakmampuan konstituante –hasil Pemilu 1955- mengakomodasi berbagai kepentingan politik yang hendak dirumuskan dalam formulasi konstitusi Indonesia yang baru mengakibatkan ketidakstabilan negara.

Paruh kedua tahun 1950-an memperlihatkan hubungan yang dekat antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia. Karakteristik PNI yang menjadi pokok awal politik Soekarno tidak dapat diandalkan lagi karena perilaku korup para politikusnya. Soekarno dekat dengan Partai Komunis Indonesia lantaran bentuk partai yang cukup efektif menggalang massa yang bisa menjadi pokok andalan sistem politik karismatik Soekarno. Kedekatan Soekarno dengan PKI juga disinyalir merupakan usaha Soekarno untuk menyeimbangkan faktor-faktor perkembangan Angkatan Bersenjata yang mulai menguat. Relasi simbiosis mutualistis antara Soekarno dengan PKI tentu saja merupakan relasi yang tak terelakkan dalam perspektif politik keseimbangan

³⁷ Diperkirakan PKI mampu mendongkrak perolehan suara di Jawa kalau Pemilu diadakan lagi tahun 1959. PKI memperoleh 27,4% di Jawa, berarti akan naik menjadi 37,4% (Hindley, 1964:222-223)

³⁸ Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi kecenderungan sistem politik berubah menjadi sistem politik yang otoriter. Satu, Soekarno kecewa atas eksperimentasi politik liberal. Kedua, ABRI telah begitu muak dengan para politisi yang korup dan salah urus dan ABRI menginginkan peran sosial politik yang lebih besar. Ketiga, pemberontakan Sumatera dan Sulawesi juga memicu ketidakpuasan sejumlah daerah (Herbert Feith, 1970)

yang diterapkan oleh Soekarno. Soekarno sendiri memerlukan dukungan massa dari PKI dalam perspektif memelihara dan mempertahankan kekuasaan. Soekarno berpendapat bahwa dirinya lebih nyaman berelasi dengan partai politik dibandingkan kalau dia bergantung kepada Angkatan Bersenjata. Tidak mengherankan apabila Soekarno memberikan peluang yang begitu besar pada jajaran partai politik, termasuk di dalamnya kepada PKI. Tapi yang patut harus diperhatikan adalah bahwa fenomena di atas harus tidak diartikan sebagai bahwa Soekarno adalah pro komunis. Tetapi yang lebih tepat adalah bahwa kedekatan Soekarno dengan PKI lebih didasarkan pada anggapan bahwa dia bergantung pada PKI dalam mempertahankan posisi politik sipilnya menghadapi militer Indonesia³⁹.

Pada Maret 1957, Soekarno mengumumkan undang-undang keadaan perang⁴⁰. Dalam hal ini, Indonesia sedang mengalami krisis politik. Dalam situasi krisis semacam itu, militer membentuk legitimasi yang tidak menggantungkan diri pada presiden. Pada tahun itu juga, Soekarno membentuk “kabinet bisnis” (*Zakenkabinet* = kabinet Juanda) yang terdiri dari tokoh

³⁹ Setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi Soekarno memberikan simpati kepada PKI. Pertama, berdasarkan Pemilu 1957, PKI merupakan partai politik terbesar di Jawa. Kedua, PKI mempunyai kelengkapan organisasi yang luas dan cermat di kalangan kelas bawah Indonesia. Ketiga, PKI mampu mengerahkan massa setiap kali Soekarno berpidato di depan umum (Herbert Feith, 2001).

⁴⁰ Soekarno menghapus dan membatalkan undang-undang darurat perang (SOB) pada tahun 1963. Tapi kenyataan ini tidak serta membawa pengaruh signifikan peran ABRI yang sudah masuk pada sektor ekonomi politik Indonesia waktu itu.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan tokoh non partisan⁴¹. Dengan resmi, Angkatan Bersenjata dan golongan kekaryaan mulai masuk dalam panggung politik resmi Indonesia. Pada saat ABRI masuk dalam panggung politik, pada saat itu pula tentara juga masuk dalam sistem perekonomian dan membangun struktur ekonomi dengan mengambil alih secara sepihak perusahaan Belanda dengan dalih kampanye perebutan Irian Barat. Justru dalam iklim keadaan darurat perang, ABRI mulai berbisnis dan menguasai sektor-sektor perkebunan nasional.

Ketidakmampuan konstituante hasil pemilihan umum tahun 1955 untuk membentuk konstitusi baru dan keadaan yang relatif tidak stabil di daerah memaksa Soekarno untuk mulai memberlakukan demokrasi terpimpin⁴². Gambaran atas partai politik dan demokrasi liberal sudah sedemikian buruk. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa keadaan tidak stabil ini dibuat untuk semakin memperkokoh posisi Angkatan Bersenjata dalam panggung politik Indonesia (Ulf Sundhaussen, 1988:210-219).

Posisi ABRI semakin dilegitimaskan apabila UUD 1945 diberlakukan lagi. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang dan kekuasaan politik

⁴¹ Pimpinan Angkatan Bersenjata khususnya Angkatan Darat mengambil alih gagasan pembentukan sejumlah badan kerja kekaryaan, misalnya Badan Kerja Sama Pemuda Militer, Badan Kerja Sama buruh Militer. Dengan demikian, organisasi massa yang biasanya bernaung pada partai politik, sekarang bersama-sama berada di bawah naungan tentara.

⁴² Periode tahun 1956 sampai tahun 1958 ditandai dengan usaha kudeta di daerah Jawa Barat, Sumatera dan Sulawesi. Kebanyakan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin militer daerah. Ini menandakan bahwa telah terjadi krisis kepemimpinan yang paling parah dalam Angkatan Darat.

yang besar kepada Presiden. Tindakan pembubaran konstituante tahun 1959 lebih diartikan sebagai pematian demokrasi liberal. Fase pembubaran konstituante menandai pembentukan demokrasi terpimpin yang relatif otoriter (Daniel Lev, 1966 dan Saskia, 1999).

Dalam era demokrasi terpimpin terdapat tiga pelaku penting di dalamnya. Tiga pelaku penting itu adalah Presiden Soekarno sendiri, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Massa mengambang Islam tradisional dan modernis praktis tidak berdaya, dan nanti menjadi daya pengipas destruksi massal waktu epilog peristiwa G 30 S. PNI sendiri menjadi amburadul dan massa abangan yang berkembang di Jawa justru direbut oleh Partai Komunis Indonesia yang mencoba berkolaborasi dengan kaum nasionalis Indonesia (Harold Crouch, 1999:44-75).

Kekuatan militer Indonesia sendiri memainkan peranan tersendiri bahkan menjadi pemain yang mempunyai kekuatan birokrasi politik yang dominan. Dalam berbagai kesempatan, kepentingan ABRI sering bertentangan dengan kebijakan politik pemerintahan sipil waktu itu. Kebijakan politik ekonomi pemerintahan sipil selalu mempunyai kecenderungan untuk membentuk korporasi golongan pengusaha pribumi. Militer Indonesia melihat bahwa korporasi politik ekonomi Indonesia harus memprioritaskan sumber rejeki bagi tentara dan serdadu-serdadunya dan hal ini memerlukan dan

mengutamakan reinvestasi, pemeliharaan modal dan sistem pembukuan yang teratur (Robinson, 1986:95).

Maka dapat dipahami bahwa orientasi politik ekonomi militer adalah orientasi politik ekonomi yang berkesinambungan dan bersifat akumulatif kapitalistis. Hal ini juga menjadi alasan logis mengapa usaha Soekarno untuk menghabisi kekuatan modal asing dan menggantinya dengan korporatisme negara selalu mengalami kegagalan. Dalam kepemimpinan demokrasi terpimpin, praksis ekonomi yang terlalu menekankan perekonomian sentralistik negara sangat dibenci oleh kalangan kelas menengah urban, borjuasi nasional dan pemilik tanah desa. Itulah sebabnya juga kelompok ini juga menjadi kelompok pendukung rejim Soeharto dalam usaha mendongkel kekuasaan Soekarno. Dalam konstelasi diskursus militer pada waktu itu, Angkatan Bersenjata harus memperoleh suara yang lebih besar dalam bidang ekonomi. Militer yang kuat terjadi ketika bersinergi dengan kekuatan ekonomi nasional.

Dalam perkembangan selanjutnya –tidak mengherankan-, militer terutama dalam pemerintahan Orde Baru sangat menekankan stabilitas politik dan sosial untuk mendukung pembangunan ekonomi. Konsolidasi politik, sosial-ekonomi dan pertahanan merupakan keharusan sejarah yang harus terjadi. Maka konsekuensi logisnya adalah bahwa militer harus menekan sesedikit mungkin faktor-faktor resistensi yang mungkin menjadi “kerikil” dalam

pembentukan imperium sosial-politik dan ekonomi di Indonesia (Sundhaussen, 1988:220-250).

Faktor eksperimentasi dan persaingan pengaruh antara Soekarno, Partai Komunis Indonesia, Militer dan kepentingan negara-negara kapitalis di Indonesia menjadi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dalam pembentukan diskursus politik kontemporer Indonesia waktu itu. Faktor destabilisasi sosial dan ekonomi lebih merupakan eksekusi panjang dari proses eksperimentasi politik ekonomi pasca pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi dinamika hubungan sipil militer yang berkembang saat itu.

Ketegangan dan proses tarik menarik pelaku penting perpolitikan Indonesia menghasilkan proses akumulasi legitimasi dan proses delegitimasi ideologi yang ditawarkan oleh masing-masing pemeran politik tersebut. Dinamika pra klimaks sudah dimulai semenjak pemberlakuan demokrasi liberal dalam sistem politik Indonesia. Iklim persaingan justru memuncak dengan timbulnya peristiwa G 30 S, pemberian Surat Perintah Sebelas Maret, Pemberhentian Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan konsolidasi internal Orde Baru pada tahap awal pemerintahannya.

4.5. Peristiwa “G 30-S”: Diskursus Yang Kabur

Setidaknya ada alasan yang cukup memadai untuk menjelaskan bahwa peristiwa G 30-S merupakan diskursus yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Alasan utamanya adalah bahwa perubahan politik dari Orde Lama yang ditandai dengan praktek demokrasi terpimpin Soekarno menuju Orde Baru yang ditandai dengan praktek korporatisme kapitalistis yang dipelopori oleh Soeharto bermula dengan peristiwa disebut kejadian G 30-S. Periode kritis Indonesia ini telah banyak diteliti oleh beberapa ahli⁴³. Meskipun ada banyak ahli yang bersepakat tentang apa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, tapi kebanyakan mereka belum bersepakat mengenai siapa “otak” atau siapa yang ada dibalik kejadian “kup” tersebut.

Setidaknya ada beberapa alasan yang menyusul untuk memahami diskursus peristiwa G 30-S dalam konteks pembentukan opini publik di Indonesia. Pertama, peristiwa tersebut menjadi picu kekerasan fisik dan psikologis bagi para simpatisan PKI yang dilakukan oleh para sesamanya. Kampanye penggalangan opini publik mengenai peristiwa itu sendiri begitu gencar sehingga opini publik terbentuk dengan sangat massif. Tentu saja kampanye ini juga menghasilkan akibat yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia.

Kedua, pola pembentukan opini publik sendiri sengaja untuk secara represif mendelegitimasi kelompok tertentu. Pola pembentukan ini justru

⁴³ Lih. Anderson and McVey, 1971; Cribbs, 1990; Crouch, 1978; McVey, 1971; May, 1969; Mortimer, 1969 dan 1974, Pauker, 1969, Tornquist, 1974; Werthem, 1979;

terbukti efektif mengingat epilog G 30-S berhasil untuk “membungkam” saksi-saksi kunci pada peristiwa tersebut. Pada akhirnya, juga tidak menutup pada kenyataan bahwa malahan peristiwa tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.

Ketiga, peristiwa G 30-S menjadi batu pijak konsolidasi internal militer untuk menyingkirkan PKI untuk selamanya dari panggung politik Indonesia sekaligus tujuan untuk mengganti rejim Soekarno juga tercapai dengan sendirinya.

Meski ada tiga alasan yang menjadi dasar mengapa peristiwa G 30-S diikutkan sebagai diskursus makro, tetap saja peristiwa G 30-S merupakan hal yang masih harus dikaji secara mendalam. Masalahnya bukan hanya terletak pada kepastian tentang apa yang terjadi tapi juga siapa yang menjadi otak atau *auctor intellectualis* dan alasan mengapa terjadi gerakan tersebut. Ini berarti peristiwa tersebut tidak dilihat secara data faktual saja tapi juga harus dilihat dari interpretasi yang ada.

Dalam diskursus makro ini, masalah G 30-S bukan masalah yang sudah menjadi konsensus sosial. Setidaknya ada lima versi tentang peristiwa G 30-S itu sendiri. Pertama adalah versi yang menyatakan bahwa PKI adalah dalang peristiwa tersebut. Versi ini menyatakan bahwa PKI adalah satu-satunya pihak yang harus dinilai salah secara politik-sosial, psikologis dan moral. Runutan versi ini mengacu pada percobaan kup PKI pada tahun 1948. Struktur bangun PKI telah mampu berpenetrasi jauh di kalangan militer. Bukti-bukti hukum

didapatkan dari versi ini, termasuk di dalamnya masalah “biro khusus” yang berhubungan dengan ketua CC PKI D.N Aidit (Atmadji Sumarkidjo, 2000:109-180). Versi ini dalam perkembangannya dilihat sebagai versi resmi sejarah Indonesia. Di sana-sini, versi ini berkesan dibuat untuk memojokkan PKI meskipun ada pengakuan juga dari Sudisman, satu-satunya tokoh PKI yang diadili di muka Mahkamah Militer Luar Biasa. Dalam pernyataannya Sudisman mengatakan sebagai berikut:

“...Saya tidak bermaksud menyangkal bahwa beberapa pemimpin PKI terlibat dalam Gerakan 30 September. Sama sekali buka itu maksud saya. Seperti yang saya jelaskan, ada beberapa tokoh penting PKI, termasuk saya sendiri, terlibat dalam gerakan 30 September (Hermawan Sulistiyo, 2000).

Penyebab kegagalan peristiwa G 30-S menurut versi tentara ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting, yaitu faktor kesalahan analisis ketegangan tentara – PKI, faktor kurangnya pengetahuan strategi dan taktik kemiliteran yang memadai dari pemimpin PKI, faktor perhitungan PKI yang salah menilai tentang posisi keteguhan Angkatan Darat (AD) dalam menyudutkan Presiden Soekarno ke posisi bertahan, tidak adanya antisipasi apabila aktivitas ini mengalami kegagalan.

Versi dari militer ini juga menjadi dasar pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media massa waktu itu. Laporan demi laporan mulai dari soal kebrutalan PKI dan Gerwani sampai pada soal penyelesaian politik G 30-S bermuara juga pada soal dan kesan bahwa Soekarno terlibat dalam gerakan

tersebut. Dokumen yang menjadi pendukung versi ini adalah dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah, baik dari versi Nugroho Notosusanto maupun versi buku putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, versi ini mendapatkan kritik sebagai versi yang terlalu banyak manipulasi⁴⁴.

Versi interpretasi kedua menyatakan bahwa G 30-S merupakan masalah internal Angkatan Darat. Interpretasi pelaku gerakan dalam versi ini lebih didasarkan pada fakta-fakta kunci yang sumir terlihat dalam seluruh proses gerakan. Pertama, pelaku dan objek penculikan merupakan anggota Angkatan Darat Republik Indonesia. Kedua, fakta menunjukkan sesuatu yang tidak logis apabila menyatakan bahwa PKI terlibat dalam gerakan tersebut⁴⁵. Mortimer sendiri dalam hal ini berpendapat bahwa:

“...Tujuan yang tidak pernah disimpangi oleh kepemimpinan Aidit, dan yang untuk itu partai siap menunjukkan banyak kesabaran, keluwesan dan kesediaannya untuk mengkompromikan unsur-unsur penting dari prinsip strategi ortodoks dan komunisPartai memutuskan untuk menempel seperti lintah....agakanya tidak bisa dipahami jika PKI sengaja

⁴⁴ “...jika kup itu adalah komplotan PKI, bagaimana menjelaskan absennya pemimpin PKI lainnya. Nyoto berada di Medan dalam rombongan Subandrio, Lukman dan Sakirman berada di Semarang. Mengapa mereka tidak siap di tempat untuk membantu arah jalannya peristiwa ? Mengapa tidak dibuat rencana pemberontakan massa untuk membantu kup ? Mengapa tidak dilakukan penyebaran kekuatan komunis untuk merebut kekuasaan di daerah? Bagaimana harus diterangkan kejanggalan luar biasa yang dilakukan oleh “Harian Rakyat” yang mendukung kup itu pada penerbitan 2 Oktober, sesudah kup itu secara efektif telah dilumpuhkan? Mengapa kemudian PKI tidak mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan diri, tetapi pasif menunggu nasibnya?.....(Legge, 1985:449-450)

⁴⁵ Dari data-data yang diperoleh dari kesaksian sejumlah perwira Angkatan Darat dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa menunjukkan indikasi bahwa PKI justru tidak terlibat dalam perkara atau peristiwa G 30-S (Harold Crouch, 1999)

memilih menantang Angkatan Darat di pekarangannya sendiri, terutama karena satuan-satuan bersenjata yang mungkin bisa jadi andalan Partai tak terkira kecilnya dibandingkan dengan yang ada di bawah komando Angkatan Darat (Mortimer, 1974).

Hal ini didukung oleh fakta yang menunjukkan bahwa PKI merupakan partai politik yang sedang di atas angin dalam seluruh pusaran politik Indonesia. Tidak mungkin PKI bertaruh untuk ikut dalam petualangan politik yang tidak jelas tersebut. Ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa anggota Angkatan Darat yang terlibat dalam peristiwa tersebut justru lebih banyak dari yang diperkirakan. Penelitian atau dokumen sejarah yang mendukung interpretasi versi kedua ini adalah naskah Cornell (*Cornell Paper*).

Tesis yang dikemukakan oleh naskah Cornell secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, tapi secara politis – naskah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan bahwa naskah Cornell lebih cenderung mendasarkan keterangan dan kesaksian para politikus kiri Indonesia.

Versi ketiga menyatakan bahwa G 30-S merupakan tanggung jawab Presiden Soekarno. Penelitian Anthony Dake menyusun interpretasi bahwa skenario G 30-S disusun secara rapi oleh Soekarno. Hipotesis ini lebih didasarkan bahwa Soekarno hadir di Lanuma Halim Perdanakusuma yang menjadi basis gerakan⁴⁶, kedekatan personal Soekarno dengan beberapa tokoh

⁴⁶ Versi kehadiran Soekarno di Halim juga menimbulkan kontroversi. Dalam versi yang lain, Soekarno

kunci gerakan, perlindungan politik terhadap pemimpin-pemimpin PKI, dan keengganan Soekarno menunjukkan simpati kepada para Jenderal yang menjadi korban gerakan⁴⁷. Anthony Dake dalam bukunya menyatakan bahwa Soekarno mempunyai hubungan saling bersaing dengan Angkatan Darat terutama yang berhubungan dengan gagasan NASAKOM, Angkatan Kelima.

“...Soekarno sendiri yang memprakarsai “kudeta Untung” dengan harapan ia dapat mempertahankan kekuatan kontrolnya, tukang sulap yang mampu menyulap hantu-hantu yang diciptakannya.. Tetapi hal ini menjadi awal kiamatnya, dan di dalam keangkuhan egonya ia terserang kebutaan yang tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri tetapi juga menjerumuskan negaranya ke dalam jurang keruntuhan (Anthony Dake, 1973:384).

Akan tetapi masalahnya versi ketiga ini sangat lemah argumentasi dan pembuktiannya. Anthony Dake lebih menyandarkan versinya pada interpretasi dan keterangan satu saksi yang belum tentu tahu kepastian dan konteks gerakan tersebut⁴⁸. Versi keempat dari interpretasi pelaku G 30-S adalah versi yang menyatakan bahwa gerakan tersebut merupakan kombinasi sinergis operasi intelijen yang dilakukan oleh intelijen Angkatan Darat dibantu oleh intelijen asing, dalam hal ini CIA, intelijen Cina dan MI6. Versi ini kalau mau ditarik ke belakang mempunyai dampak diskursus yang panjang. Hal yang

ada di Halim sebagai rangkaian tindakan prosedural penyelamatan Presiden di kala atau situasi krisis (lihat buku Menyingkap Kabut Halim 1965 yang diterbitkan oleh Angkatan Udara)

⁴⁷ Dia sendiri pada tanggal 5 Oktober 1965, saat pemakaman Pahlawan Revolusi, tidak hadir. Ketidakhadiran ini diartikan oleh musuh-musuh politik Soekarno sebagai bentuk pembelaan politis terhadap Partai Komunis Indonesia.

⁴⁸ Dake mengambil keterangan dari Kol (KKO) Bambang Widjanarko.

harus diketahui bahwa operasi intelijen dalam G 30-S merupakan operasi yang terselubung⁴⁹. Artinya bahwa G 30-S merupakan rancangan gelap yang sudah diperhitungkan secara mendetail berikut dampak politik, sosial dan ekonominya. Inti dari versi ini adalah bahwa Indonesia, Soekarno dan PKI menjadi sasaran operasi intelijen skala global yang menggunakan pelaku-pelaku lokal dalam hal ini kubu Jenderal Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto. Fokus perhatian operasi intelijen ini adalah mendelegitimasi dan mendeskreditkan PKI sebagai kelompok lawan politik. Dalam perspektif versi ke empat ini, G 30-S adalah gerakan yang memang disengaja dibuat, diperalat dan sekaligus digagalkan untuk mendapatkan efek mental-psikologis dan material yang bersifat destruktif kepada para simpatisannya.

Rekayasa media telah memainkan peran terpenting dalam membentuk pendapat umum dan memobilisasi kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan pembunuhan besar-besaran (Harsutedjo, 2003:260-295). Wacana keterlibatan intelijen asing semakin terbuka ketika terjadi penyingkapan beberapa dokumen CIA yang memperlihatkan indikasi bahwa memang CIA

⁴⁹ Telegram Marshall Green kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat:

"4. Following guidelines may supply part of the answer to what our posture to be [A] Avoid overt involvement as power struggle unfolds. [B] Covertly, however, indicate clearly to key people in army such Nasution and Suharto our desire to be assistance where we can, while at same time conveying to the our assumption that we should avoid our appearance of involvement or interference in any way. [C] Maintain and if possible extend our contact with military. [D] Avoid move that might be interpreted as note of non confidence in army (such as precipately moving out our dependents of cutting staff). [E] Spread the story of PKI's guild, treachery and brutality (this priority is perhaps most needed immediate assistance we can give army if we can find to do it without identifying is as solely or largely US effort) (CIA: 2001:307-308).

mempunyai kepentingan dalam proses perubahan politik di Indonesia tahun 1960-an.

Pada tahun 1976, beberapa kopy salinan laporan CIA dapat dibuka (*declassified files*). Ada kesimpulan penting dari laporan CIA tersebut. CIA menangkap sinyal bahwa kudeta di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh oknum PKI saja tapi ada pihak-pihak selain kaum komunis yang terlibat dalam komplotan untuk menyingkirkan pemimpin atau perwira tinggi dalam Angkatan Darat.

Versi kelima menyatakan bahwa Jenderal Soeharto merupakan aktor di belakang G 30-S. Keterkaitan Soeharto dalam hal ini bisa merupakan konsekuensi logis operasi intelijen yang dilakukan di Indonesia. Ada beberapa pertimbangan mengapa Soeharto dicurigai sebagai otak di belakang peristiwa G 30-S. Pertama, Soeharto sebagai orang kedua setelah Menpangad Ahmad Yani tidak dimasukkan sebagai perwira tinggi Angkatan Darat yang dijadikan sebagai target operasi. Kedua, tidak bisa menutup kenyataan bahwa Soeharto sangat dekat dengan para perwira yang terlibat dalam G 30-S (Wertheim, 1970:95-112). Secara struktural organisasi, Brigadir Jenderal Supardjo, Kolonel Latief dan Letnan Kolonel Untung pernah menjadi bawahan Soeharto yang pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Tapi masalahnya, anggapan kedekatan ini belum menjadi bukti yang cukup memadai bahwa Soeharto bersekutu atau setidaknya berkomplot dengan komplotan G 30-

S. Ada beberapa mata rantai yang kabur dalam proses kedekatan dan pemberian informasi mengenai rencana kudeta yang mau dilancarkan.

Proses “netralitas” strategis yang dilakukan oleh Soeharto terhadap proses kudeta telah membawa pengaruh yang tidak sedikit pada Mayor Jenderal Soeharto. Proses ini membawa dampak taktis, di mana Soeharto bisa menyingkirkan kubu Yani tanpa harus menyiratkan darah pada tangannya sendiri, di lain pihak Soeharto juga sedikit demi sedikit melakukan kudeta diam-diam atas Soekarno dan pembungkaman PKI sebagai lawan politik potensial (Saskia, 2000:470-550). Versi ini sebetulnya terjadi karena ketidakkonsistenan Soeharto dalam menjelaskan hubungannya dengan Kolonel Latief.

Lima interpretasi mengenai pelaku dalam peristiwa G 30-S memperlihatkan ketidaksepakatan beberapa ahli Indonesia yang meneliti peristiwa tersebut. Hal ini menandakan bahwa peristiwa tersebut merupakan diskursus yang masih kabur, bahkan sampai sekarang. Meskipun kabur dan terkesan menjadi sejarah yang sengaja disembunyikan maka terlihat bahwa peristiwa ini sesungguhnya menjadi latar sosial politik yang patut diperhitungkan.

Selain perbedaan interpretasi mengenai peristiwa G 30-S, ada beberapa hal yang juga perlu dimasukkan sebagai latar historis wacana opini publik media massa Indonesia. Hal itu adalah masalah pembantaian massal yang

menjadi rangkaian penumpasan gerakan dan simpatisan komunis di Indonesia⁵⁰. Tahun 1965 sampai 1966 merupakan tahun-tahun yang sengaja dilupakan oleh kenangan sejarah orang Indonesia tentang apa yang terjadi dengan kekejaman yang luar biasa, pembasmian dan pembantaian sistematis. Tapi wacana pembantaian massal tahun 1965-1966 tidak pernah menjadi wacana yang mempunyai kekuatan ilmiah yang tinggi. Setidaknya adalah tiga masalah yang ditemukan kalau ingin meneliti masalah pembantaian massal segera setelah terjadinya peristiwa G 30-S. Masalah-masalah itu adalah masalah informasi, filosofi dan interpretasi.

Masalah informasi terjadi karena kurangnya wartawan dan akademisi ilmiah yang ada di Indonesia waktu itu. Walaupun ada wartawan dan akademisi maka mereka ikut larut dalam histeria dan teror massa yang diciptakan oleh pihak Angkatan Darat. Perjalanan liputan langsung ke tempat kejadian perkara merupakan hal yang sulit dan berbahaya. Kurangnya liputan ini mengakibatkan bahwa pengetahuan tentang pembantaian itu sendiri sangat terbatas. Liputan pers asing atau dan pers dalam negeri sangat terbatas. Keterbatasan ini mengikuti situasi krisis sosial yang dialami oleh masyarakat.

Masalah filosofis yang menyertai pembantaian massal ini, menurut Robert Cribb, adalah bahwa pembantaian massal simpatisan PKI tidak bisa

⁵⁰ Dalam Harian Berita Yudha, terdapat kolom mengikuti operasi RPKAD yang banyak bercerita tentang upaya dan pola penumpasan pengikut G 30-S yang dilakukan oleh pasukan elite Angkatan Darat.

disamakan atau dibandingkan dengan drama horor “holocaust” waktu Hitler berkuasa atau pembantaian sistematis yang dilakukan oleh Khmer Merah di Kamboja⁵¹ (Cribb, 2003:25-30). Pembantaian massa di Indonesia tahun 1965-1966 tidak menggunakan teknik-teknik kamp konsentrasi, percobaan medis yang menakutkan atau penggunaan teknologi dalam pemusnahan manusia.

Pembantaian dilakukan dengan senjata-senjata tradisional dan penghapusan jejak pembunuhan dilakukan dengan membuang mayat di kali atau “luweng” (semacam lubang dalam yang di dalamnya ada aliran sungai deras) atau kuburan massal yang tidak direncanakan dan hanya beberapa kilometer dari rumah korban. Dalam konteks pembantaian di Indonesia, motivasi ideologi memang ada menyertai tindakan kekerasan tapi hal tersebut disertai dan paralel dengan ketakutan, aksi balas dendam, petualangan. Perasaan membunuh muncul dan dipicu oleh adanya minat pribadi dan mekanisme pertahanan diri (Hermawan, 2000; Cribb, 2003)

Masalah interpretasi dalam studi pembantaian PKI tahun 1965-1966 menunjukkan kelemahan dalam proses historiografi di Indonesia (Cribb, 2003). Terdapat kesenjangan dimensi sejarah pada tingkat nasional dengan dimensi sejarah pada tingkat daerah.

⁵¹ Untuk kasus Indonesia, tidak jelas berapa angka pasti korban pembantaian massal yang terjadi. Dalam suatu penelitian besar dan rumit, Michael Vickery berani mengumumkan bahwa jumlah korban meninggal di luar kewajaran selama masa kekuasaan Khmer Merah mungkin lebih dari 740.000 orang Kamboja. Populasi Kamboja tahun 1975 berjumlah 7,1 juta jiwa. Dari 740 ribu itu, setengahnya dieksekusi oleh rejim, sisanya mati karena penyakit dan kelaparan.

Tragedi pembantaian tersebut telah dipercepat oleh munculnya peristiwa nasional, usaha kudeta di Jakarta melibatkan aktor-aktor nasional – Tentara, PKI, Organisasi Islam - namun sedikitnya informasi yang kita miliki menunjukkan bahwa banyak faktor loka pada masing-masing wilayah menentukan skala dan lingkup setiap akibat dari peristiwa pembantaian (Cribb, 2003:38-39)

Tiga masalah di atas mengakibatkan banyaknya ragam interpretasi dan laporan mengenai pembantaian dan jumlah korban yang jatuh. Beberapa interpretasi akan ditayangkan sebagai perbandingan dan kesimpangsiuran para ahli menghitung jumlah korban pasti dalam peristiwa pembantaian pasca G 30-S.

Bagan VIII

Bagan yang menunjukkan perkiraan jumlah korban pembantaian pasca G 30-S

Sumber Nasional	Perkiraan jumlah korban
Anderson dan McVey ⁵² (hal. 63)	200.000
Brackman (angka yang masuk akal, hal. 125)	150.000
Brackman (hal. 114)	70.000
Caldwell dan Utrech (dalam Cribb)	500.000
Contenay (dalam Cribb)	100.000 – 200.000
Dahm (dalam Cribb)	200.000
The Economist (dalam Cribb)	500.000
Politbiro PKI yang dikelompokkan kembali (dikutip dalam Brackman)	200.000
Robinson (mengutip Cribb)	500.000 – 1.000.000
Laksmna Sudomo, pangkopkamtib (dalam Cribb) ⁵³	450.00 – 500.000

⁵² Jumlah korban ini merupakan analisis awal gerakan 1 Oktober 1965 yang diteliti oleh Ben Anderson dan Ruth T. McVey

⁵³ Jumlah yang dikemukakan oleh Sudomo adalah versi ketiga dari jumlah resmi korban pembantaian yang dikeluarkan pada bulan Juli 1976. Namun yang menjadikan keterangan ini janggal adalah tidak adanya bukti yang mengikuti jumlah dikeluarkan.

<i>Soekarno (dalam Cribb)</i>	87.000
<i>Tornquist</i>	100.000 – 1.000.000
<i>Kedutaan Amerika (Green)</i>	300.000 atau kurang
<i>Vitachi (dalam Cribb)</i>	300.000 – 500.000
<i>The Washington Post (dalam Cribb)</i>	500.000
<i>Wertheim (dalam Cribb)</i>	400.000
<i>Komisi Pencari Fakta resmi yang dibentuk oleh Pemerintah⁵⁴</i>	78.000
<i>Kopkamtib⁵⁵</i>	1.000.000

(Cribb, 2003:23-24)

Fakta-fakta di atas memperlihatkan kerumitan dalam menentukan kepastian dalam seluruh proses pembantaian simpatisan PKI waktu itu. Ada beberapa alasan lain yang bisa disebutkan menambah kekaburan jumlah korban pembantaian. Pertama, tidak ada data statistik sensus yang bisa dipakai untuk membandingkan komparasi penduduk sebelum dan sesudah pembantaian.

Kedua, tidak adanya data perpindahan atau data mobilitas penduduk. Akhirnya minimnya data tersebut menyulitkan studi dalam menentukan jumlah korban yang mendekati kenyataan.

Dari dua alasan itu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa data jumlah korban bisa sangat kurang atau justru dibesar-besarkan, tergantung

⁵⁴ Komisi ini menyimpulkan 78.000 sampai bulan Desember 1965. Keterangan ini meragukan karena proses pembunuhan tetap berjalan sampai kurang lebih satu tahun sesudahnya.

⁵⁵ Sumber dari Komando Keamanan dan Ketertiban ini tidak pernah diverifikasi. Alasan lain untuk meragukan otentisitas laporan ini adalah karena pengumuman pertama Kopkamtib hanya menyebut jumlah 78.000 orang korban.

afiliasi dan kepentingan politik yang menyertai orang yang memberikan keterangan atau kesaksian tersebut.

Meskipun terdapat keragaman mengenai jumlah korban, konflik dan pembantaian berdarah sebetulnya dimulai dari Jakarta dan pada akhirnya mempunyai dampak menular ke seluruh penjuru daerah. Jawa Tengah merupakan propinsi pertama yang merasakan aksi tentara membersihkan unsur-unsur PKI dari Indonesia. Jawa Tengah menjadi target operasi RPKAD karena indikasi kaburnya Aidit ke Solo, di samping bahwa Jawa Tengah merupakan propinsi yang menjadi basis massa terbesar PKI. Hal ini disebutkan oleh laporan CIA tanggal 26 November 1965, case #88-119, doc 119, butir 1:

Selama enam minggu Angkatan Darat Indonesia telah menangani kampanye besar mengganyang Partai Komunis Indonesia. Para anggota Partai dan simpatisannya sedang ditangkap dan ditahan oleh militer; yang lain kini dibersihkan dari posisi pemerintahan daerah; dan di Jawa Tengah para pengikut PKI dilaporkan ditembak langsung oleh Angkatan Darat. Angkatan Darat telah mempertaruhkan citra dan masa depan politiknya untuk kampanye ini. Ia ingin melarang PKI dan menghancurkan partai tersebut secara permanen, tetapi sikapnya terhadap Marxisme jauh lebih rumit dari sekedar anti Komunisme (CIA, 2003:393-397).

Operasi militer di Jawa Tengah jelas berbeda dengan tempat-tempat lain, terutama pada daerah-daerah yang ketegangan sosial politiknya sudah meningkat drastis. Sampai sekarang, kontroversi jumlah korban dan otak yang harus bertanggungjawab atas pembantaian tersebut masih kabur. Analisis Sudisman mengenai tokoh yang harus bertanggung jawab dituangkan dalam pembelaannya di depan pengadilan Mahkamah Militer Luar Biasa:

“...Perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Jenderal Nasution yang dapat ditafsirkan secara luas, yang kurang lebih memerintahkan untuk membasmi kaum komunis hingga ke akar-akarnya, dan harus diambil tindakan terhadap siapa pun yang dicurigai terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan 30 September. Berdasarkan perintah-perintah inilah pembunuhan massal dilakukan. Apakah pengadilan sependapat dengan saya, bahwa Jenderal Nasution harus bertanggung jawab atas pembunuhan massal ini?” (Hermawan Sulisty, 2000:42).

Tapi lepas dari pertanyaan siapa yang harus paling bertanggung jawab atas pembantaian massal tersebut, ada beberapa hal yang patut diperhatikan mengapa pembantaian massal atas massa PKI bisa berkembang atau justru semakin memburuk. Pertama adalah mobilisasi yang dilakukan oleh PKI beberapa tahun sebelum G 30-S terjadi⁵⁶. Sebuah konsensus yang dihembuskan oleh aparat keamanan pada waktu itu adalah bahwa sudah logis anggota PKI harus menderita dan terkena “karma balas dendam” yang dilakukan oleh para musuh politiknya.

Rasionalisasi yang umum digunakan adalah kesalahan mobilisasi dan provokasi PKI merupakan penyebab wajar berkembangnya kekerasan yang dialami oleh para anggota PKI. Partai Komunis Indonesia dalam sebuah program kerja strategisnya menyatakan bahwa struktur masyarakat Indonesia harus berubah (Hermawan Sulisty, 2000:236-237). Ini berarti terjadi

⁵⁶ Terutama pada tahun 1964, PKI sangat rajin memobilisasi massa dan cenderung mengarah pada kekerasan terutama dalam isu land reform atau redistribusi tanah pertanian. Sementara ahli menyatakan bahwa kekerasan yang menyertai aktivitas land reform merupakan pengantar langsung terjadinya pembantaian massal tersebut.

pengkutuban antara “mereka dan kita” dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini juga berarti pembantaian massal berada dalam perspektif pandangan ini.

Kedua, konflik agama dan kepercayaan tradisional merupakan argumentasi yang populer dalam menjelaskan sebab-musabab pembantaian massal tersebut. Tindakan kekerasan pemuda-pemuda Muslim yang terafiliasi pada GP Anshor waktu itu mau tidak mau dilihat dalam konsep perang suci dalam Islam. Tapi masalahnya adalah terlalu dangkal apabila mencampuradukkan masalah agama ke dalam masalah politik sosial kemasyarakatan. Apalagi kalau konteks pembantaian berada di dalam konteks pembantaian massa PKI di Bali.

Ketiga, pembantaian massal ini terkait dengan masalah konflik kelas yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Pola pertama dalam pola pemberangusan PKI secara nasional sangat bersifat vertikal, tapi dalam perkembangan selanjutnya konflik tersebut semakin berubah menjadi pola yang bersifat horizontal. Karakter dan konflik kelas sangat kental mempengaruhi aksi-aksi sepihak sebelum G 30-S. Tapi masalahnya adalah isu konflik kelas semakin tidak jelas ketika beranjak setelah tahun 1965. Bentuk solidaritas massa justru menjadi bentuk yang menjadi pola yang penting dalam penggalangan aksi balas dendam.

Keempat adalah lemahnya integrasi nasional. Robert Cribb menyatakan bahwa kegagalan politik nasional menyediakan lembaga yang mampu berfungsi

memenuhi janji kemerdekaan telah melemparkan masyarakat Indonesia ke masa lalu, yaitu kesetiaan polarisasi sosial masyarakat dalam kubu Islam dan Komunisme. Ketegangan dan situasi krisis dalam masyarakat Indonesia juga bisa menjustifikasi terjadinya pembantaian massal.

Kelima adalah balas dendam Angkatan Darat dan Pembasmian yang disponsori oleh negara (Hermawan Sulisty, 1999:243-245). Alasan kelima ini didukung dengan pendapat bahwa pembantaian massal ini diatur oleh Angkatan Darat. Alasan ini semakin mendapatkan legitimasinya ketika generasi muda waktu itu mendukung aksi perlawanan dan pembantaian yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Mereka melihat bahwa Angkatan Darat telah bertindak secara heroik. Angkatan Darat menjadi penyelamat kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia. Pembersihan Angkatan Darat tidak hanya dilakukan di dalam institusi itu sendiri, tapi juga pembersihan PKI dari struktur masyarakat Indonesia.

Terdapat kesan bahwa kematian para Jenderal tersebut menjadi alat efektif legitimasi sosial aksi balas dendam, yang disebarkan dari pusat sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Hanya memang peran Angkatan Darat pada beberapa daerah konflik berkesan “netral” karena kekuatan massa anti komunis sudah terlebih dahulu bergerak. Setidaknya memang ada tiga pola yang dikembangkan oleh Angkatan Darat dalam hal ini, yaitu tentara aktif beroperasi, tentara menyediakan instruktur-instruktur yang melatih “milisi-

milisi” lokal⁵⁷, atau tentara pasif menyediakan arena pertarungan antara pihak komunis dengan pihak anti komunis. Dari tiga pola ini sudah ditarik konsekuensi bahwa Angkatan Darat tidak bisa dianggap sebagai pelaku tunggal pembantaian PKI tahun 1965-1966.

Keenam adalah fungsi pers Orde Baru yang menyusun dan menggalang opini publik sedemikian rupa citra PKI berikut beberapa organisasi massanya begitu buruk dan pantas untuk dibasmi sampai ke akar-akarnya. Salah satu penelitian yang bisa dirujuk dalam alasan keenam ini adalah penelitian yang dilakukan Saskia Wieringa yang mengupas habis pemberangusan PKI dan Gerwani melalui usaha-usaha pers dan literatur yang dipaksakan dibaca kepada kalangan masyarakat.

Yang jelas dalam diskursus yang kabur ini, terlihat bahwa versi-versi dan studi tentang pembantaian massal pasca G 30-S meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas dan meyakinkan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pasti tidaknya keterlibatan PKI sebagai sebuah institusi dalam peristiwa tersebut, peranan Jenderal Soeharto dan jaringan operasi intelijennya, posisi dan peran Aidit serta Biro Khusus PKI yang banyak dilihat sebagai otak serta penyebaran – perluasan tindakan pembantaian massal⁵⁸.

⁵⁷ Milisi-milisi lokal memang dibentuk oleh pasukan pemukul dari Jakarta. Manfaat mereka adalah bahwa tentara tidak perlu masuk untuk mengadakan operasi militer besar-besaran. Tentara hanya menyediakan peralatan, data intelijen dan “ijin untuk membunuh” pada setiap unsur milisi lokal yang kebanyakan merupakan anggota ormas Islam dan Nasionalis anti komunis.

⁵⁸ Pembunuhan massal paling besar terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Untuk pembantaian

4.6. Pengambilalihan Kekuasaan Dan Delegitimasi Orde Lama

Dari seluruh proses diskursus di atas, dapat terlihat secara jelas bahwa muara wacana berpangkal dalam soal delegitimasi sistem lama yang dikembangkan oleh Soekarno sekaligus melegitimasi sistem baru yang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata Indonesia waktu itu.

Ada beberapa wacana yang perlu diperhatikan sebagai latar sejarah pembentukan pendapat masyarakat yang berkembang waktu itu. Pertama adalah bahwa proses pembubaran dan pembungkaman PKI merupakan proses yang memperlihatkan bahwa Angkatan Darat ternyata bergerak lebih cepat dibandingkan PKI sendiri. Hal ini saja sudah mempunyai efek yang luar biasa. Efek yang jelas dari pembungkaman dan pembubaran PKI adalah penyingkiran PKI dari panggung politik dan penggembosan ajaran NASAKOM yang diidealisasikan oleh Soekarno. Penggembosan ajaran NASAKOM memperlihatkan bahwa ajaran tersebut memang tidak tepat dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Ini berarti pelecehan dan delegitimasi prinsip politik yang mau dikembangkan Soekarno⁵⁹. Proses delegitimasi ini lebih terlihat

di Bali lihat literatur Harold Crouch 1978:152

⁵⁹ Soekarno melihat gejala tersebut menyusul beberapa pembangkangan diam-diam yang dilakukan oleh pihak Angkatan Darat. Hal ini terlihat dari pidato Soekarno di hadapan tujuh partai politik yang menghadap Soekarno tanggal 27 November 1965,

“...Sebab, saya di depan Panca Tunggal seluruh Indonesia juga sudah berkata dengan tegas, kadang-kadang saya ini mendapat indruks, kesan, ya orang berkata, Bung Karno, Bung Karno, setiap kepada bung Karno, berdiri di belakang Bung Karno! Tetapi perintah Bung Karno,

ketika Soekarno tidak lagi mampu menahan proses erosi kepemimpinan, sejauh dia tidak mau membagi “kue kekuasaan” pada sentra-sentra kekuasaan yang dipimpin oleh Angkatan Darat⁶⁰.

Kalau mau dilihat secara lebih mendetail kejadian yang menyertai dan menyusul peristiwa G 30-S, maka fakta menunjukkan ada banyak hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pemahaman wacana G 30-S secara menyeluruh. Banyak bukti alternatif dan wacana baru dalam perkembangan penelitian wacana G 30-S yang mengantar latar historis ini dilihat sebagai dua peristiwa kudeta politik. Peristiwa Oktober 1965 dini hari merupakan *putsch* intern Angkatan Darat yang didukung oleh Ketua CC PKI Aidit, baik dengan kapasitasnya sebagai ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia maupun kapasitasnya sebagai seorang individu yang progresif revolusioner, beberapa teman dekat Aidit. *Putsch* ini memang dirancang untuk gagal atau setidaknya prematur secara politik sedemikian rupa sehingga gerakan ini bisa ditumpas secara cepat dan menjadi alasan penghabisan unsur-unsur komunis di Indonesia.

komando Bung Karno di-kentuti, kataku!.....Jalankan komando saya! Bantulah saya, jangan jegal kepada saya. Semua komando saya, jalankan! (Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara “Revolusi Belum Selesai”, hal. 71)

⁶⁰ Sejumlah tokoh sipil dan militer, partai politik mulai berani untuk bertindak lebih jauh dan tidak hanya sekedar secara diam-diam mengingkari perintah Soekarno. Kelompok-kelompok Angkatan Darat, aktivis Muslim dan Katolik, orang nasionalis anti komunis, menentang secara terang-terangan.

Kudeta lain adalah “kudeta merangkak” yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Kudeta merangkak ini sangat berhasil karena alasan operasi intelijen dan penggalangan opini publik yang berhasil dilakukan secara cemerlang. Dapat dikatakan proses pengambilalihan kekuasaan ini dilakukan pada bulan Oktober, November, Desember dan bulan-bulan selanjutnya sampai kurang lebih bulan Agustus tahun 1967⁶¹. Kudeta merangkak ini didukung dengan kampanye media massa yang memberikan bingkai opini publik, entah kepada PKI sebagai organisasi nasional atau kepada ormas-ormasnya sebagai wadah oknum-oknum yang terlibat dalam putsch pertama⁶².

Dari konstelasi “kudeta merangkak” tersebut, dapat dipahami bahwa telah terjadi kampanye sistematis menggiring pendapat publik secara kolektif baik yang bersifat sosial maupun religius. Dari dasar kampanye sistematis tersebut maka rejim baru membangun landasan legitimasi moral untuk memperoleh dan menyusun kekuasaan. Muara kampanye sistematis tersebut

⁶¹ Rangkaian peristiwa tersebut adalah rangkaian peristiwa penumpasan simpatisan PKI, pelimpahan wewenang kekuasaan melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, pembubaran PKI sebagai partai politik, pembersihan menteri-menteri kabinet Dwikora, pembentukan kabinet Dwikora hasil kompromi Soekarno dan Angkatan Darat, kontroversi antara Soekarno dengan MPRS, rangkaian pidato Nawaksara, pencabutan mandat kepresidenan dari Soekarno serta pelimpahan wewenang kepresidenan kepada pejabat Presiden, Jenderal Soeharto.

⁶² Penelitian Saskia Wieringa juga menganalisa adanya penggiringan opini publik yang dilakukan oleh pers militer waktu itu. Dengan memberikan tekanan pada masalah pembantaian tak berperikemanusiaan atas para Jenderal, maka pers militer menempatkan Gerwani sebagai figur ormas PKI yang digambarkan sangat buruk. Bahkan lebih buruk dari PKI itu sendiri. Hal ini mengakibatkan perlakuan dan aksi balas dendam terhadap Gerwani begitu buruk. Ada tujuan terselubung menyebutkan “tari-tarian cabul” atau berita “zakar para Jenderal yang diiris-iris (Saskia, 1999:470-499).

adalah pengambilalihan kekuasaan dari Soekarno dan pengusuran unsur-unsur komunis dari peta politik Indonesia (Wertheim, 1979:200). Kampanye dalam perspektif tersebut telah membawa dengan sengaja suasana yang kacau dan kritis dengan berdasarkan sifat kuatir dan cemas yang telah berkembang dalam masyarakat serta sudah sangat terguncang dengan situasi ekonomi politik yang ada.

Pertimbangan lain yang bisa melengkapi wacana pengambilalihan dan delegitimasi Soekarno adalah kegagalan proses kompromi politik antara Presiden Soekarno dengan Angkatan Darat pada masalah Partai Komunis Indonesia. Keputusan sepihak dari Jenderal Soeharto membubarkan PKI telah memperlihatkan bahwa ketidaktegasan penyelesaian politis Soekarno telah mendorong kekuatan anti komunis semakin kuat.

Setidaknya ada empat kelompok kepentingan yang semakin mendesak adanya proses delegitimasi Soekarno sebagai pimpinan negara. Kelompok itu adalah kelompok militer, terutama Angkatan Darat⁶³, kelompok pembaharu moderat⁶⁴, kelompok yang menentang Soekarno sampai disingkirkannya PKI dari sistem politik Indonesia dan kelompok radikal⁶⁵.

⁶³ Kekuatan Angkatan Darat berpusat pada Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto. Pengkubuan dalam Angkatan Darat seringkali ditolak dan diingkari oleh para pimpinannya. Sebelum peristiwa G 30-S, pengkubuan dalam Angkatan Darat sangat terasa.

⁶⁴ Kelompok ini adalah kelompok anti komunis, terdiri dari orang-orang yang kritis tapi tidak sampai bermusuhan dengan Soekarno.

⁶⁵ Kelompok radikal adalah kelompok kepentingan yang menyatakan bahwa sistem baru politik

Bentuk maksimal kompromi Soekarno adalah *reshuffle* kabinet Dwikora yang harus dilakukannya sampai dua kali. Kerumitan dan keruwetan masalah politik dari bulan November 1965 merupakan benih-benih kegagalan kompromi politik yang dilakukan oleh Soekarno. Soekarno sebagai presiden telah terjebak dalam pola permainan bahwa Presiden tidak lagi berperan sebagai “Bapak Bangsa” tapi justru menjadi pemain aktif dalam proses “catur politik” waktu itu sampai dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret.

Setelah dikeluarkannya SP 11 Maret 1966, seluruh proses politik tidak serta merta semakin jelas dan terarah. Surat Perintah tersebut justru membuat masalah baru, terutama penafsiran yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto. Menurut Soekarno, Surat Perintah itu tidak berarti adanya perubahan yang pokok dalam kedudukannya sendiri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara:

Ini saya terangkan begitu Saudara-saudara, apalagi para asing, pers asing mengatakan bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Soeharto. Tidak. It is not a transfer of authority kepada General Soeharto. Ini sekedar perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan untuk ini, untuk itu, untuk itu.....I repeat again, it is not a transfer of authority. Sekedar perintah mengamankan !(Kumpulan Pidato Soekarno, jilid 2, 2003:185).

Indonesia tidak menyediakan tempat bagi Soekarno. Seluruh kebijakan Soekarno dilihat sebagai sumber masalah bagi Indonesia. Kelompok ini terdiri dari kelompok Partai Sosialis Indonesia (bawah tanah, terutama kelompok Soedjatmoko dan Subadio), Partai Katolik yang sebenarnya mempunyai akar permusuhan tradisional dengan Soekarno, IPKI, organisasi massa yang berafiliasi dengan Masyumi, unsur NU dan unsur-unsur Angkatan Darat yang memang benar-benar memusuhi Soekarno.

Soeharto justru mempunyai pandangan yang berlainan sekali dan dia menginterpretasi Surat Perintah itu sebagai pelimpahan kekuasaan politik yang besar, karena dia diberi tugas untuk memelihara keamanan nasional dan kestabilan pemerintahan⁶⁶ (Ulf Sundhaussen, 1988:409). Dapat dikatakan bahwa dalam perspektif praktis, kejadian tahun 1966-1967 merupakan “kudeta diam-diam” yang dilaksanakan secara sistematis.

Wacana pengambilalihan kekuasaan berkembang sampai pada keputusan MPRS yang mencabut mandat kepresidenan Soekarno. Sidang MPRS merupakan kemenangan besar dari kubu Soeharto. Kekuasaan Presiden telah dipangkas secara drastis dan Soeharto dijadikan pembuat kebijaksanaan⁶⁷.

4.7. Diskursus Makro Ekonomi Indonesia

Hal yang penting dalam pembicaraan makro ekonomi Indonesia adalah bahwa citra politik dan ekonomi merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Era tahun 1960-an, perekonomian Indonesia sangat terkait dengan usaha simbolisasi revolusi berkelanjutan yang menjadi proyek Soekarno. Dapat

⁶⁶ Kekuasaan politik itu akhirnya dimanfaatkan secara efektif oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, penangkapan atas sebagian besar orang-orang kepercayaan Soekarno, perombakan kabinet sampai pada pembentukan kabinet “Ampera”.

⁶⁷ Segera setelah pembentukan kabinet Ampera, Soeharto mulai kebijakan baru pada isu konfrontasi dengan Malaysia.

dikatakan, sebagian besar energi dan sumber daya alam Indonesia habis untuk memenuhi perwujudan simbolisasi politik⁶⁸.

Meskipun demikian, tahun-tahun pertama 1960-an memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami penurunan walaupun Indonesia mempunyai posisi terhormat di dunia. Pada tahun 1960-an pelarian modal menjadi-jadi, suku cadang dan bahan mentah tidak tersedia, ekspor merosot, dan barang konsumsi maupun modal menjadi langka. Produksi yang mendatangkan keuntungan, baik oleh perusahaan swasta ataupun oleh perkebunan pertanian milik negara menjadi tidak mungkin.

Pemerintahan Soekarno kekurangan sumber daya riil untuk mengisi kesenjangan investasi, pencetakan uang pemerintah di Kebayoran hanya mempercepat laju inflasi rupiah. Meski dalam pemerintahan Orde Lama juga ada struktur ekonomi yang mendukungnya. Struktur ekonomi tersebut secara tradisional dapat terbagi dalam empat kelompok, yaitu kelompok kapitalis pribumi tradisional serta kapitalisme kecil yang terlokalisir pada praktek produksi dan perdagangan kecil, kelompok pedagang Tionghoa yang menguasai sejumlah produksi dan pelayanan konsumen dalam skala kecil, kelompok kapitalis pribumi yang beroperasi pada sektor ekonomi menengah, terakhir

⁶⁸ Indonesia pada tahun 1963 telah menjadi negara kelas dua dalam hal kekuatan senjata. Selain itu, stadion besar dibuat untuk memenuhi ambisi Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962 dan Ganefo sebagai tandingan Olympiade. Pembangunan favorit Soekarno terdiri dari pembangunan Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional.

adalah kelompok kapitalis Tionghoa yang menguasai sektor ekonomi yang relatif besar.

Dengan menggunakan tahun 1957 sebagai tahun indeks angka 100, indeks biaya hidup menjadi 348 pada tahun 1960, menjadi 36.000 tahun 1965 dan melonjak menjadi 150.000 sekitar tahun 1966. Investasi, produksi dan perdagangan telah runtuh di bawah Soekarno. Sekitar tahun 1960, pabrik-pabrik beroperasi rata-rata hanya sedikit di atas 20 % kapasitasnya, hasil di sektor minyak tidak bertambah, penerimaan penjualan minyak bumi di luar negeri telah menurun 50 % antara 1964 – 1965, ekspor terus menurun sejak tahun 1961.

Dalam era demokrasi dan ekonomi terpimpin, rata-rata inflasi melonjak sampai 650 % sampai tahun 1965. Ini menandakan bahwa nilai mata uang begitu rendah, karena peredaran uang real tidak diimbangi dengan jumlah barang yang memadai. Kondisi keuangan yang begitu akut menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan “sanering”, atau pemotongan nilai nominal mata uang rupiah. Ini berarti bahwa Rp. 1000 dipangkas menjadi hanya Rp. 1.

Produksi merosot di seluruh bidang ekonomi, kecuali bidang perminyakan. Jaringan infrastruktur komunikasi dan jalan raya atau jalan kereta api sebenarnya pada taraf keambrokan. Penyediaan listrik sangat memprihatinkan. Kebijakan fiskal menunjukkan bahwa uang beredar sampai

tahun 1964 dan 1965 meliputi Rp 2.982,4 milyar menjelang akhir tahun 1966 mencapai 10 trilyun. Tentu saja kebijakan fiskal yang lemah tersebut mengakibatkan defisit keuangan. Dari tahun 1963 hingga tahun 1966 defisit keuangan justru lebih besar dibandingkan pengeluaran pemerintah. Utang luar negeri sebelum G 30-S mencapai 270 juta dollar AS. Menjelang akhir tahun 1966, utang luar negeri Republik Indonesia mencapai 2,4 milyar dollar AS. Menghadapi perekonomian yang sedemikian buruk, pada bulan November, Desember 1965 sampai Maret 1966, pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga barang dan minyak bahan bakar.

Kenaikan harga barang dan ekonomi biaya tinggi akibat inefisiensi dan korupsi di birokrasi banyak berperan dalam keambrukan ekonomi Indonesia tahun 1964 – 1966. Kemerosotan di bidang ekonomi ini juga membuat mahasiswa dan kaum intelektual semakin bersifat kritis dengan kepemimpinan Soekarno. Hasil pendidikan di pelbagai universitas di Amerika atau Eropa menjadikan intelektual dan mahasiswa menaruh perhatian pada sebab-sebab keambrukan dan kebobrokan ekonomi nasional. Keprihatinan atas ekonomi juga muncul dari kalangan Angkatan Darat. Itulah sebabnya SESKOAD banyak mengundang intelektual Universitas Indonesia untuk menjadi pembicara yang menganalisa situasi ekonomi Indonesia. Itulah sebabnya juga, mereka pada

akhirnya juga menjadi pemeran atau aktor aktif dalam pembentukan kerangka ekonomi yang dikembangkan oleh Orde Baru⁶⁹.

Kemerosotan ekonomi ini pernah mau digunakan oleh Soekarno dan PKI untuk mencari kambing hitam, yaitu sistem kapitalisme liberal. Kemunduran ekonomi dan sosial masyarakat yang sudah menumpuk ditimpakan kepada sistem kapitalis yang ada dalam masyarakat. Itulah sebabnya ada ungkapan “kapitalis birokrat”. “Kabir” adalah orang-orang yang menyalahgunakan kedudukan yang strategis untuk menguras sumber daya ekonomi⁷⁰. Kemunduran ekonomi ini juga menjadi pintu masuk ideologi kapitalisme untuk berkonsolidasi mempengaruhi proses produksi, konsumsi dan distribusi barang serta jasa di Indonesia. Dari pernyataan di atas, terlihat dengan jelas bahwa pengaruh ideologi dalam wacana ekonomi Indonesia menjadi sangat penting.

Pemulihan ekonomi merupakan program pertama yang dilakukan rejim Soeharto setelah mendapatkan legitimasi hukum dan moral atas politik Indonesia. Dukungan kepada Soeharto mengalir karena dalam retorika politiknya, prioritas kepemimpinannya adalah sektor ekonomi. Langkah-langkah pertama yang diambil oleh para pembuat kebijakan adalah

⁶⁹ Kelompok ini pada akhirnya juga dikenal sebagai kelompok Berkeley. Anggota kelompok itu misalnya Emil Salim, M. Sadli, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, JB. Sumarlin, Selo Sumarjan, Fuad Hassan, Barli Halim, Subroto dan lainnya.

⁷⁰ Dalam sejarahnya, ungkapan Kabir juga ditujukan kepada tentara, terutama Angkatan Darat. Banyak kambing hitam itu adalah tentara, sehingga slogan-slogan PKI diartikan sebagai tantangan langsung kepada Angkatan Darat. Kambing hitam tersebut termuat dalam slogan “tujuh setan desa”.

memperhitungkan kembali pembangunan ekonomi. Kurun waktu tahun bulan Maret sampai November 1966 dihabiskan untuk mengembalikan kembali kepercayaan dan dukungan material dari pihak-pihak yang mengendalikan sumberdaya kelembagaan. Soeharto dan para menteri ekonomi mempunyai tiga tujuan, yang semuanya dilaksanakan sekaligus, yaitu menjadualkan ulang pembayaran hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo pada tahun 1966, memperoleh beras dan sandang, dan merundingkan kredit baru⁷¹.

Kalau pada tahun 1966 adalah tahun untuk memperoleh akses kredit maka pada tahun 1967, pemerintah Indonesia memusatkan perhatian pada proses jangka panjang investasi Indonesia. Dalam konstataasi bidang ini adalah bahwa ada dua kelompok investor swasta yang mempunyai sumberdaya paling besar dan pengalaman yang paling lama dalam bidang produksi. Dua kelompok itu adalah para investor internasional atau transnasional dan penduduk etnis Tionghoa sendiri yang kecil namun kecil. Legitimasi awal kepemimpinan Soeharto juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola negara yang hampir bangkrut⁷².

⁷¹ Secara simbolik Sri Sultan HB IX yang waktu itu menjadi wakil perdana menteri bagian Ekuin mencanakan kebijakan pemerintah yang tidak memusuhi para investor.

⁷² Politik luar negeri yang dikembangkan oleh Soeharto berubah sangat berorientasi ke barat. Hal ini disebabkan bahwa Soeharto memegang masalah krusial, yaitum memperbaiki keadaan ekonomi yang terlanjur rusak. Indonesia mencoba memulihkan hubungan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan negara-negara kreditur non komunis.

4.8. Konteks Makro Industri Pers Perjuangan

Wacana-wacana di atas memperlihatkan bahwa dimensi perubahan sistem politik dan ekonomi di Indonesia bersumber pada masalah ideologi. Dengan demikian dalam wacana makro industri pers perjuangan tahun 1965 – 1968, ada beberapa yang harus diperhatikan.

Pertama adalah peta ideologi pers Indonesia. Tahun 1962 – 1965, pers Indonesia didominasi oleh pers komunis dan pers non komunis. Tentu saja, pers komunis menjadi pers dominan yang menguasai opini publik dan mempunyai pengaruh atas kebijaksanaan pemerintah⁷³. Juga tentunya, dominasi pers komunis juga tak terpisah dengan logika dan eksistensi retorika komunisme di Indonesia meski membonceng dengan kosa kata dan retorika demokrasi terpimpin.

Sementara itu, pers non komunis merupakan pers perifer. Dalam kelompok pers non komunis terdiri dari pers yang terafiliasi dengan agama (Duta Masyarakat – NU, Sinar Harapan yang terafiliasi dengan Partai Kristen Indonesia, Kompas yang bernaung di bawah Partai Katolik), pers yang berafiliasi dengan BPS⁷⁴ (Badan Pendukung Soekarnoisme) – (pers BPS misalnya Harian Merdeka, Berita Indonesia – simpatisan Partai Murba,

⁷³ Dominasi pers komunis berikut simpatisannya harus diletakkan pada konteks tren otoriterianisme yang dikembangkan oleh demokrasi terpimpin. Tren otoriterianisme ini merujuk pada gejala politik waktu itu.

⁷⁴ Pers BPS dibredel Presiden Soekarno. Sebanyak 28 koran ditutup seketika. Pembredelan pers ini menyusul kegiatan pers tersebut dalam mendukung aktivitas politik Badan Pendukung Soekarnoisme.

Indonesian Observer dan Warta Berita, Indonesia Baru dan Waspada, Suara Merdeka di Semarang, Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Suara Rakyat Surabaya, Pikiran Rakyat Bandung) dan pers militer menyusul pembubaran pers BPS (Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha). Khusus diterbitkannya pers militer pada awalnya sebenarnya untuk mengisi kekosongan pers yang berfungsi sebagai *counter* propaganda yang dilakukan oleh pers komunis. Pers militer merupakan usaha politik Angkatan Darat untuk mengisi dan menahan aksi-aksi komunikasi yang dilancarkan oleh pihak komunis.

Tahun 1965 merupakan tahun perubahan radikal pers Indonesia yang didominasi oleh pers komunis. Praktis setelah peristiwa G 30-S maka industri pers komunis mengalami kejatuhan drastis. Sejak tanggal 1 Oktober 1965, sebanyak 46 surat kabar dari 163 surat kabar yang terbit di Indonesia dibreidel secara permanen

oleh penguasa militer⁷⁵. Waktu-waktu selanjutnya, pers militer justru memegang peranan utama dalam arus informasi di Indonesia. Selain pers militer, pers lain yang dibiarkan hidup adalah pers yang mendukung, terlibat dan bersifat akomodatif dalam usaha konsolidasi Orde Baru.

Dominasi pers militer ini dipotret oleh Agassi (1967:17) sebagai cermin penguatan peran militer dalam sistem politik Indonesia. Yang menarik dalam

⁷⁵ Angka 46 menunjukkan jumlah yang besar atas keputusan breidel pers waktu itu. Angka ini juga melebihi pembreidelan pers sepanjang diberlakukannya undang-undang darurat perang.

perkembangan ini adalah bahwa pers Indonesia memunculkan pers mahasiswa atau pers yang dikelola oleh akademisi kampus. Pada mulanya penerbitan pers kampus ini dipakai dan dimanfaatkan oleh militer untuk membangun legitimasi intelektual atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tentara. Paruh kedua bulan dalam tahun 1966, sebetulnya terjadi keseimbangan peta kekuatan pers di Indonesia. Artinya tidak ada pers yang mendominasi secara hegemonik.

Setidaknya ada enam kelompok pers yang menonjol dalam kancah arus informasi. Mereka adalah pers militer⁷⁶ (Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, Ampera, Api Pancasila, Pelopor Baru dan Warta Harian), pers nasionalis yang sedikit banyak menimbulkan opini simpati kepada Soekarno (Suluh Marhaen, El-Bahar⁷⁷), pers intelektual yang dipelopori oleh mahasiswa (Harian KAMI, Nusantara, Indonesia Raya dan Pedoman), pers Muslim (Duta Masyarakat, Angkatan Baru, Suara Islam, Harian Abadi dan Mercuri Suar), pers Kristen (Harian Kompas – Katolik, Sinar Harapan – Protestan), dan pers independen (Harian Merdeka, Jakarta Times dan Revolusioner).

⁷⁶ Harian Angkatan Bersenjata dan pers militer lainnya mempunyai edisi-edisi daerah. Harian atau pers militer tersebut diterbitkan oleh penguasa militer daerah untuk mengantisipasi mobilisasi dan aktivitas ormas dan simpatisan PKI di daerah.

⁷⁷ El-Bahar adalah harian yang diterbitkan oleh Angkatan Laut. Harian ini mempunyai isi berita yang agak berbeda dengan pers militer lainnya. Angkatan Laut selanjutnya bersimpati dengan Bung Karno. Harian ini membuktikan bahwa belum ada koordinasi internal dalam Angkatan Bersenjata menyikapi isu sensitif, seperti halnya isu Soekarno dalam G 30-S.

Industri pers Indonesia tahun 60-70 an, jelas tidak dapat dipisahkan dengan situasi dan konteks sosial politik Indonesia pada waktu itu. Bila dibandingkan dengan tahun 50-an, pasar dan industri media massa terutama koran, mengalami keadaan yang kurang lebih stabil meski juga tidak bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi politik media massa di Indonesia tidak begitu menonjol. Industri media massa terutama koran pada tahun 1960 ditandai dengan pertumbuhan dan dinamika yang sedemikian menyolok perbedaan.

Pertumbuhan dan aktivitas media massa mengalami fluktuasi yang luar biasa. Tingkat oplah koran tertentu dengan orientasi ideologi tertentu bisa sedemikian tinggi, meski di lain tempat tidak jarang pembredelan koran-koran yang vokal terhadap pemerintah. Tingkat sirkulasi koran tahun 50 sampai tahun 60-an sempat menyentuh dimensi yang tidak bisa terkontrol lagi. Berikut ini dipaparkan tabel pertumbuhan surat kabar di Indonesia periode tahun 1945 hingga tahun 1965.

Bagan IX
Pertumbuhan Surat Kabar Harian di Indonesia

Akhir tahun	Berbahasa Indonesia		Berbahasa Belanda		Berbahasa Cina		Berbahasa Inggris		Jumlah Keseluruhan	
	Jml	Sirk	Jml	Sirk	Jml	Sirk	Jml	Sir	Jml	Sirk
1949	45	227100	13	102.300	17	84.300			75	413.700
1950	67	338300	11	87.200	15	73.650			93	499.150
1951	61	372800	11	77.500	13	65.400			85	515.700

1952	74	390000	11	71.000	16	90.500	1	5.000	102	556.500
1953	76	463500	11	64.000	16	97.500	1	5.000	104	630.000
1954	77	508710	9	62.050	17	109.500	2	12.500	105	692.760
1955	81	735010	8	56.050	17	107.500	2	12.500	108	911.060
1956	80	756960	7	56.850	17	107.500	2	12.500	106	933.810
1957	96	888950			17	129.500	3	25.000	116	1.043.450
1958	83	825010			9	111.500	3	25.000	95	961.510
1959	79	852750			11	153.500	4	29.000	94	1.036.250
1960	41	494000			3	41.000	3	41.000	47	576.000
1961	61	692500					4	17.500	65	710.000
1962	Tidak ada data yang rinci menjelaskan.									
1963										
1964										
1965										

(Edward Smith, 1983:274)

Antara tahun 1960 hingga tahun 1965, penerbitan pers Indonesia memang tidak stabil.

Bagan X

Jumlah Surat Kabar Harian dan Oplah 1960 – 1965

Tahun	Jumlah Surat Kabar	Jumlah Oplah
1960	97	1.090.500
1961	60	557.500
1962	70	834.000
1963	105	1.304.000
1964	116	1.501.350
1965	115	1.325.400

(Edward Smith, 1983:167-275)

Hambatan paling besar pada saat tahun 1960-an adalah masalah percetakan. Masalah percetakan ini adalah masalah warisan kolonial yang tersisa bagi media massa di Indonesia. Kalau dirunut ke belakang, masalah

percetakan ini adalah masalah yang diturunkan ketika Indonesia masih harus berjuang. Sistem pengelolaan dan pemeliharaan yang lemah menyebabkan ketidakefisienan manajemen percetakan, baik yang dibeli secara baru maupun hasil peninggalan Belanda dan Jepang. Keterbelakangan pada sektor pengembangan percetakan pada akhirnya menghambat perkembangan media cetak di Indonesia, selain bahwa praktek penyitaan alat-alat operasional percetakan seringkali terjadi pada waktu pemerintahan demokrasi terpimpin.

Perkembangan selanjutnya dalam industri pers Indonesia adalah perkembangan yang merunut pada tujuh keputusan Dewan Pers pada tahun 1966. Industri pers pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dengan soal pembinaan. Soal pembinaan tidak bisa dipisahkan dari sektor perangkat keras. Sektor perangkat keras meliputi soal pengadaan kertas koran, percetakan, bahan baku percetakan. Dalam UU no. 11/1966, disebutkan bahwa industri pers nasional akan didukung oleh pemerintah. Tetapi soal realisasinya tentu saja membutuhkan waktu yang lama dan bertahap. Apalagi pada masa-masa awal Orde Baru, pemerintah menempuh politik ekonomi “uang ketat”. Kebijakan moneter dan ekonomi tentu saja harus memperhatikan stabilisasi politik untuk menciptakan stabilitas harga dan menekan tingkat inflasi.

Kondisi di atas sangat mempengaruhi kondisi industri pers Indonesia. Tahun 1964, jumlah surat kabar yang terbit mencapai 119. Pada tahun 1966, penerbitan pers berjumlah 130. Tahun 1967 sampai 1969 terjadi penurunan

drastis dalam jumlah penerbitan, terlebih jumlah oplah perhari. Antara tahun 1964 sampai tahun 1966, oplah rata-rata adalah 1,6 juta lembar per hari. Pada tahun 1967 hingga 1969, oplah rata-rata menjadi hanya 890 ribu lembar per hari. Keprihatinan ini ditulis dalam memorandum SPS-PWI kepada pejabat Presiden tanggal 20 Januari 1968:

“Pada kesempatan ini, kami ingin mengemukakan kembali perkembangan pers kita, sejak pemerintah secara drastis menghentikan subsidi atas kertas koran pada awal 1967.

Menurut catatan yang ada pada SPS, berdasarkan surat ijin pembelian kertas, pemakaian kertas koran untuk Desember 1966 di seluruh Indonesia mencapai 2.200 ton bagi surat kabar harian, mingguan dan majalah. Ini berarti, bahawa pada akhir tahun 1966 kita telah mencapai oplah surat kabar harian, mingguan dan majalah tersebut kurang lebih 2,2 juta lembar.

Dalam kuartal ketiga tahun 1967, menurut catatan yang ada pada kami, pemakaian kertas telah menurun menjadi rata-rata 1.100 ton setiap bulannya, suatu penurunan hampir 50% dibandingkan dengan akhir tahun 1966. pemakaian kertas tersebut menandakan sirkulasi 1,1 juta lembar untuk seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, kira-kira separo, yakni 550.000 adalah oplah surat kabar harian untuk seluruh Indonesia yang berpenduduk 110 juta jiwa dan yang menurut perkiraan kita 80% telah dapat membaca dan menulis, yang jadinya berarti satu surat kabar untuk 200 orang. Suatu jumlah yang jauh di bawah target yang harus dicapai dalam tahun 1969 berdasarkan Tap MPRS no II/MPRS/60, yaitu lima juta lembar tiap hari, yang berarti dengan penduduk 110 juta itu saja bisa mencapai 22 orang untuk 1 surat kabar.

Kemerosotan tersebut disebabkan oleh faktor yang sama seperti yang dihadapi oleh pers nasional kita dalam tahun 1968 ini, yaitu kenaikan harga kertas koran, kenaikan ongkos cetak dan ongkos eksploitasi lainnya, yang tidak dapat ditutup dengan menaikkan harga langganan koran berdasarkan cost accounting, mengingat rendah daya beli masyarakat kita. (Tribuana Said, 1998)

Kemerosotan dan “boom” pers yang terjadi di Indonesia merupakan faktor-faktor yang bisa saja mempengaruhi kinerja pemberitaan sebuah media

massa tertentu. Wacana dinamis perkembangan pers Indonesia menyusul G 30-S sangat dipengaruhi oleh suasana nasional yang sedang menghadapi tantangan dan krisis sosial. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya pers Indonesia mengemban misi untuk meletakkan dasar pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi masalah stabilisasi dan rehabilitasi keamanan, politik, pemerintahan dan ekonomi.

4.8. Penelitian Framing Mikro - Meso

4.8.1. Sejarah Singkat Harian “Berita Yudha” Dan “Angkatan Bersenjata”

Secara historis dapat dikatakan bahwa pendirian dan pembentukan harian “Berita Yudha” dan “Angkatan Bersenjata” tidak bisa dipisahkan dengan situasi politik dan ekonomi Indonesia pada waktu itu. Secara khusus, pembentukan dua harian yang dikelola oleh faksi militer di Indonesia merupakan tanggapan aktif dari pembubaran dan pemberangusan harian-harian yang berafiliasi dengan Badan Pendukung Soekarnoisme (selanjutnya disingkat BPS).

Koran atau harian yang berafiliasi dengan BPS merupakan media massa yang mencoba mengimbangi praktek ofensif yang dilakukan oleh media massa yang bernaung pada lingkaran Partai Komunis Indonesia. Beberapa polemik dalam struktur pers dan media di Indonesia yang ditandai dengan tingkat ofensif PKI di berbagai bidang, termasuk dalam pers Indonesia. Hal ini bisa

dilihat dengan usaha penyusupan PKI dengan seluruh ormasnya seperti pada lembaga PWI, SPS, Antara. Tentu saja, hal tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sendiri.

BPS sendiri didirikan pada tanggal 1 September 1964 di Jakarta dengan beberapa tokoh seperti Adam Malik, B.M. Diah, dan Soemantoro. Harian-harian yang berafiliasi dengan BPS tersebar di Indonesia, seperti *Pikiran Rakyat* (Bandung), *Suara Merdeka* (Semarang), *Tempo* (Semarang), *Sinar Indonesia* (Semarang), *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta), *Suara Rakyat* (Surabaya), *Waspada*, *Mimbar Umum*, *Tjerdas Baru* dan *Suara Masyarakat* di Medan. Secara umum, media massa BPS disokong juga oleh ormas Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (Soksi), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR).

Polemik harian yang berafiliasi komunis dengan harian yang berafiliasi BPS semakin memuncak. Titik klimaks dari polemik ini sempat membuat stabilitas pers Indonesia terguncang. Harian BPS menuduh PKI sebagai patriot Pancasila munafik, sementara faksi komunis menuduh BPS sebagai organisasi yang dibiayai oleh CIA (dinas rahasia Amerika Serikat)⁷⁸

Secara politis, polemik pengaruh media massa antara PKI dengan BPS diselesaikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan no. 72/KOTI/1964 yang berisi bahwa Presiden RI membubarkan dan melarang BPS di seluruh

⁷⁸Dalam tuduhannya, PKI memberitakan bahwa BPS telah menerima dana sebesar 500 jut dolar AS.

Indonesia. Tindakan yang menyusul surat keputusan itu adalah pemecatan beberapa wartawan BPS dari harian masing-masing.

Pada tanggal 23 Februari 1965 dan 23 Maret 1965, Presiden menginstruksikan pembreidelan puluhan koran anggota BPS di seluruh Indonesia. Koran-koran itu adalah *Semesta*, *Berita Indonesia*, *Merdeka*, *Indonesian Observer*, *Warta Berita*, *Garuda*, *Karyawan*, *Gelora Minggu*, *Suluh Minggu*, *Revolusioner*, *Indonesia Baru*, *Tjerdas Baru*, *Mimbar Umum*, *Waspada*, *Duta Minggu*, *Suluh Massa*, *Genta Revolusi*, *Resopim*, *Pembangunan*, *Aman Makmur*, *Pos Minggu* dan lain-lainnya. Wartawan-wartawan yang dipecat seperti Sondang Meliala, Eddy Sutrisno, Syamsul Fuad, Adikasno, Sofyan Lubis, Taslim MH, Harmoko, Munir Hamid, Asthaman Arief, Mathias D. Pandu, RS. Hadi, Tjia Kie Fong, Tung Kim Djali, Adam Malik (waktu menjadi Duta Besar RI di Uni Soviet), BM. Diah (waktu itu menjadi Duta Besar RI di Thailand), Sajuti Melik, Rachmad Nasution dan lain-lainnya.

Semenjak pembubaran dan pembreidelan harian BPS, terbitlah aturan dari Departemen Penerangan RI yang menyebutkan bahwa setiap pers harus mempunyai kaitan dengan partai politik. Dapat dikatakan Pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu menuntut agar setiap penerbitan pers harus mendapat dukungan resmi dari partai politik atau organisasi massa atau Panca Tunggal Revolusi (yang berisi lima pejabat tertinggi daerah, misal Gubernur,

Pangdam, Panglima Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan dan Dewan Revolusi Daerah).

Dapat digambarkan secara lebih singkat pemetaan pers Indonesia pada waktu itu adalah *Suluh Indonesia* (harian Partai Nasional Indonesia) dengan delapan afiliasi di berbagai kota, *Duta Masyarakat* (harian NU) dengan tujuh afiliasi, *Banteng Rakjat* (harian Partindo, tapi tidak terbit) dengan lima afiliasi, *Api Pantjasila* (harian IPKI, sebelumnya disebut Takari) dengan tiga afiliasi, *Nusa Putera* (harian PSII) dengan empat afiliasi, *Sinar Bhakti* (Partai Katolik, tapi tidak terbit) dengan empat afiliasi, *Fadjar Baru* (harian Perti) dengan satu afiliasi, *Harian Rakjat* (harian PKI) dengan empat belas afiliasi⁷⁹. Partai Kristen Indonesia tidak mempunyai harian resmi, tetapi dua surat kabar berafiliasi pada partai tersebut. Muhammadiyah menerbitkan harian *Mertju Suar*. Di Jakarta sendiri, juga diterbitkan koran *Bintang Timur* dan *Sinar Harapan*. Pada Juli 1965, *Kompas* berdiri.

Pada tanggal 15 Maret 1965, harian *Angkatan Bersenjata* diterbitkan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal R. H. Sugandhi dan Letnan Kolonel Jusuf Sirath. Harian ini diterbitkan untuk menandingi media massa yang dibentuk oleh Partai Komunis Indonesia. Harian *Berita Yudha* sendiri sebetulnya berdiri

⁷⁹ Menurut catatan Departemen Penerangan, pada akhir 1964, untuk seluruh Indonesia terdapat 114 penerbitan dengan jumlah oplah 1.496.350 lembar perhari. *Suluh Indonesia*: 70 ribu lembar, *Warta Bhakti*: 65 ribu lembar, *Harian Rakjat*: 59 ribu, *Berita Indonesia*: 50 ribu, *Sinar Harapan*: 42.500 lembar, *Merdeka*: 35 ribu, *Warta Berita*: 30 ribu, *Duta Masyarakat*: 30 ribu.

tidak terkonsentrasi di Jakarta. Terdapat juga edisi-edisi *Berita Yudha* daerah yang tentu saja dilindungi oleh pejabat-pejabat Angkatan Darat daerah.

4.8.2. Penelitian Framing Mikro (Bagan XI)

Berita Yudha edisi Jakarta sesungguhnya merupakan harian yang dihasilkan dari pengambilalihan harian Berita Indonesia. Dengan demikian sebetulnya, tenaga-tenaga pers Berita Yudha merupakan tenaga-tenaga pers Berita Indonesia. Berita Yudha secara resmi terbit sejak tanggal 9 Februari 1965 dengan dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ibnusubroto, Sukarno H. Wibowo dan Daradjad, Brigadir Jenderal M. Nawawi Alif serta Moh. Moedasir.

4.8.2.1 FRAME I: G 30-S Sebagai Kasus Politik Kontra Revolusioner

Koran Berita Yudha mulai gencar menayangkan peristiwa 1 Oktober 1965, sejak hari Senin, tanggal 4 Oktober 1965. Pada tanggal 4 Oktober ini, Berita Yudha memberitakan kejadian-kejadian setelah peristiwa G 30-S. Harian tersebut memberitakan soal penegasan Presiden RI, Soekarno untuk menciptakan suasana yang tertib dan tenang. Ketertiban dan ketenangan masyarakat dapat dipulihkan ketika masyarakat membantu tugas-tugas pemulihan ketertiban yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto.

Dalam terbitan tanggal tersebut, Berita Yudha juga menayangkan sikap koran lawan, yakni Harian Rakjat dan Warta Bhakti⁸⁰ yang mendukung gerakan 30 September 1965.

⁸⁰ Dua harian ini merupakan harian yang berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia. Harian Rakjat masih terbit sampai tanggal 2 Oktober 1965 justru ketika gerakan 30 September telah efektif dieliminasi oleh Angkatan Darat. Dalam editorial yang ditayangkan oleh Harian Rakjat, redaksi HR menyatakan bahwa G 30-S merupakan tindakan yang tepat dan perlu didukung oleh rakyat. Juga disebutkan bahwa G 30-S merupakan gerakan internal dalam Angkatan Darat. Ini mengesankan bahwa

Identifikasi Masalah. Harian Berita Yudha mengidentifikasi pertama-tama bahwa masalah G 30-S merupakan masalah politik kontra revolusioner yang mengakibatkan krisis kepemimpinan nasional dan krisis sosial politik. Ada beberapa alasan mengapa harian Berita Yudha mengidentifikasikan G 30-S merupakan gerakan kontra revolusioner. Pertama, G 30-S yang kemudian menamakan dirinya sebagai Dewan Revolusi Indonesia telah jelas-jelas melakukan makar politik terhadap pemerintahan Indonesia yang sah:

“....Dari kenyataan di atas ditambah dengan tindakan-tindakan mereka yang telah menjulik Men/Pangad/Kepala Staf KOTI Letnan Jenderal A. Yani dengan beberapa Perwira Tinggi lainnya seorang Perwira Pertama. Juga telah menguasai setjara paksa Studio RRI Djakarta dan Kator Besar Telekomunikasi Djakarta, maka djelaslah bahwa apa yang menamakan dirinja “Gerakan 30 September” itu telah melakukan pengambilan alih kekuasaan Negara Republik Indonesia dari tangan PJM Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno atau dengan perkataan lain “Gerakan 30 September” telah melakukan COUP.....(Tajuk Rencana Berita Yudha, 4 Oktober 1965).

Kedua, dengan logika bahwa aktivitas makar merupakan aktivitas yang menghalangi proses revolusi Indonesia yang berjalan dengan segala atribut perpolitikan yang ada maka jelas bahwa G 30-S merupakan proses politik yang kontra revolusioner.

“...Karena itu djelaslah bahwa apa yang menamakan dirinja “Gerakan 30 September” adalah gerakan yang kontra-revolusi yang telah melakukan aksi/tindakan² kontra revolusioner terhadap Negara dan Revolusi Indonesia jg. Berdasarkan Pantjasila, juga terhadap Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno.....”(ibid.)

masalah G 30-S bukan merupakan masalah politik nasional tapi masalah internal belaka.

Dengan kedua alasan tersebut dapat dikatakan bahwa Berita Yudha mau menjadikan masalah G 30-S sebagai masalah politik nasional bukan sekedar masalah intern Angkatan Darat Republik Indonesia.

“...Karena itu, sekali lagi lagi kita tandaskan, bawa peristiwa 1 Oktober yang telah dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” bukanlah hanya merupakan persoalan intern Angkatan Darat, tetapi sepenuhnya merupakan persoalan nasional, yang penyelesaiannya kini langsung dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno (Tajuk Rencana Berita Yudha, 7 Oktober 1965)

Interpretasi Penyebab. Secara keseluruhan, Berita Yudha mau mengatakan bahwa Dewan Revolusi Indonesia yang makar terhadap Pemerintahan yang sah serta sekaligus mengkhianati cita-cita revolusi Indonesia adalah penyebab masalah krisis nasional yang dialami Indonesia. Siapa saja yang terlibat dalam Gerakan 30 September merupakan penyebab masalah terhambatnya jalannya revolusi Indonesia berdasarkan Pancasila. Dalam awal bulan Oktober 1965, belum didapat secara konfirmatif siapa yang menjadi pelaku atau subjek yang positif bertanggung jawab atas peristiwa G 30-S. Seluruh pemberitaan mengarah pada suatu situasi khusus yang memerlukan perhatian yang lebih waspada.

“....Dengan demikian dapat kita njatakan, bahwa mereka telah menuduh orang lain a k a n melakukan Coup, padahal mereka sendirilah yang t e l a h melakukan Coup dengan membentuk apa yang mereka sebut “Dewan Revolusi Indonesia” tanpa Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, dan telah mendemisionerkan Kabinet Dwikora yang dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno.

Secara umum Berita Yudha menempatkan secara aktif bahwa Dewan Revolusi Indonesia merupakan pelaku tunggal usaha makar politik yang dilakukan. Bukan tanpa maksud, Berita Yudha memberikan proposisi aktif dalam framing tajuk rencana yang mereka buat. Dengan usaha menunjukkan pelaku aktif makar maka mereka juga mau menunjuk korban dari seluruh aktivitas makar tersebut. Korban pertama yang harus diperhatikan adalah Letnan Jenderal A. Yani dengan beberapa perwira tinggi dan seorang perwira pertama pada khususnya dan Angkatan Darat Republik Indonesia pada umumnya. Korban kedua adalah Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Korban kedua ini merupakan konsekuensi logis usaha pendemisioneran kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Ir. Soekarno pada waktu itu. Korban ketiga adalah korban secara tidak langsung dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Evaluasi Moral. Penilaian moral atas Dewan Revolusi Indonesia dalam hal ini kelompok yang dinamakan sebagai kelompok Gerakan 30 September – yang kemudian dinamakan secara sepihak dengan Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) – sebagai sumber masalah datang dari dua penilaian moral yang dilakukan terhadap kelompok G 30-S.

Pertama, penilaian moral pertama yang mendasar adalah penilaian bahwa G 30-S merupakan bentuk kesalahan yang secara moral tidak bisa dimaafkan. Kesalahan itu bisa dirangkum dalam dua buah kesalahan fatal, yaitu kesalahan etika politik yang dilakukan oleh kelompok G 30-S yang begitu

tega “membokong” – menusuk dari belakang elite Angkatan Darat waktu itu serta kesalahan etika politik yang dilakukan oleh kelompok G 30-S yang memfitnah Angkatan Darat dengan isu “Dewan Jenderal”

.....Perlu kita njatakan, bahwa dalam tubuh Angkatan Darat t I d a k a d a apa yjang mereka sebut “Dewan Djenderal” dan dituduh akan melakukan Coup pada saat mendjelang 5 Oktober. Sebab kalau benar ada apa jang mereka sebut “Dewan Djenderal” pasti Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi bertindak membubarkannja dengan tjara biasa, jang pasti sepenuhnya dipatuhi oleh segenap anggauta TNI/AD (Tajuk Berita Yudha, 4 Oktober 1965).

Kedua, penilaian moral juga didasarkan bahwa G 30-S jelas-jelas mengkhianati cita-cita revolusi Indonesia dan bertindak main-main dalam seluruh proses revolusi Indonesia. Bahkan dalam sebuah artikel Berita Yudha yang memberitakan posisi Menteri dan Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia dikatakan bahwa G 30-S merupakan permainan politik yang membahayakan Pancasila. Secara moral, tindakan kelompok G 30-S tidak bisa dimaafkan atau diampuni.

Rekomendasi. Atas semua perbuatan yang dilakukan oleh kelompok G 30-S maka Berita Yudha memberikan rekomendasi bahwa seluruh gerakan 30 September harus “dikikis habis”

“...Kepada segenap anggauta TNI/Angkatan Darat dan semua anggauta ABRI lainnja serta kepada segenap Rakjat jang progresif revolusioner jang telah membantu Pimpinan sementara Angkatan Darat untuk menumpas apa jang menamakan dirinja “Gerakan 30 September” dengan ini kami menjatakan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginja.

....Tugas kita selanjutnja dalam rangka mengikis habis sama sekali, apa yjang menamakan dirinja “Gerakan 30 September”, kita sepenuhnya tunduk dan patuh kepada segala ketentuan jang digariskan oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno dan melaksanakannja tanpa reserve...(ibid.)

Berita Yudha dalam rekomendasinya tidak mengarah pada penyelesaian hukum sebagaimana layaknya negara hukum tapi merekomendasikan penyelesaian politik menyeluruh bagi para pelaku gerakan tersebut. Penyelesaian politik menyeluruh berarti membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan ini merupakan harga politik yang harus dibayar oleh sistem politik yang dibangun oleh Presiden Soekarno.

4.8.2.2. Frame: G 30-S Sebagai Kasus Politik Kontra Revolusioner (Bagan XII)

<i>Problem Identification</i>	Masalah Politik yang mengakibatkan krisis nasional yang parah, terutama krisis sosial politik dan kepemimpinan nasional.
<i>Causal Interpretation</i>	Siapa saja yang terlibat dengan kelompok G 30-S yang selanjutnya disebut oleh Angkatan Darat sebagai Gestapu. Angkatan Darat, Para Jenderal dan Presiden merupakan korban konspirasi makar politik yang dilakukan
<i>Moral Evaluation</i>	Kelompok G 30-S secara etis atau moral dipersalahkan, terdapat fitnah sistematis dan penculikan serta pembunuhan yang terencana
<i>Treatment Recommendation</i>	Diselesaikan secara politis, kalau perlu dikikis habis sampai ke akar-akarnya

4.8.2.3. Framing Kelompok Komunis Sebagai “Lawan”/Kelompok Jahat

Tidak banyak perhatian diberikan pada masa genting dalam sejarah modern Indonesia ini, baik oleh peneliti dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Seperti John Legge mengakui, *'barangkali karena yang dibunuh adalah orang-orang Komunis, maka sedikit banyak hati nurani dunia luar seakan-akan tidak terusik oleh apa yang harus digolongkan, apa pun penilaiannya, sebagai salah satu pembantaian paling keji dalam sejarah modern'* (Legge 1972:399).

Jelas jika Amerika Serikat menjadi merasa lega, bila selagi berada di tengah kemelut Perang Vietnam, Sukarno, yang mereka pandang sebagai pengacau dunia yang hendak menyerahkan Indonesia ke tangan kaum Komunis yang berbahaya itu, telah berhasil disingkirkan oleh seorang jendral kanan yang dengan segala daya membawa Indonesia ke jalan kapitalis.

Seorang pengamat kekuasaan Suharto, Vatikotis (1993:34), menulis:

“....Indonesia, citra buruk bagi para pengamat politik luar negeri Amerika Serikat itu, dalam tahun 1960-an tiba-tiba memberi bukti paling terang, bahwa tidak semua kekuasaan yang dibangun di atas laras senjata adalah buruk”.

Dalam kajian ini, ada alasan lain mengapa Dunia Barat tutup-mulut itu ialah, karena ketidak-mampuannya memahami tali-temali dan intrik-intrik yang ada di balik kampanye ketidak-amanan dan pembunuhan-pembunuhan massal, yang dilakukan sesudah kup “pertama” tanggal 1 Oktober 1965. Kampanye beserta akibat-akibatnya itu dipandang sebagai kup yang “kedua”, yang dengan diam-diam telah mengantar Suharto ke tahta kekuasaannya. Para

pengamat umumnya mengabaikan adanya kup yang kedua ini, atau sekedar mengatakannya sebagai suatu periode genting dalam sejarah Indonesia yang '*tidak bisa dimengerti*' (Törnquist 1984:54). Beberapa penulis mengakui, bahwa keberhasilan Suharto naik ke tangga kekuasaan terjadi dalam dua tahap (Southwood dan Flanagan 1983; Pohan 1988; Vatikiotis 1993). Walaupun begitu orang mengabaikan mekanisme di balik tali-temali kup yang kedua itu:

Suharto tampil di atas tahta kekuasaan di tengah kemelut kejadian-kejadian sesudah kup yang gagal, dan yang sampai sekarang sama sekali belum jelas ... Suharto dan sekelompok kecil pendukungnya mengambil kesempatan itu, seolah-olah tampil tanpa rencana sebelumnya yang terlalu jauh. (Vatikiotis 1993: 2&22)

Dalam kejadian-kejadian tersebut, kup tanggal 1 Oktober 1965 merupakan kejadian terpenting yang perlu dijelaskan. Karena, entah bagaimana pun juga, memang kejadian inilah yang akhirnya telah membukakan jalan bagi Suharto naik ke jenjang kekuasaan. Sebagai akibatnya, maka diabaikanlah kecerdikan Suharto dalam memanipulasi pendapat umum - segala dalih dan kebohongan telah digubahnya untuk menciptakan kondisi kekacauan masyarakat, serupa seperti adegan gara-gara dalam pertunjukan wayang.

Vatikiotis berpendapat, misalnya, bahwa mungkin orang-orang di sekitar Suharto itulah, khususnya para perwira muda dan mahasiswa radikal (dengan dukungan satuan-satuan kesatuan khusus di bawah komando Kolonel Sarwo Edhie Wibowo), '*yang telah mendorong Suharto merebut kekuasaan*' (Vatikiotis

1993:240). Kampanye ideologi dan pembunuhan-pembunuhan massal yang melandasi Orde Baru memang dilihat dengan kesedihan, namun begitu telah dianggap sebagai kejadian-kejadian yang tersendiri:

“.....yang mengawali penyusunan orde baru dan pembangunan kembali ekonomi Indonesia, merupakan periode lanjutan kekacauan yang pendek tetapi berdarah. Orde Baru telah mengeksploitasi keadaan masyarakat warisan jaman Sukarno yang sangat terpolarisasi, untuk menumpas lawan-lawannya dan memberikan jalan keluar untuk terjadinya pertumpahan darah katarsis itu. (Vatikiotis 1993:33)

Sementara Dunia Barat demi alasan-alasannya sendiri berdiri di kejauhan, di Indonesia oposisi dipukul atau dengan cerdiknya dibikin tutup mulut oleh pemerintah melalui tindakan represi yang kejam. Tidak hanya dengan pembunuhan terhadap ratusan ribu orang-orang yang berdosa, tetapi juga dengan menahan puluhan ribu lainnya, bahkan ada di antara mereka yang sampai lebih dari dua puluh tahun. Hanya sedikit saja dari para tahanan itu yang dibawa ke depan mahkamah pengadilan.

Namun demikian dampak represi rezim Orde Baru tidak puas berhenti sampai dengan para korban atau keluarga mereka saja. Kampanye sesudah peristiwa G 30-S yang dilakukan Jenderal Soeharto memang tidak hanya dimaksud untuk menumpas Komunisme di Indonesia sampai seakar-akarnya, dan untuk membangkitkan kebencian massa terhadap politik Soekarno, sehingga ia akan melepaskan jabatan kepresidenannya. Kampanye itu juga bertujuan untuk menciptakan suasana mental, membenaran ideologis bagi Orde Baru. Karena itu saya sama sekali tidak setuju terhadap pendapat yang

mengatakan, misalnya, bahwa “endapan perasaan tentang periode ini belum memberi corak tertentu pada persepsi umum terhadap kekuasaan Suharto” (Vatikiotis 1993:34).

Endapan emosional semacam itu telah menjadi dasar rezim Suharto, yang tidak saja ditunjang dengan teror fisik yang dilakukan angkatan darat, tetapi khususnya oleh keberhasilannya yang meyakinkan, bahwa apa pun yang berkaitan dengan kritik sosial ialah subversif, Komunis, dan akhirnya dikaitkanlah pula dengan perbuatan seksual kaum perempuan Indonesia yang tidak senonoh (lihat penggambaran dan kampanye Soeharto pada Gerwani).

Ketakacuhan politik bangsa Indonesia tidak terlalu dilihat hanya sebagai akibat dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi yang telah diciptakan Orde Baru saja. Tetapi, ketak-acuhan itu, juga timbul dari bayangan tentang kekacauan masyarakat berikut warna-warna seksualnya, pembunuhan massal yang terjadi karenanya, dan disusul represi yang tiada putus-putusnya itu. Untuk menjamin agar citra resmi itu tidak rusak, penguasa tetap sangat membatasi kebebasan pers.

Dengan demikian periode traumatis 1965-1966 dalam sejarah Indonesia itulah, yang menandai pergantian dari Orde Lama Presiden Soekarno ke Orde Baru Presiden Soeharto. Kekuasaan Orde Baru dibangun di atas model disiplin dan represi militer, di mana setiap referensi mengenai ketimpangan sosial dituding sebagai dijiwai atau berkaitan dengan “subversi Komunis”.

Dengan kepentingan semacam itu, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha dipakai untuk menjadi alat opini publik bahwa Partai Komunis Indonesia adalah otak sekaligus pelaku gerakan 30 September 1965. Seluruh pemingkaian media massa yang dikeluarkan oleh Angkatan Darat dan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diarahkan pada sosok PKI sebagai monster yang mematikan dan perlu diberantas sampai ke akar-akarnya.

Identifikasi Masalah. Media massa militeristik pada waktu itu jelas mengidentifikasi bahwa memang G 30-S merupakan sebuah permainan politik Partai Komunis Indonesia yang berbahaya serta jelas mengkhianati cita-cita revolusi.

“....Dalam briefing tersebut Men/Pangak menandakan bahwa dalam hal ini terdapat dugaan jang kuat bahwa G 30-S itu adalah buah hasil dari suatu permainan politik jang membahayakan Pantjasila.....” (Berita Yudha, hal. 1, kolom 1, 8 Oktober 1965)

Bahkan, harian Angkatan Bersenjata lebih tajam lagi menjelaskan akar masalah yang menghinggapi orang atau faksi komunis di Indonesia.

“....Orang-orang komunis Indonesia dihinggap oleh kechilafan ilmiah ini. Jakni kechilafan mengamati fakta, salah melihat fakta, sehingga berachir dengan salah menilai. Karena mereka dikejar-kejar oleh ‘harapan jang kuat’. Mereka memiliki suatu image bahwa ‘negara komunis’ harus lahir dari ‘revolusi beleh-belehan’, jakni revolusi-sembelih-sembelihan. Sebab dengan demikian djika berhasil mereka akan merasa puas dan merasa berhak menepuk dada: ‘Aku telah mendjadi murid Marx-Lenin-Mao jang setia dan djaja, dan jang lebih hebat lagi mereka akan berhak menjebut dirinja ‘Pahlawan Proletar’.....(Editorial Angkatan Bersenjata, 31 Juli 1967)

Dalam pemingkaian rangkaian berita yang dibuat dalam Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, diketahui mayat-mayat itu baru bisa diangkat dari lubang sumur di Lubang Buaya (di mana para pembunuh telah melemparkannya) menjelang siang tanggal 4 Oktober, lebih 75 jam setelah pembunuhan terjadi. Dalam jangka waktu itu, dalam iklim tropis bisa diperkirakan mayat sudah sangat membusuk. Dan sesudah hari siang, Selasa tanggal 5 Oktober, mayat-mayat itu dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kalibata. Berita dalam harian tersebut menyatakan identifikasi atas mayat; deskripsi tubuh, termasuk pakaian atau hiasan-hiasan badan; uraian rinci tentang luka-luka; kesimpulan tentang waktu dan penyebab kematian.

Angkatan Bersenjata memuat beberapa buah foto kabur mayat-mayat yang telah membusuk, dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai "perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan". Berita Yudha yang selalu lebih garang, mengatakan bahwa mayat-mayat itu penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. "Bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita." Mayjen Suharto sendiri dikutip menyatakan,

".....jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala (jenazah-jenazah itu), betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan 'Gerakan 30 September'" (Berita Yudha, 5 Oktober 1965).

Surat kabar itu meneruskan dengan menggambarkan saat-saat terakhir kehidupan Jendral Yani, mengatakan bahwa sesudah ditembak rubuh di rumahnya, ia dilemparkan hidup-hidup ke dalam sebuah truk dan terus menerus disiksa sampai "penyiksaan terakhirnya di Lubang Buaya." Bukti-bukti tentang penyiksaan ini ditunjukkan dengan adanya luka-luka pada leher dan mukanya, dan kenyataan bahwa "anggota-anggota tubuhnya tidak sempurna lagi". Apa yang dimaksud oleh kata-kata yang agak kabur itu menjadi lebih jelas pada hari-hari berikut.

Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober, Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa "matanya (Yani) dicungkil". Berita ini dikuatkan dua hari kemudian oleh Berita Yudha dengan menambahkan bahwa muka mayat itu ditemukan terbungkus dalam sehelai kain hitam. Pada tanggal 7 Oktober itu juga Angkatan Bersenjata melukiskan lebih lanjut, tentang bagaimana Jendral Harjono dan Jendral Pandjaitan tewas oleh berondongan tembakan senjata api di rumah masing-masing, lalu mayat mereka dilempar ke dalam sebuah truk yang menghilang dalam kegelapan malam dengan "deru mesinnya yang seperti harimau haus darah". Sementara itu Berita Yudha memberitakan tentang bekas-bekas siksaan pada kedua tangan Harjono. Pada tanggal 9 Oktober Berita Yudha memberitakan, bahwa meskipun muka dan kepala Jendral Suprpto telah dihancurkan oleh "penteror-penteror biadab", namun ciri-cirinya masih

bisa dikenali. Pada Letnan Tendean terdapat luka-luka pisau pada dada kiri dan perut, lehernya digorok, dan kedua bola matanya "dicungkil".

Harian ini pada hari berikutnya mengutip saksi mata pengangkat mayat bulan Oktober itu, yang mengatakan bahwa di antara kurban beberapa ada yang matanya keluar, dan beberapa lainnya "ada yang dipotong kelaminnya dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar perikemanusiaan."

Pada tanggal 11 Oktober Angkatan Bersenjata menulis panjang lebar tentang matinya Tendean, dengan menyatakan bahwa ia mengalami siksaan luar biasa di Lubang Buaya, sesudah diserahkan kepada para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Ia dijadikan benda "permainan jahat" perempuan-perempuan ini, digunakan sebagai "bulan-bulanan sasaran latihan menembak sukwati Gerwani." Begitu surat kabar-suratkabar tentara memulai, maka yang lain pun segera serta merta mengikuti. Misalnya Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, pada tanggal 20 Oktober memberitakan, bahwa "alat pencungkil" yang digunakan untuk jenderal-jenderal itu telah ditemukan oleh pemuda-pemuda anti komunis, ketika mereka menyerbu gedung-gedung Partai Komunis, di desa Harupanggang di luar kota Garut. Walaupun tanpa diterangkan, mengapa partai tersebut memandang desa itu cocok untuk menyimpannya.

Pada tanggal 25 Oktober suratkabar ini juga memuat pengakuan seseorang bernama Djamin, anggota organisasi pemuda Partai Komunis,

Pemuda Rakyat, yang mengatakan telah menyaksikan bagaimana Jenderal Suprpto telah disiksa "di luar batas kesusilaan" oleh anggota-anggota Gerwani. Pengakuan-pengakuan serupa itu dimuat berturut-turut, dan memuncak pada cerita menarik tentang Nyonya Djamilah, disiarkan pada tanggal 6 Oktober oleh Dinas Penerangan ABRI kepada seluruh kalangan pers. Nyonya Djamilah diceritakan sebagai hamil tiga bulan, pimpinan Gerwani dari Pacitan berumur lima belas tahun, mengaku bahwa ia dan kawan-kawannya di Lubang Buaya telah menerima pembagian pisau kecil serta silet dari anggota-anggota pasukan Gerakan 30 September. Lalu mereka, yang seluruhnya berjumlah seratus orang itu, mengikuti perintah orang-orang itu pula, mulai memotong dan menyayat-sayat kemaluan jenderal-jenderal yang telah mereka tangkap itu.

Malahan tidak berhenti di situ saja. Antara yang telah dikuasai militer itu, pada tanggal 30 November melukiskan bagaimana orang-orang Gerwani itu dengan mudahnya telah menyerahkan tubuh mereka kepada para personel AURI yang ikut serta dalam Gerakan 30 September. Sementara itu pada tanggal 13 Desember Angkatan Bersenjata melukiskan mereka bertelanjang menarikan "Tarian Bunga Harum", sebelum terjun dalam pesta pora massal bersama para anggota Pemuda Rakyat. Di dalam cerita-cerita yang memenuhi surat kabar selama bulan-bulan Oktober, November dan Desember ini -- sementara itu pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang

berhubungan dengan Partai Komunis terus berjalan -- terkandung dua hal yang sangat menarik diperhatikan.

Pertama, ditiupkan bahwa tujuh kurban itu mengalami siksaan yang mengerikan -- khususnya dicungkil mata dan dipotong kemaluan mereka; kedua, ditonjolkan bahwa pelaku-pelaku kejahatan adalah orang-orang sipil dari organisasi yang berafiliasi dengan komunis. Berita paling lengkap tentang kematian mereka terbit jauh sesudah peristiwa terjadi: tentang Yani dalam Berita Yudha tanggal 5 Desember; Berita Yudha Minggu tanggal 21 November, dan Berita Yudha tanggal 13 Desember; dan Harjono dalam Berita Yudha Minggu tanggal 28 November. Semua pemberitaan menunjukkan, bahwa jenderal-jenderal itu telah dibunuh dengan mendadak dan seketika di rumah dengan berondongan tembakan yang dilakukan oleh anggota-anggota Resimen Kawal Cakrabirawa, di bawah pimpinan operasi Letnan Satu Doel Arief.

Cerita lengkap tentang matinya korban-korban ini terdapat dalam surat kabar-surat kabar berikut: Parman, Berita Yudha, 17 Oktober dan juga Berita Yudha serta Angkatan Bersenjata tanggal 2 Desember; Soeprapto, Berita Yudha Minggu tanggal 5 Desember; Sutojo, Berita Yudha Minggu tanggal 21 November. Terhadap empat orang inilah berita-berita tentang siksaan biadab dan seksual paling banyak diberikan. Apa yang diungkapkan oleh laporan forensik adalah sebagai berikut: Jenderal. S. Parman mengalami lima luka tembak, termasuk dua yang mematikan pada kepala; dan, di samping itu,

"robek dan patah tulang pada kepala, rahang, dan kaki kiri bawah, semuanya sebagai akibat benda tumpul dan keras -- popor bedil atau dinding dan lantai sumur -- tetapi jelas bukan luka-luka "siksaan", juga tidak sebagai akibat silet atau pisau lipat.

Jenderal Soeprapto mati oleh karena sebelas luka tembak pada berbagai bagian tubuhnya. Luka-luka lain berupa enam luka robek dan patah tulang sebagai akibat dari benda tumpul pada kepala dan muka; satu disebabkan oleh benda keras tumpul pada betis kanan; luka-luka dan patah tulang itu "akibat benda tumpul" yang sangat keras pada bagian pinggul dan pada paha kanan atas"; dan tiga sayatan yang, melihat pada ukuran dan kedalamannya, mungkin disebabkan oleh bayonet. Sekali lagi "benda tumpul" menunjukkan terjadinya benturan dengan benda-benda keras yang besar dan berbentuk tak menentu (popor bedil dan batu-batu sumur), dan bukannya silet atau pisau. Jenderal Sutojo mengalami tiga luka tembak (termasuk satu yang fatal pada kepala), sedang "tangan kanan dan tempurung kepala retak sebagai akibat benda tumpul keras". Sekali lagi kombinasi ganjil antara tangan kanan, tulang tengkorak, dan benda pejal berat yang memberikan kesan popor bedil atau batu-batu sumur.

Kapten Tendean mati akibat empat luka tembak. Kecuali itu para ahli tersebut menemukan luka gores pada dahi dan tangan kiri, demikian juga "tiga luka akibat trauma pejal pada kepala". Tak terdapat sepetah kata pun di

laporan-laporan ini tentang adanya siksaan yang tak tersangkal, dan tak ada juga bekas silet atau pisau kecil apapun. Bukan saja karena hampir semua luka-luka bukan tembak itu dilukiskan sebagai akibat dari benda pejal dan keras, tetapi karena pembagiannya secara jasmaniah seperti klasifikasi pergelangan kaki, tulang kering, pergelangan tangan, paha, pelipis dan lain-lain -- pada umumnya tampak sembarangan. Adalah sangat menarik, bahwa sasaran para penyiksa yang lazim yaitu pelir, dubur, mata, kuku, telinga, dan lidah tidak disebut-sebut. Maka dengan cukup meyakinkan bisa dikatakan bahwa enam orang dari korban-korban itu mati oleh tembakan senjata api dan jika tubuh mereka mengalami tindak kekerasan lain adalah akibat pemukulan dengan gagang bedil yang mematahkan peluru-peluru mematikan itu, atau cedera yang mungkin diakibatkan karena jatuh dari ketinggian 36 kaki ke dalam sumur yang berdinding batu.

Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam pidatonya tanggal 12 Desember 1965 kepada Kantor Berita Indonesia Antara, Presiden Soekarno mengutuk para wartawan yang telah membesar-besarkan pernyataan mereka, dan menegaskan bahwa dokter-dokter yang telah memeriksa mayat para kurban menyatakan, tentang tidak adanya perusakan mengerikan pada mata dan alat kelamin seperti telah diberitakan dalam pers.

Berdasarkan frame tersebut dapat dikatakan bahwa kelompok komunis dilihat sebagai kelompok yang secara sepihak memaksakan ideologinya tanpa

memperhitungkan fakta konstelasi politik makro yang ada pada waktu itu. Dalam bingkai tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok komunis adalah kelompok yang berbahaya.

Penggambaran lain yang jelas memojokkan kelompok komunis adalah penggambaran para aktor komunis yang berlumuran darah, korup dan secara moral bejat.

“TOKOH PKI LUKMAN KORUP Rp. 250 Djuta.....Bagi Wk. Ketua DPR-GR MH. Lukman jg belum dapat rumah itu sedjak Agustus jl. Sibuk mengurus otorisasinya sendiri. Surat2 permohonan untuk itu dibuat sendiri, dan bahkan dira mentjari sendiri rumah jang akan dibelinya itu. Djatuhlah pilihannja pada sebuah rumah di Djl. Godangdia Lama no 22 jang luas pekarangannja 2000 meter persegi. Rumah ini kalau dilihat dari depan memang tidak seberapa besarnya. Tetapi pandjang. Bahkan di belakang bisa untuk lapangan tenis...Berapa kamar tidur rumah itu ? Tampaknja sukar dipertjaja, seorang jang selalu menggembor-gemborkan sama rata sama rasa itu untuk keluarga jang hanja punja anak lima mesti akan menempati rumah jang kamar tidurnya 7, 3 ruang tamu dan pavlijun yang tjukup untuk dua keluarga. Berapa harga rumah itu. Rasanja tidak akan banjak dipersoalkan orang bila tidak ada hal2 lainnja. Setelah permohonan otorisasi disetudjui oleh Dept. jang bersangkutan dan rumah djuga sudah, maka Rp. 250 djuta segera dibajarkan kepada pemilik rumah tersebut....(Berita Yudha, hal. 1, kolom 1, 23 November 1965)

Berita dalam harian Berita Yudha tersebut tidak berhenti pada masalah korup yang dipunyai oleh pengurus teras Partai Komunis Indonesia yang kebetulan juga merupakan pejabat negara pada waktu.

Pada tingkat akar rumput di kalangan bawah, penggambaran dan pembeding-kai kelompok komunis juga tidak kalah hebat. Permasalahannya adalah sama bahwa pihak komunis menghalalkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

“....62 MAJAT DALAM 3 LOBANG.....Di daerah Banjuwangi sadja djatuh korban 104 djiwa – “G 30-S” berhasil njodok 30 milyar rupiah untuk beaja petualangannja....Laporan jang diterima dari “Antara” dari daerah Banjuwangi sampai dengan haris Senin, tagl 25 Oktober menjebutkan bahwa sampai hari itu telah diketahui djatuhnja korban2 djiwa sebagak 104 orang di daerah Banjuwangi, sebagai akibat bentrokan antara golongan2 jang berusaha menumpas apa ja. Menamakan diri G 30-S dengan oknum-oknum jang dituduh terlibat dalam G 30-S.....Menurut keterangan lain jang dapat dikumpulkan “Antara” pada tanggal 20 Oktober jl. Pihak yang berwadjib telah menemukan 3 buah loban di daerah Tjemetuk, ketjamatan Tjluring. Didalam lobang ini berhasil diketemukan sebak 62 majat. Dua buah lobang masing2 berisi 11 majat dan sebuah lainnja memuat 40 majat ...”(Berita Yudha, hal 1, kolom 5, 28 Oktober 1965)

Pada sisi lain, harian Berita Yudha juga menggambarkan permasalahan pihak komunis sebagai orang-orang kriminal

“.....Komplotan orang2 yang terdiri dari PKI, Pemuda Rakjat dll. Jang ikut bertualan dalam golongan kontra revolusioner Gerakan 30 September jang belum tertangkap dan berkeliaran di ibukota telah membentuk sebuah organisasi gelap “Kutjing Hitam”. Di daerah Ps Minggu komplotan sematjam itu dipimpin oleh seorang tokoh Pemuda Rakjat S.

Dari sumber jang dapat dipertjaja diperoleh keterangan bahwa tugas dari komplotan “kutjing hitam” selain melaksanakan serta meneruskan idea2 dan rentjana2 djahat petualang kontra revolusioner apa jang menamakan dirinja Gerakan 30 September, juga berusaha mentjari kekuatan baru, yakni dengan djalan menghasut serta membudjuk2 orang yang berada diluar PKI, pemuda rakjat dan antek2nja. Terutama pada orang2 ketjil jang miskin. Menurut sumber itu komplotan tersebut masih memiliki sendjata api peninggalan/sisa2 dari sendjata Tjung, Pistol dlsb jang dipergunakan untuk mendjagal “Pahlawan Revolusi (Berita Yudha, 21 Oktober 1965)

Interpretasi Penyebab. Secara keseluruhan, kelompok komunis ditafsirkan sebagai kelompok yang memancing di air keruh. Kelompok komunis dilihat sebagai penyebab utama. Kelompok komunis diperlihatkan sebagai pihak

tidak pernah jera untuk mengkhianati perjuangan dan tidak pernah bisa belajar dari sejarah kelam kelompok tersebut.

Selain bahwa kelompok komunis Indonesia merupakan kelompok politik kotor dan berdarah maka sebetulnya lebih dalam lagi mau diperlihatkan bahwa kelompok komunis merupakan petualang-petualan politik yang sesungguhnya tidak diberi tempat yang layak di struktur makro politik Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa kelompok komunis merupakan kelompok sindikasi politik internasional yang secara sengaja ingin membuat ketidakstabilan politik di Indonesia. Selain itu, secara ideologis, kelompok komunis Indonesia digambarkan sebagai kelompok yang mengumbar mimpi-mimpi politik yang tidak jelas.

“...Mereka paham betul, sungguh paham, bahwa perjuangan komunisme harus didasarkan pada “class struggle”. Karena mereka mengharapkan adanya pertentangan-kelas, maka ketika mereka melihat fakta² di Indonesia lantas mengambil kesimpulan: Di Indonesia pun ada pertentangan kelas dan ada kaum proletar yang tertindas! Mengchayalkan yang tidak², mereka melihat “fakta” bahwa “TNI/ABRI adalah tentara upahan kaum bordjuis.

...Dengan chayalan yang mereka sangka fakta, bahwa RI adalah negara-bordjuis, maka mereka memberontak pada 1948 di Madiun, sementara RI digempur habis²an oleh Belanda. Dengan kaum bordjuis antek Amerika, mereka memberontak dengan djalan menjembelih di Lubang Buaya 1965 (Editorial Angkatan Bersenjata, 31 Juli 1967).

Evaluasi Moral. Yang jelas, dari seluruh penggambaran dan pembingkaihan kaum komunis Indonesia terdapat beberapa tahapan penilaian moral yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Penilaian pertama yang patut diperhatikan bahwa seluruh aktivitas kaum komunis

Indonesia dibenturkan dengan religiositas islami yang banyak berkembang di dalam masyarakat. Dalam salah satu artikel yang dibuat harian Angkatan Bersenjata “hantu-hantu di siang bolong⁸¹”, maka aktivitas G 30-S digambarkan sebagai penjelmaan kekuatan jahat dan mengambil rupa serta memakai atribut-atribut keagamaan

“....bahwa orang-orang kalap dari Pemuda Rakjat dan Gerwani, organisasi-organisasi pajung PKI-Aidit, dengan giat melakukan perbuatan-perbuatan teror. Perempuan-perempuan tidak dikenal mendatangi rumah-rumah para Pahlawan kita, dengan memakai mukena⁸² seakan-akan mereka orang-orang muslim. Gerak-gerik mereka menimbulkan ketjurigaan....Kita harus waspada (Angkatan Bersenjata, 11 Oktober 1965)

Penilaian moral kedua lebih banyak terfokus pada penilaian dengan cara mendeskripsikan rendahnya moralitas yang dipunyai oleh kaum komunis Indonesia. Dalam penelitian Saskia Wieringa (1999), deskripsi penilaian moral jelas sangat mendeskreditkan perempuan komunis yang ada dalam wadah Gerwani. Hasil penilaian moral ini tentu saja disertai dengan beberapa hasil pencarian bukti yang menguatkan anggapan bahwa kaum komunis tahun 1965-an tergolong manusia-manusia rendah moral. Angkatan Darat pernah menunjukkan secara publik peti berisi enam puluh clurit yang diyakini sebagai

⁸¹ Kekhawatiran yang teramat sangat pada komunis (komunisto phobia) memang terlihat begitu jelas inheren pada masa Orde Baru. tak hanya itu, pemerintah Orde Baru tak segan-segan melemparkan stigma PKI pada organisasi-organisasi yang berlawanan dengan kebijakannya

⁸² Salah satu perangkat sholat yang dipakai para wanita Islam kalau mereka sedang menjalankan sholat harian.

milik Pemuda Rakjat. Clurit-clurit ini alat teror yang dilakukan oleh kaum komunis. Bukti-bukti lain adalah dengan retorika Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang menyebutkan bahwa Gerwani terkait langsung dengan proses pembantaian tak berperikemanusiaan di Lubang Buaya, anggota Gerwani melakukan aktivitas seks menyimpang dan cenderung diceritakan secara menjijikan kalau menurut pola penilaian seksualitas ketimuran⁸³, beberapa pengakuan anggota Gerwani yang secara sengaja memotong alat kelamin para Jenderal dan lain-lainnya. Kampanye ini dibangun di atas metafora-metafora seksual, khususnya ketakutan laki-laki terhadap kastrasi yang, dengan dalih-dalih sangat menjijikkan, menggambarkan organisasi perempuan Gerwani (yang dikaitkannya dengan PKI), yang diduga berperan di dalam G 30-S.

Gaya propaganda dalam penilaian moral ini juga menyertai umpatan-umpatan moralis yang ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan peristiwa G 30-S. Setidaknya umpatan moralis diekspresikan dalam “Ganyang

⁸³ Dalam Harian Berita Yudha, kampanye ini dilancarkan dengan menggambarkan kejahatan moral seksual yang dimiliki oleh anggota Gerwani

.....*Tarian yang cabul, mesum, “Tarian Harum Bunga” yang setiap hari dipertunjukkan dengan telanjang bulat, baik pada waktu siang maupun malam hari. Laki-laki 400 orang yang ada menonton 200 orang perempuan, kemudian dilanjutkan dengan hubungan kelamin secara bebas, yang kadang-kadang seorang perempuan harus melayani 3 atau 4 orang laki-laki..... (Angkatan Bersenjata, 13 Desember 1965)*

PKI”, “Gantung Aidit”, “Aidit Setan Dadjjal”, “Gerwani Lonte⁸⁴ dan lain-lainnya”.

Rekomendasi. Dari semenjak awal, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha memberikan rekomendasi bahwa gerakan 30 September harus ditumpas habis atau diganyang sampai ke akar-akarnya. Sedemikian intensif rekomendasi tersebut, sehingga kedua harian tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang atau lama menyatakan bahwa G 30-S adalah gerakan yang perlu diwaspadai.

Dapat dikatakan, kedua harian ini membentuk “hantu teror” yang selalu digemakan dalam setiap kesempatan. Pada setiap kesempatan juga, kedua harian tersebut membawa dan mengarahkan opini bahwa penumpasan G 30-S merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia yang setia dengan ideologi Pancasila⁸⁵.

“.....Tugas kita selanjutnja dalam rangka mengikis habis sama sekali apa jang menamakan dirinja Gerakan 30 September, kita sepenuhnya tunduk dan patuh kepada segala ketentuan jang digariskan oleh Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno dan melaksanakannja tanpa reserve.

⁸⁴ Lonte adalah istilah bahasa Jawa untuk sebutan pelacur murahan.

⁸⁵ Pembantaian dilakukan kadang-kadang oleh tentara, kadang-kadang oleh sipil, orang-orang Islam atau lainnya. Di sini, tentara merupakan pendukung utama. Masyarakat merupakan unsur korban propangadis Angkatan Darat yang secara nyata memiliki konflik dengan PKI. Di beberapa tempat memang terjadi konflik antara PKI dan kelompok lain di kalangan masyarakat. Di Klaten misalnya, aksi pembantaian massal menjadi ajang balas dendam musuh-musuh PKI yang berkali-kali melakukan aksi sepihak penyerobotan lahan-lahan milik tuan tanah di sana. Aksi sepihak ini berakibat bagi kemunculan benih-benih konflik di masyarakat. Pasca Gestapu 1965, PKI menjadi sasaran utama kebencian yang terpendam sekian lama.

.....Kepada masyarakat ramai kita mengharapkan kiranya terus memberikan bantuan sepenuhnya kepada pimpinan Angkatan Darat, baik di pusat maupun di daerah², guna melaksanakan segala ketentuan yang diperintahkan oleh Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang pada saat ini langsung memegang putjuk pimpinan Angkatan Darat.

.....Sedjalan dengan perintah Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Bung Karno, kita menjerukan, marilah tetap waspada dan siap siaga dan terus mempererat serta memperkuat persatuan dan kesatuan Nasional berdasarkan Pantja Azimat Revolusi (Tajuk Rencana Berita Yudha, 4 Oktober 1965)

Dalam beberapa artikel yang dimuat oleh kedua harian tersebut, jelas sangat terlihat bahwa harian-harian tersebut memobilisasi kesanggupan masyarakat untuk bahu-membahu membantu ABRI menumpas G 30-S.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh kedua harian dengan memakai dua bentuk pemberitaan, yaitu bantuan aktif maupun aksi spontanitas masyarakat. Pertama, Berita Yudha tanggal 8 Oktober menulis bahwa kup “Gestapu” menyebabkan kemarahan besar masyarakat Kalimantan Selatan. Harian Berita Yudha juga memberitakan beberapa informasi perlawanan-perlawanan masyarakat daerah terhadap anggota PKI. Bentuk kedua adalah anjuran dan ajakan untuk membantu aparat untuk menumpas G 30-S.

Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, ada arus informasi yang memperlihatkan bahwa *treatment*, yaitu pembasmian PKI mulai harus perlu dikendalikan. Hal ini nampak pada editorial Angkatan Bersenjata:

“....ABRI sangat menghargai spontanitas rakyat di berbagai daerah. Ya, spontanitas ini menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak lemah....Spontanitas rakyat dalam kesatuan aksi pengganyangan Gestapu telah memberikan jasanya yang besar terhadap revolusi dan

kepemimpinan Bung Karno. Namun begitu ekses-ekses tertentu di dalam pengejaran terhadap oknum2 yang terlibat Gestapu telah terjadi dengan hebatnya di daerah2, oknum-oknum telah dihukum mati oleh rakyat, dan yang benar-benar kita sesali. Karena ekses-ekses itu, yang tentu saja diharapkan oleh para simpatisan Gestapu, digunakan untuk melakukan serangan balasan terhadap partai2 dan organisasi2 massa, dengan tujuan untuk mengebiri kekuatan partai2 justru pada saat kita sedang melaksanakan gerakan pembersihan. Dalam hal ini kita harus bekerja dengan tertib, sehingga aksi-aksi massa itu menjadi tidak terpimpin sehingga merugikan diri sendirisedemikian rupa, sehingga ekses-ekses dapat diperkecil. Dan bahkan yang tersebut di atas itu tidak berarti kita tidak perlu terlalu berhati-hati. Sebaliknya, kita harus meningkatkan kewaspadaan, karena masih ada oknum-oknum Gestapu yang berkeliaran, yang tidak mau menggunakan nama PKI tetapi yang mempunyai sikap mental PKI.....”(Angkatan Bersenjata, 11 Januari 1966)

4.8.2.4 Frame: Framing Kelompok Komunis Sebagai “Lawan”/Kelompok Jahat
(Bagan XIII)

<i>Problem Identification</i>	Kelompok komunis merupakan kelompok politik yang secara tegas menolak keragaman ideologi di Indonesia, dengan demikian menolak keragaman masyarakat Indonesia. Kelompok komunis adalah kelompok petualang politik yang terlalu berani memainkan teror politik atas masyarakat.
<i>Causal Interpretation</i>	Secara keseluruhan, kelompok komunis ditafsirkan sebagai kelompok kepentingan yang memancing di air keruh atas situasi politik Indonesia
<i>Moral Evaluation</i>	Kelompok komunis digambarkan sebagai kelompok yang jahat, tidak berperikemanusiaan, secara moral bejat, para wanita komunis digambarkan sebagai pelacur murahan. Kelompok komunis adalah kelompok yang secara sepihak “menusuk dari belakang” jalannya revolusi Indonesia.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pembasmian secara kolektif, aksi spontanitas mempertahankan diri dari

Peristiwa yang mengikuti kejadian-kejadian politik Indonesia pasca G 30-S adalah sejauh mana pimpinan nasional memberikan pemecahan politik terhadap krisis yang dihasilkan dari akibat negatif G 30-S. Yang jelas, framing Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha telah mengumpulkan opini publik bahwa G 30-S adalah perbuatan tersebut melawan hukum nasional waktu itu. Kejadian-kejadian selanjutnya setelah G 30-S merupakan titik anti klimaks kepemimpinan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

4.8.2.5. Framing Krisis Kepemimpinan Politik Dan Kabinet Dwikora

Salah satu tujuan dari framing ideologis dalam dua harian militer: Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah mendelegitimasi kekuatan komunisme di Indonesia. Ternyata, sistematika pemberitaan kedua harian tersebut telah berhasil dengan efektif dalam seluruh proses penghancuran faksi komunis Indonesia. Setidaknya kampanye media massa telah berhasil dalam dua hal, yaitu bahwa komunisme memang patut dihancurkan di satu pihak, serta di sisi lain menampilkan sosok militerisme yang menjadi penyelamat jalannya roda revolusi dalam pemerintahan Indonesia.

Tapi hal-hal di atas tidak berhenti begitu saja. Kampanye sistematis sesungguhnya adalah juga mendelegitimasi kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden. Oleh sebab itu, perlu dilihat juga pembingkaiannya bagaimana kedua

harian tersebut membuat kesan dan realitas adanya krisis kepemimpinan baik secara moral dan politik. Pada akhirnya, krisis kepemimpinan moral dan politik elite paling atas sebetulnya dipakai untuk menegaskan legitimasi sosial politik yang selama ini dipegang oleh Soekarno.

Identifikasi Masalah. Masalah yang menyertai krisis kepemimpinan Soekarno adalah ketidakstabilan politik yang mengakibatkan ketidaktertiban dan situasi yang buruk bagi keamanan nasional. Selain bahwa situasi politik-ekonomi dan sosial Indonesia yang memburuk, tentu saja krisis kepemimpinan elit Indonesia tidak bisa dipisahkan dari latar belakang kepentingan dan sejarah perlunya pergantian kekuasaan politik di Indonesia. Latar belakang dan situasi global-regional menuntut pembaruan kepemimpinan Indonesia yang kebetulan pada waktu itu memegang posisi strategis di kawasan Asia.

Meskipun demikian ada beberapa pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam memahami gerak dan proses dinamis politik Indonesia. Pertama, kedekatan ideologis dan praksis politik antara Soekarno dan Partai Komunis Indonesia juga menjadi faktor penentu permasalahan yang ada waktu itu. Memang, tidak bisa diingkari jasa dan pengabdian Soekarno sebagai salah satu *founding fathers* Indonesia yang telah mampu menghantar Indonesia masuk pada era kemerdekaan. Tapi juga tidak bisa diingkari bahwa eksperimentasi dan praksis politik sentralistik yang sangat kental dengan

ideologi sosialisme turut menjadi faktor penting diperlukannya pergantian kekuasaan di Indonesia.

Kedua, berkaitan dengan hal pertama di atas, proses Nasakomisasi yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno telah membawa kontroversi tersendiri pada sistem politik Indonesia. Masyarakat Indonesia sendiri mempunyai harapan bahwa pembangunan politik Indonesia diarahkan untuk kesejahteraan tapi justru hasil yang didapatkan adalah bahwa pembangunan politik malah berbalik tidak menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa reaksi yang begitu bermusuhan yang ditampilkan oleh masyarakat terhadap gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pertentangan ideologis tersebut tidak hanya dirasakan oleh tingkat elit tapi juga dirasakan oleh kalangan rakyat bawah. Menyusul terjadi G 30-S, sebetulnya masyarakat dibawa pada situasi harus memilih antara kesetiaan terhadap doktrin-doktrin yang ditawarkan oleh Soekarno atau kehendak memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat yang sudah terlalu lama menderita.

Hal tersebut semakin diperuncing oleh ketidaktegasan pemerintah Orde Lama terhadap penyelesaian politik atas G 30-S. Meski ada janji politik yang diungkapkan oleh Soekarno sebagai seorang presiden:

“....Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi akan merumuskan penyelesaian politik dari persoalan yang timbul sebagai akibat dari yang menamakan dirinya Gerakan 30 September atas fakta2 yang nyata dan tidak berdasarkan pembakaran dari pihak manapun.....Atas pertanyaan apakah PJM Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi sudah mendapatkan perumusan bagi

penyelesaian politik daripada persoalan yang timbul karena Gerakan 30 September. Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi menjawab: Laat dat maar mij over, Wait and See (Serahkanlah itu padaku, Tunggulah!)..."(Berita Yudha, 15 Oktober 1965)

Poin tersebut menjelaskan bahwa masalah G 30-S sudah menjadi perhatian Presiden dan hal ini juga menjadi point harapan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam negeri. Akan tetapi masalah menjadi timbul ketika penyelesaian politik tidak kunjung tiba.

"...Prihatin, karena dewasa ini penyelesaian politis peristiwa kontra revolusioner GESTAPU-PKI belum diadakan, karena luka-luka sosial-ekonomis akibat peristiwa GESTAPU-PKI itu belum tersembuhkan, sedangkan kita mempunyai keyakinan bahwa tanpa GESTAPU-PKI pasti kita bisa mentjapai suatu keadaan ekonomi yang baik...." (editorial Angkatan Bersenjata, 18 Januari 1966)

Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata melihat bahwa permasalahan Indonesia sudah jelas. Masalahnya terletak pada masalah legitimasi politik Orde Lama yang semakin berkurang dalam seluruh konteks pembangunan Indonesia secara menyeluruh.

Interpretasi Penyebab. Permasalahan di atas jelas saja secara tidak langsung menunjuk pada krisis kepemimpinan Presiden Soekarno. Kalau mau lebih pendek, dapat dikatakan bahwa seluruh permasalahan Indonesia waktu itu adalah Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunismenya, Pemerintahan sipil Soekarno yang tidak memihak pada kepentingan kesejahteraan sosial, Presiden Soekarno sendiri dengan seluruh ajaran

Nasakom dan praksis politiknya yang mendasarkan diri pada demokrasi terpimpin yang sangat berbau sosialisme.

Dalam banyak artikel, tajuk rencana atau editorial yang dibuat di Angkatan Bersenjata, kedua harian ini secara jelas melempar “kambing” hitam PKI. Tapi dalam konteks yang sama, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha secara tidak langsung membuat pemojokan-pemojokan politis terhadap Soekarno.

....Karena itu, sekali lagi lagi kita tandaskan, bawa peristiwa 1 Oktober yang telah dilakukan oleh apa yang menamakan dirinja “Gerakan 30 September” bukanlah hanya merupakan persoalan intern Angkatan Darat, tetapi sepenuhnya merupakan persoalan nasional, yang penyelesaiannya kini langsung dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno (Tajuk Rencana Berita Yudha, 7 Oktober 1965)

.....Ia bisa menjadi sebab timbulnya pertentangan-pertentangan misalnja mengenai tafsiran terhadap amanat PBR Bung Karno di Bogor hari Sabtu yang baru lalu, yang memerintahkan kepada kita untuk “menjusun kekuatan”.....

Salah satu kelemahannya ialah bahwa dengan mendirikan organisasi baru dengan nama BARISAN SOEKARNO itu bisa berarti memberi kesempatan kepada pihak gerombolan kontrev GESTAPU PKI, oknum2 aktifnya, simpatisan2 atau pelindung2nja untuk bermuntjulan di atas panggung baru dengan nama BARISAN SOEKARNO...(editorial Angkatan Bersenjata, 20 Januari 1966)

....Tanpa rakjat Bung Karno + ABRI tidak mempunyai arti apa2, tetapi poros kekuatan BK + ABRI + rakjat bisa berbuat segala2nja untuk memenangkan revolusi yang diridhoi Tuhan...Ada dua hal yang harus kita- BK + ABRI perhatikan demi mengemban AMPERA. Pertama: Ialah penyakit “main” perintah atau komando2an terhadap rakjat. Perintahisme menundukkan tidak satunja pimpinan dengan massa/rakjat yang dipimpin. Bahkan menunjukkan bahwa sesuatu putusan tidak disadari dan tidak diyakini kebenerannya oleh rakjat yang harus menjalankannya...(editorial Angkatan Bersenjata, 30 Maret 1966)

Dapat dikatakan bahwa dari sekian penerbitan yang dilakukan oleh Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata, dapat dikatakan bahwa kedua harian tersebut tidak mengambil posisi konfrontatif frontal terhadap Presiden Soekarno. Tapi dari sekian tulisan yang dimuat dalam editorial atau tajuk rencana, terlihat pembingkaian tanggung jawab yang mengalami krisis. Dan itu dialami oleh Presiden Soekarno. Penyempurnaan kabinet Dwikora menunjukkan bahwa kinerja Presiden Soekarno tidak bisa lagi dilihat sebagai hal yang mutlak dipatuhi oleh ABRI waktu itu.

Evaluasi Moral. Tentu saja, krisis kepemimpinan elit pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Presiden Soekarno tidak bisa dibiarkan begitu saja. Secara moral, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan sipil Soekarno yang diakibatkan oleh sekian rangkaian krisis ekonomi, sosial dan politik menyebabkan delegitimasi kekuasaan Presiden. Dengan demikian, sesungguhnya kampanye media massa militer waktu itu tidak hanya memberikan kemudahan bagi perubahan kekuasaan belaka. Tapi dapat dikatakan bahwa kampanye moral media massa terhadap krisis legitimasi Soekarno memberikan dasar ideologis bagi kekuasaan militer. Legitimasi militer bersandar pada publik politik, bahwa PKI melakukan pengkhianatan terhadap negara; bahwa memberi hati orang dan faksi komunis dan berusaha untuk melindungi mereka, bahkan sesudah pengkhianatan yang dilakukan, cenderung membuat Soekarno menjadi kehilangan haknya untuk memimpin negara.

Rekomendasi. Secara umum, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha mengambil posisi sebagai corong kepentingan militer Indonesia waktu itu. Dalam konteks krisis kepemimpinan yang dialami oleh pemerintah sipil pimpinan Presiden Soekarno, sebetulnya posisi sudah jelas, yaitu menghendaki pembaruan dalam sistem pemerintahan. Tapi masalahnya, ABRI dan atau Angkatan Darat pada mulanya tidak mau berkonfrontasi secara frontal dengan Presiden⁸⁶. Tentu saja hal tersebut disebabkan oleh kalkulasi politik yang dihitung oleh pihak kepentingan militer.

“...Dan akhirnja berkat kebidjaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Revolusi, Bung Karno, maka apa jang menamakan dirinja “Gerakan 30 September telah dapat kita patahkan...Tugas kita selandjutnja dalam rangka mengikis habis sama sekali, apa yang menamakan dirinja Gerakan 30 September, kita sepenuhnya tunduk dan patuh kepada segala ketentuan jang digariskan oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Revolusi, Bung Karno, dan melaksanakannja tanpa reserve...” (tajuk rencana Berita Yudha, 4 Oktober 1965).

“...Tritunggal: BUNG KARNO + ABRI + RAKJAT, jang sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 ternjata tangguh menghadapi segala usaha pemetjahbelah, dewasa ini djuga ditjoba untuk dikebiri. Pamflet2 gelap sisa3 GESTAPU PKI tempo hari djelas berisi fitnah2 untuk mengadudomba antara BUNG KARNO dan ABRI serta ABRI dan RAKJAT...Tetapi sedjarah Revolusi kita selama 20 tahun ini telah

⁸⁶ Soeharto sangat jelas dan mengerti ketinggian kewibawaan Presiden Soekarno pada waktu itu. Untuk menggulingkan Presiden Soekarno baginya tidak mungkin dia melakukannya segera dengan cara terang-terangan, tetapi ia menggunakan cara halus yaitu dengan Soekarno menggulingkan Soekarno. Dengan adanya Surat Perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS di tangannya, Soeharto dengan mudah bertindak untuk pertama-tama menghancurkan kedudukan hukum kekuatan yang konsekwen mendukung Presiden Soekarno yaitu dengan pelarangan PKI yang didahului dengan penghancuran secara fisik. Setelah kekuatan itu dapat dilumpuhkan dia lalu menggulingkan Presiden Soekarno dan menahan-rumahkan beliau sampai beliau wafat dalam keterpencilan pada tahun 1970. Menggunakan tangan Soekarno menghancurkan kekuatan-kekuatan yang mendukung Soekarno, kemudian merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno.

mengaskan bahwa ‘tritunggal’ itu TIDAK BISA DIPATAHKAN ! ABRI dan RAKJAT adalah SATU, bung KARNO dan RAKJAT adalah SATU. BUNG KARNO + ABRI + RAKJAT adalah SATU. Barisan Soekarno adalah seluruh rakjat dengan ABRI sebagai barisan depannja jang konsekwen memegang kompas revolusi” (editorial Angkatan Bersenjata, 18 Januari 1966)

Dalam perkembangan selanjutnya, kedua harian tersebut, terutama setelah peristiwa Surat Perintah 11 Maret semakin keras menyerukan kerja sama politis antara masyarakat dan ABRI⁸⁷.

“...Demi suksesnja pelaksanaan daripada Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Revolusi/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966 itu, marilah kita resapkan dan tjamkan pokok2 jang tertjantum dalam Surat Perintah tersebut, jang dapat kita bagi sbb:

- 1. mendjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannya pemerintahan dan djalannya revolusi*
- 2. mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Revolusi/Mandataris MPRS.*
- 3. melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi*
- 4. mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima Angkatan2 lain dengan sebaik-baiknya*
- 5. melaporkan segala sesuatu jang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung djawab. (tajuk rencana Berita Yudha, 13 Maret 1966)*

Dalam konstelasi tugas-tugas yang diemban Angkatan Darat pada waktu, maka Angkatan Bersenjata juga mendukung dan memberikan

⁸⁷ Isi yang pokok dari SP 11 Maret itu ialah mengandung pemberian wewenang kepada Soeharto untuk „ mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksana- kan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

rekomendasi positif terhadap kebijakan yang diambil oleh pemegang Supersemar, termasuk dalam hal pembubaran PKI.

“...Pengumuman no 1 yang dikeluarkan oleh Letdjan Soeharto semalam atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Revolusi/Mandataris MPRS merupakan berita pertama yang menimbulkan harapan sebesar2nja dipenghujung minggu ini. Ia menandakan berachirnya kebatilan yang untuk sekian lama bersimaharadjalela dipersada tanah air dan merupakan titik tolak dari usaha yang sudah mendjadi djeritan hati nurani rakjat. Maka sudah tentu melebihi dari yang sudah2 para mahasiswa/pemuda/peladjar akan memberikan kerdjasamanya yang sebesar2nja denganABRI dalam merealisasikan tri-tuntutan rakjat itu. (editorial Angkatan Bersenjata, 12 Maret 1966)

Lebih lanjut, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan yang tidak stabil maka perlu dikeluarkannya isu pergantian atau pembaruan roda pemerintahan sipil yang ada waktu itu.

“...Revolusi harus berdjalan terus, bagaikan berputar ‘anjokro manggilingan’. Djebol bangun. Shape and reshape. Think and rethink. Semuanja diperlukan untuk menemukan bentuk2 yang paling tjotjok serasi bagai tepatnja, tjotjok dan akuratnja presisi mesin pabrik raksasa yang akan memproduksi masyarakat adil dan makmur....Gigi2 dari roda utama mesin pemerintahan Indonesia telah ditjopot. Ompong, tetap dapat berdjalan. Lebih kalau kita segera pesan roda utama yang baru dengan gigi2nja yang tepat menurut ukuran presisi mesin Revolusi Rakjat Indonesia. Bukan giginya harus banyak, tetapi tepatnja – tjotjoknya dan akuratnja dengan kebutuhan....” (editorial Angkatan Bersenjata, 23 Maret 1966)

“...Dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Revolusi/Mandataris MPRS tanggal 11 Maret 1966, Men/Pangad Letnan Jenderal Soeharto telah mengambil tiga matjam tindakan penting, yaitu pertama telah membubarkan dan melarang adanja Partai Komunis Indonesia serta organisasi2 mantelnja, kedua telah mengadakan pengamanan terhadap 15 orang Menteri dan ketiga telah menundjuk sebagian Menteri2 untuk bertugas merangkap sebagai menteri2 ad interim....Kita berkejakinan, bahwa yang dimaksud

dengan s u a s a n a b a r u, itu adalah tiada lain, yaitu kabinet baru. Kabinet jang dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Revolusi/mandataris MPRS Bung Karno dengan Pembantu2nja jang benar2 bersih dari segala noda dan tjatjad terhadap Negara dan Revolusi Pantja Sila. Tentunya Kabinet Baru itu segera akan dibentuk demi AMPERA (tajuk rencana Berita Yudha, 23 Maret 1966)

4.8.2.6. Frame: Krisis Kepemimpinan Politik Dan Kabinet Dwikora (Bagan XIV)

Problem Identification	Masalah yang menyertai krisis kepemimpinan Soekarno adalah ketidakstabilan politik yang mengakibatkan ketidaktertiban dan situasi yang buruk bagi keamanan nasional.
Causal Interpretation	Kalau mau lebih pendek, dapat dikatakan bahwa seluruh permasalahan Indonesia waktu itu adalah Partai Komunis Indonesia dengan ideologi komunismenya, Pemerintahan sipil Soekarno yang tidak memihak pada kepentingan kesejahteraan sosial, Presiden Soekarno sendiri dengan seluruh ajaran Nasakom dan praksis politiknya yang mendasarkan diri pada demokrasi terpimpin yang sangat berbau sosialisme
Moral Evaluation	Secara moral, krisis kepercayaan terhadap pemerintahan sipil Soekarno yang diakibatkan oleh sekian rangkaian krisis ekonomi, sosial dan politik menyebabkan delegitimasi kekuasaan Presiden.
Treatment Recommendation	Dalam konteks krisis kepemimpinan yang dialami oleh pemerintah sipil pimpinan Presiden Soekarno, sebetulnya posisi sudah jelas, yaitu menghendaki pembaruan dalam sistem pemerintahan.

4.8.2.7. Framing Pemulihan Politik Dan Ekonomi

Sebelum sampai pada pembahasan lebih lanjut perlu dipahami bahwa satu kekurangan penting pada masa krisis tersebut adalah bahwa program ekonomi pemerintah Soekarno mengalami kegagalan yang cukup berat. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan Presiden Soekarno tidak mencapai hasil yang diharapkan karena intrik dan sabotase dari kapitalis birokrat untuk menggagalkan program-program ekonomi tersebut.

Tindakan pemerintah Soekarno yang bersifat anti-imperialis dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan asing juga tidak membawa perbaikan ekonomi bahkan melahirkan kapitalis birokrat baru di kalangan Angkatan Bersenjata yang mengangkgangi perusahaan-perusahaan yang diambil alih dengan menggunakan kesempatan baik bagi mereka dengan adanya SOB (Staat van Oorlog en Beleg).

Dengan menempati kedudukan sebagai Presiden Direktur Perusahaan-perusahaan, perwira-perwira tinggi Angkatan Darat itu tidak hanya menjadi kelompok yang secara ekonomi, sosial dan politik berkecukupan, tetapi juga telah menjadi satu lapisan tersendiri yang mengangkgangi sektor-sektor penting ekonomi Indonesia. Dalam hubungan ini seorang sarjana Australia, Richard Robinson, dari Murdoch University mengatakan: Kapitalisme birokrat pada mulanya berhubungan erat dengan pertumbuhan perusahaan negara. Ketika

kepentingan perusahaan Belanda dinasionalisasi pada tahun 1957-1958, sebagian perusahaan itu berada di bawah kepentingan dan faksi militer.

Demikian dalam perkembangan selanjutnya, tingkat hegemoni militer dalam isu ekonomi semakin mengemuka. Terutama ketika terjadi masa transisi kekuasaan yang dilakukan oleh faksi militer Indonesia secara diam-diam. Pembungkahan isu politik dan ekonomi semakin jelas ketika Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam usaha pembungkahan isu politik dan ekonomi adalah sebagai berikut:

Identifikasi masalah. Secara umum, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha melihat bahwa permasalahan dan krisis negara pada waktu itu bersumber pada masalah ekonomi dan politik

“...arti penting jang khusus dari tanggal ini bukan tjuma terbatas dalam ungkapan kata, tapi dapat dilihat dengan mata, dirasakan dengan hati dan didengar dengan telinga oleh penduduk ibukota, selaku pusat dari kantjah perjuangan nasional. Pendeknja suasana hari Sabtu ini memantjarkan perasaan riang, legah, penuh harapan sesudah keluar pengumuman tentang keputusan Presiden/Pangti/Mandataris MPRS/PBR no. 1/3/1966 jang menetapkan pembubaran PKI termasuk semua bagian2 organisasinja dari pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi jang seazas/berlindung/bernaung dibawahnja, dan menjatakan PKI sebagai organisasi jang terlarang diseluruh kekuasaan NRI. Dengan ini tertjapailah point pertama dari trituntutan rakjat jang disuarakan oleh aksi2 mahasiswa/pemuda/peladjar yang tidak kenal gentar, tidak henti2nja dan membuat ketjut hati para orang tua setelah djatuh demikian banjaknyja korban jang sejogianja dapat dielakkan. Dengan berachirnya suasana ini sudah tentu semua orang tua mengutjapkan sjukur kepada Jang Maha Kuasa serta memohonkan hidajah selanjutnja untuk memperbaiki keadaan di segala bidang, terutama e k o n o m i....(editorial Angkatan Bersenjata, 13 Maret 1966)

Bahkan Berita Yudha dengan analisis ekonominya memperlihatkan masa-masa ekonomi politik yang dilakukan oleh Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan masalah yang sedemikian parah.

“...Sedjak tahun 1950 sampai saat ini, hubungan ekonomi luar negeri kita bisa dibagi dalam tiga masa, yaitu masa pertama berorientasi kuat ke Amerika Serikat, dimana orientasi kuat itu diachiri dengan meletusnja pemberontakan PRRI/Permesta. Masa kedua ialah orientasi ekonomi kita kuat ke Eropa Barat dan djuga dimulai dengan berorientasi ke Eropa timur. Masa kedua ini, berachir pada saat kita mulai melakukan konfrontasi terhadap projek nekolim “British Malaysia”. Masa Ketiga ia masa kita kuat berorientasi kepada negara2 sosialis, jang bisa dikatakan masa itu telah berachir setelah gagalnja G 30-S PKI untuk merebut kekuasaan negara RI...Dari tga masa jang telah kita lakukan seperti tersebut diatas, kesemuanja berachir dengan suatu tanda, jang sama, jaitu bahwa hubungan ekonomi luar negeri, baik jang berbentuk dagang biasa maupun jang berbentuk apa yang disebut “bantuan” jang telah dijalankan oleh negara2 jang menjebut dirinja telah madju atau sosialis terhada negara kita, selalu berachir di saat kepentingan tudjuan politik internasionalnja terganggu oleh situasi politik di Indonesia. Jadi pada dasarnya negara2 tersebut, baik jang menjebut dirinja sosialis, apalagi negara2 jang kita sebut kapitalis, sama2 mendjalankan hubungan ekonominja dengan kita, berdasar kepada pemikiran senang atau tidak senang dan bukan atas dasar untung – rugi setjara dagang (tajuk rencana Berita Yudha, 23 April 1966)

Pemikiran bahwa politik sebagai panglima dalam menjalankan pembangunan Indonesia disebut sebagai pemikiran yang pada akhirnya menyengsarakan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri.

Interpretasi Penyebab. Masalah kebobrokan ekonomi politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari soal pilihan mendasar pemerintahan sipil Soekarno yang terlalu menekankan iklim dan pilihan politik demi kepentingan politik kepentingan Orde Lama waktu itu. Politik Orde Lama yang mengisolasi diri

dari dunia dengan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, politik konfrontasi dengan Malaysia (nota: Malaysia adalah negara tetangga terdekat setelah Singapura) yang jelas menghamburkan dana jutaan rupiah, politik mercu suar dengan menyelenggarakan GANEFO, CONEFO, pembangunan monumen-monumen yang secara langsung tidak berhubungan dengan kesejahteraan rakyat dan masih banyak lagi.

Hal ini tercermin dalam headline Berita Yudha tanggal 7 Mei 1966 yang berbunyi “Dulu setiap tindakan Pemerintah dinilai dengan ukuran idiologi dan politik. Ada kecenderungan dalam pembentukan opini dalam masyarakat bahwa pembangunan dan pemulihan ekonomi menjadi sasaran utama pembangunan di Indonesia selanjutnya.

“...Selama ini kita selalu dibajangi oleh adanya kesukaran2 ekonomi, sebagai akibat politik yang keliru dan inflasi yang intensif. Bukan saja politik yang keliru dan inflasi yang intensif, tetapi oleh ‘pengkeliruan’ dan ‘peng-intensifan’ inflasi oleh para pembela2 gelap Gestapu/PKI. Mereka itu para durno – tjetjunguk – benalu revolusi, memang sengadja mengatjaukan tata-kehidupan politik dan ekonomi. Memudarkan pamor dan melunturkan kewibawaan pemerintah dan negara untuk kemudian menampilkan ‘pemain’ baru sebagai tokoh ‘pahlawannya’. Kebedjatan iktikadnja adalah taktik memelaratkan rakyat sebagai wahana untuk mendapatkan supremasi politik...(editorial Angkatan Bersenjata, 5 April 1966)

“...Demikian djuga keharus yang menjadi pegangan Pemerintah kita sekarang, jaitu dalam hubungan ekonomi Luar Negeri harus bebas dari segala matjam ikatan politik yang akan menggagalkan tudjuan ekonomi berdikari kita...(tajuk rencana Berita Yudha, 23 April 1966)

“...Kita tidak dinina-bobokkan dengan sembojan2 serta berita2 kosong, seperti djaman Orde Lama, di mana Ir. Sukarno dengan mensitir D.N. Aidit mengatakan bahwa Indonesia tjukup sandang-pangan, bahkan

petani² disawahnja menembok tanggul jang bobol dengan ketela, djuga tidak dibakar semangat kita dengan sembojan kosong seperti utjapan Ir. Sukarno bahwa kalau perlu 'kita harus berani makan batu' sementara segelintir pemimpin bergelimang kemewahan duniawi jang tak ada batas" (editorial Angkatan Bersenjata, 20 Agustus 1968)

Evaluasi Moral. Pemulihan ekonomi dan sosial-politik Indonesia pasca peristiwa G 30-S dan krisis legitimasi Soekarno berikut ajaran-ajarannya merupakan keharusan moral elit Indonesia baru. Secara etis, penilaian dalam perspektif bingkai Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha mempunyai dua ragam perspektif. Perspektif pertama adalah bahwa pemulihan ekonomi dan politik merupakan perspektif moral konstruktif yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia.

"...Menanggulangi kesulitan beban hidup rakjat dalam masalah sandang-pangannja adalah masalah urgent. Djor²-an berbuat pada setiap segi kehidupan jang positif untuk ngruwat papasengsara rakjat. Tinggalkan 'band-wagon policy' – gedobangan serpti lion barongsay – semasa prolog Gestapu/PKI dahulu. Sekarang ini djamannja aksi. Aksi penurunan harga² setjara serentak adalah terpujji. Tetapi mengadakan rapat² raksasa untuk menanggulangi kesengsaraan hidup rakjat dewasa ini adalah menggelikan. Sekarang adalah waktunya 'kerik lampit brungkat kimpul, tjantjut gumregut' terdjun kemedan djuang melawan kesulitan sandang pangan rakjat seperti jang diserukan oleh Letdjen Soeharto..." (editorial Angkatan Bersenjata, 25 Maret 1966)

Dalam konteks moral etis di atas maka sebetulnya, Angkatan Bersenjata memberikan penekanan isu etis untuk memulai langkah baru, sekaligus meminggirkan pengalaman pengelolaan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat.

"...Menurut urutan prioritasnya, maka politik perekonomian jang hendak didjalankan pemerintah sekarang adalah berdasarkan atas kenjataan²

objektif dalam masyarakat kita dewasa ini. Permulaan yang baik adalah setengah kemenangan. Meskipun demikian, memang harus diinsjafi benar, bahwa pada akhirnya tergantung pada kita sendiri, sukses atau gagalnja pemulihan ekonomi, stabilisasi dan pembangunan kita...”(editorial Angkatan Bersenjata, 5 April 1966)

Rekomendasi. Penilaian moral etis dalam sektor politik ekonomi kerakyatan menimbulkan rekomendasi bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan yang segera harus dituntaskan, persoalan ekonomi merupakan soko guru perbaikan situasi nasional, persoalan ekonomi menjadi pertimbangan utama pembangunan nasional setelah peristiwa G 30-S, persoalan ekonomi menjadi dasar legitimasi kepemimpinan yang ditawarkan oleh faksi militer, khususnya Angkatan Darat.

“... Untuk mentjapai ini, tepat sekali apa yang telah dinjatakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX, bahwa dewasa ini harus ditjiptakan suasana baru lebih dulu yang bersih dari unsur2 ‘G30S/PKI’ dan bekerdja untuk kepentingan rakjat, chususnja di bidang sandang pangan dan pembangunan daerah...”(tajuk rencana Berita Yudha, 23 Maret 1966)

“...Dengan demikian dapat diredusir gerilja politik, gerilja ekonomi, maupun psy-war dari manapun datangnja. Baik yang dari nekolim maupun yang dari kontrev. Ini adalah satu tjara mempersiapkan rakjat setjara mental-ideologis bagi penanggulangan kesulitan ekonomi warisan para durno dan tjetjunguk revolusi...”(editorial Angkatan Bersenjata, 25 Maret 1966)

“...Bahwa Presiden telah menggunakan 40% dari seluruh pidato kenegaraannja untuk membitjarakan masalah stabilisasi-ekonomi, itu menundjukkan dengan sungguh2 bahwa Pak Harto mengadjak kita untuk menumpahkan seluruh kekuatan dan perhatian kita pada program ekonomi, rekonstruksi-nasional, pembangunan nasional...Orde kita dewasa ini harus segera memasuki orde pembangunan...”(editorial Angkatan Bersenjata, 20 Agustus 1968)

4.8.2.8. Frame: Pemulihan Politik dan Ekonomi (Bagan XV)

Problem Identification	bahwa permasalahan dan krisis negara pada waktu itu bersumber pada masalah ekonomi dan politik.
Causal Interpretation	Masalah kebobrokan ekonomi politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari soal pilihan mendasar pemerintahan sipil Soekarno yang terlalu menekankan iklim dan pilihan politik demi kepentingan politik kepentingan Orde Lama waktu itu. Penyebab lain adalah kesalahan dalam mengelola sumber-sumber ekonomi politik Indonesia waktu itu.
Moral Evaluation	Pemulihan ekonomi dan sosial-politik Indonesia pasca peristiwa G 30-S dan krisis legitimasi Soekarno berikut ajaran-ajarannya merupakan keharusan moral elit Indonesia baru.
Treatment Recommendation	bahwa persoalan ekonomi merupakan persoalan yang segera harus dituntaskan, persoalan ekonomi merupakan soko guru perbaikan situasi nasional, persoalan ekonomi menjadi pertimbangan utama pembangunan nasional setelah peristiwa G 30-S, persoalan ekonomi menjadi dasar legitimasi kepemimpinan yang ditawarkan oleh faksi militer.

4.9. Analisis Intertekstualitas

Dalam kerangka teoritis sudah disebutkan bahwa salah satu unsur dalam perwacanaan penelitian ini terletak pada soal keterkaitan antar teks, terutama di dalam teks mikro. Setiap rangkaian teks media dilihat sebagai rantai komunikasi yang tidak terpisah satu dengan yang lain.

Dalam penelitian harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha terlihat bahwa kedua harian tersebut memakai rangkaian komunikasi sebagai langkah pembingkaihan isu atau topik yang ditawarkan kepada masyarakat. Tentunya, masalah intertekstualitas dapat dilihat dalam aspek *manifest intertextuality*. Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan mengapa kedua harian tersebut mempunyai dan meletakkan kerangka beritanya dalam kesatuan rangkaian komunikasi.

Pertama, alasan pendirian kedua harian tersebut sebagai harian yang dimaksudkan untuk menandingi wacana yang banyak dikembangkan oleh harian atau media massa yang berafiliasi ke faksi komunis. Seperti yang diketahui adalah bahwa ketika faksi komunis berada di puncak kekuasaan dan mempunyai kedekatan dengan elit pimpinan sipil Indonesia maka faksi komunis tidak jarang untuk mengeliminasi atau mengurangi ruang gerak kelompok anti komunis. Bahkan ketika peristiwa G 30-S terjadi dan “Harian Rakjat” memberitakan dan mendukung gerakan tersebut dalam kolom editorialnya:

“Tepat tanggal 30 September telah dilakukan tindakan penyelamatan terhdap diri Presiden Sukarno dan RI dari kup apa jang dinamakan Dewan Djendral. Menurut apa yang diumumkan oleh Gerakan 30 September jang dikepalai oleh Letkol. Untung dari Bataljon Tjakrabirawa penyelamatan diri Presiden Sukarno dan RI dari kup Dewan Djendral adalah tindakan jang patriotik dan revolusioner...Dukungan dan hati rakjat sudah pasti dipihak Gerakan 30 September. Kita serukan kepada seluruh Rakjat untuk mempertadjam kewaspadaan dan siap menghadapi segala kemungkinan...”(editorial Harian Rakjat, 2 Oktober 1965)

Dalam waktu yang tidak berselang jauh dari tanggal 2 Oktober 1965, Berita Yudha langsung memberikan reaksi balik sebagai tanda wacana alternatif yang mau tidak mau harus diperhatikan oleh masyarakat.

“...Dengan demikian dapat kita njatakan bahwa mereka telah menuduh orang lain akan melakukan coup, padahal mereka sendirilah jang telah melakukan coup dengan membentuk apa jang mereka sebut ‘Dewan Revolusi Indonesia’ tanpa Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, dan telah mendemisionerkan kabinet Dwikora jang dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno....Perlu kita njatakan bahwa dalam tubuh Angkatan Darat tidak ada apa jang mereka sebut Dewan Djendral dan dituduh akan melakukan coup pada saat mendjelang 5 Oktober. Sebab kalau benar ada apa jang mereka sebut Dewan Djendral pasti Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi bertindak membubarkannja dengan cara biasa, jang pasti sepenuhnya dipatuhi oleh segenap anggauta TNI/AD...” (tajuk rencana, 4 Oktober 1965)

Kedua, alasan yang sangat mendasar untuk menjelaskan rangkaian komunikasi Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah bahwa kedua harian tersebut menjadi corong atau juru bicara faksi militer bagaimana Angkatan Darat pada khususnya dan Angkatan lainnya pada umumnya. Gambaran umum tentang matinya tujuh perwira Angkatan Darat, sebagaimana halnya masyarakat pembaca di Indonesia tahun 1965, harus banyak bersandar pada apa yang diberitakan oleh dua surat kabar tentara, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, serta dinas informasi ABRI yang memasok surat kabar-surat kabar tersebut. Walaupun ada beberapa surat kabar non-militer yang tetap terbit, namun pers kiri telah ditindas pada petang hari tanggal 1 Oktober. Radio dan televisi yang dikuasai negara, dan telah ada di tangan militer sepenuhnya

menjelang 1 Oktober. Hal ini menyusul dengan pengumuman dari Panglima Pelaksana Ketertiban dan Keamanan Daerah pada pelaku media massa agar penerbitan mereka berada di bawah dan kontrol militer.

Angkatan Bersenjata memuat beberapa buah foto kabur mayat-mayat yang telah membusuk. Berita Yudha yang selalu lebih garang, mengatakan bahwa mayat-mayat itu penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. Bukti-bukti tentang penyiksaan ini ditunjukkan dengan adanya luka-luka pada leher dan mukanya, dan kenyataan bahwa anggota-anggota tubuhnya tidak sempurna lagi.

Pada titik tertentu, Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha pada awalnya menjadi alat penyebaran ideologi kelompok, dalam hal ini adalah ideologi kelompok Angkatan Darat. Tentunya peristiwa politik akan menjadi peristiwa militer yang akan ditarik dalam bahasa dan hukum militer atau serangkaian hukum militer yang kaku.

Ketiga, dapat dikatakan bahwa Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha memegang peranan penting dalam menginformasikan kejadian-kejadian yang berskala nasional, terutama setelah peristiwa G 30-S. Dalam situasi krisis, faksi militer secara aktif dan agresif menyediakan sumber-sumber informasi yang “patut” diketahui oleh masyarakat. Nilai kepatutan tentu saja dipengaruhi oleh tata nilai dan prioritas pemberitaan yang memang memuat kepentingan militer,

baik sebagai alat penyebaran pesan dan proses penataan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat maupun sebagai alat ideologi kelompok.

Dari ketiga alasan di atas dapat terlihat memang terjadi intertekstualitas dalam teks media Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, baik sebagai sebuah entitas media massa terpisah maupun sebagai kelompok media massa yang menjadi corong atau juru bicara kepentingan militer, khususnya Angkatan Darat.

Ada beberapa unsur yang terlihat dalam proses intertekstualitas. Pertama yang sangat terlihat adalah jenis pengandaian (*presupposition*). Intertekstualitas jenis ini lebih banyak melihat proposisi teks yang diterima oleh pembuat teks yang siap ditempatkan sebagai sesuatu yang dipandang benar dan ditempatkan dalam organisasi teks secara keseluruhan.

“...Dengan diumumkannya Pengumuman no. 1/Pres/1966 semalam, semakin jelaslah bagi kita keadaan situasi yang kita hadapi dewasa ini, terutama dalam hubungan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS dengan Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966 yang ditujukan kepada Men/Pangad Letnan Jenderal Soeharto...”(tajuk rencana Berita Yudha, 17 Maret 1966)

Editorial di atas jelas mengacu pada teks lain setidaknya teks pengumuman Presiden no 1 tahun 1966 yang berisi tentang instruksi Presiden Soekarno kepada Men/Pangad waktu itu untuk segera memulihkan keadaan. Presuposisi tersebut mempengaruhi opini publik yang tergalang untuk memberikan dukungan atau setidaknya memberikan legitimasi terhadap segala

tindakan yang mengacu pada surat keputusan atau pengumuman Presiden tersebut. Hal itu juga sama ketika Berita Yudha juga mengajukan presuposisi terhadap peristiwa G 30 S dalam tajuk rencananya tanggal 4 Oktober 1965. Dalam presuposisi tersebut, Berita Yudha mengacu pada peristiwa tanggal 1 Oktober 1965 atau bahkan editorial Harian Rakjat yang terbit tanggal 2 Oktober 1965 atau pengumuman dari media lain.

“...Tanggal 1 Oktober 1965 pagi, kita segenap Rakjat Indonesia dan tentunja djuga seluruh dunia dikedjutkan oleh adanya siaran berita dari Radio Republik Indonesia studio Djakarta jang mengumandangkan suara dari apa jang menamakan dirinja ‘Gerakan 30 September’...(tajuk rencana, 4 Oktober 1965)

Model presuposisi lain yang cukup menonjol dari Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah pengajuan kebenaran sebuah editorial atau tajuk rencana dengan mengacu pada editorial atau tajuk rencana yang diterbitkan sebelumnya.

“...Dalam tadjuk rentjana “Yudha” tanggal 13 kemarin telah disebutkan, bahwa Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS kepada Men/Pangad Letnan Jenderal Soeharto berisi lima pokok...” (tajuk rencana Berita Yudha, 14 Maret 1966)

Kedua, dalam konteks intertekstualitas juga terlihat bahwa Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata melakukan representasi wacana. Representasi wacana ini terlihat dengan rujukan pada istilah bagaimana sebuah peristiwa dilaporkan kepada khalayak.

Ada beberapa ragam representasi peristiwa yang digambarkan oleh Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Tipe pertama adalah tipe posisi pertama dalam hal pelaporan peristiwa atau pihak yang terlibat langsung dalam peristiwa tertentu. Tajuk rencana Berita Yudha pada tanggal 4 dan 7 Oktober 1965 merupakan contoh paling jelas bahwa harian tersebut mengambil posisi sebagai bagian yang terlibat langsung dalam usaha menolak dan mengingkari gerakan 30 September. Tipe kedua adalah tipe posisi kedua di mana Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata menempatkan diri sebagai person kedua jamak. Dalam setiap tajuk atau editorial, terutama yang berkaitan dengan faksi komunis atau faksi orde lama maka kedua harian akan mengambil posisi sebagai person kedua jamak, yaitu KITA. Ini menandakan bahwa kedua harian mengambil posisi dirinya sebagai pihak yang sama dengan masyarakat atau kelompok yang anti dengan faksi komunis.

“...Tugas kita selanjutnya dalam rangka mengikis habis sama sekali, apa yang menamakan dirinya ‘Gerakan 30 September’, kita sepenuhnya tunduk dan patuh kepada segala ketentuan yang digariskan oleh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melaksanakannya tanpa reserve...”(tajuk BY, 4 Oktober 1965)

Tipe ketiga adalah bahwa kedua harian mengambil sikap sebagai pihak ketiga jamak untuk semakin mempertajam kubu atau bipolarisasi dalam masyarakat.

Cara lain dalam proses representasi wacana yang dikembangkan oleh Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata adalah mengambil bentuk kutipan

orang lain, hasil seminar, kutipan dari majalah asing dan lain-lainnya. Tentunya teknik ini dipakai untuk memperkuat argumentasi yang hendak atau sudah dibangun dalam tajuk atau editorial.

“...Beberapa pers Barat menanggapi keadaan Indonesia dewasa ini setjara negatif. Madjalah “News Week” baru2 ini misalnja menjandjikan pada para pembatjanja, bahwa keadaan Indonesia dewasa ini tidak lebih dan tidak kurang presis sama seperti djaman orde lama ketika dipimpin oleh ‘Presiden Soekarno’. Kalimatnja kira2 demikian: ‘dulu Presiden Soekarno, sekarang Presiden Soeharto, tetapi keadaannja sama sadja...”(editorial Angkatan Bersenjata, 7 Agustus 1968)

“...Presiden Soeharto mengadjak kita melihat realitas ! Pidatonja didepan DPRGR tanggal 16 Agustus kemarin memang pandjang, 83 halaman diutjapkan selama 3 jam. Pidato kenegaraan jang lain daripada jang lain, karena barangkali amat mendetail, jang berbeda dengan pidato2 jaman orde lama...” (editorial Angkatan Bersenjata, 20 Agustus 1968)

“...HARAPAN itu ibunja pikiran’, demikian sebuah pernyataan di Eropa. Tidak sedikit orang jang terketjoh oleh fakta dalam sessi dalam sebuah perkara dimedja pengadilan seringkali diberikan kesaksian jang berbeda-beda...” (editorial Angkatan Bersenjata, 31 Juli 1967)

“...Heraclitus, jang kemudian dijadikan teori relativisme Einstein mengatakan, bahwa “Tidak ada sesuatu jang selalu boleh dikatakan salah, sebagaimana tidak ada pula sesuatu jang selamanya benar....” (editorial Angkatan Bersenjata, 18 Januari 1966)

Bentuk ketiga dari jenis intertekstualitas dalam harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah bentuk negasi. Bentuk negasi dalam proses intertekstualitas adalah bentuk kalimat negasi yang banyak digunakan untuk tujuan polemik. Kalimat negasi dalam beberapa teks tertentu mengandaikan negasi pada teks yang lain. Seperti ketika Berita Yudha menegasi tuduhan

Harian Rakjat yang menyatakan bahwa dalam Angkatan Darat terdapat Dewan Jenderal

“...Perlu kita njatakan, bahwa dalam tubuh Angkatan Darat t i d a k a d a apa jang mereka sebut ‘Dewan Djenderal’ dan dituduh akan melakukan coup pada saat mendjelang 5 Oktober...” (tajuk rencana Berita Yudha, 4 Oktober 1965)

Polemik yang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha tidak hanya sekedar dalam tataran isu untuk menghantam komunisme di Indonesia, melainkan juga untuk mengembangkan isu-isu (isu persoalan intern Angkatan Darat, isu kudeta yang dilakukan menyusul diterbitkannya SP 11 Maret, isu ekonomi) yang lain.

*“...Peristiwa 1 Oktober 1965 jang dilakukan oleh mereka jang menamakan dirinja ‘Gerakan 30 September’, t i d a k d a p a t kita terima pendapat sementara orang jang menjebut bahwa peristiwa tersebut adalah semata-mata persoalan intern Angkatan Darat...Dari bukti2 jang kini telah tertangkap oleh operasi keamanan ABRI, djelas menundjukkan bahwa kesemuanja **b u k a n l a h** hanya semata-mata persoalan intern Angkatan Darat...”(tajuk rencana Berita Yudha, 7 Oktober 1965)*

“...Mungkinkah dewasa ini ada kudeta ? Sudah terang Tidak ! Suatu kudeta akan berhasil kalau dilakukan dalam iklim ‘dvoevlastie’, dalam iklim dwi kekuasaan atau dwi kedaulatan, kalau dalam masarakat kita sedang berlaku dua kekuasaan jang saling bersaing atas satu masarakat. Dalam negeri manapun djuga, seperti jang dapat kitalihat dalam sedjarah dunia, maka dalil di atas tetap berlaku (editorial Angkatan Bersenjata, 16 Maret 1966)

*“...Gigi2 dari roda utama mesin pemerintahan Indonesia telah ditjopot. Ompong, tetapi dapat berdjalan. Lebih baik kalau kita segera pesan roda utama jang baru dengan gigi2nja jang tepat menuru ukuran precisi mesin Revolusi Rakjat Indonesia. **Bukan giginja jang harus banjak, tetapi tepatnja – tjotjoknja dan akuratnja dengan kebutuhan...**”(editorial Angkatan Bersenjata, 23 Maret 1966)*

*“...Pidato kenegaraan jang lain daripada jang lain, karena barangkali amat mendetail, jang berbeda dengan pidato2 djaman orde lama jang bombastis, penuh agitasi politik, diutjapkan dengan sangat berapi-api bahkan berteriak-teriak, maka pidato kenegaraan Presiden Soeharto tersebut **tidak diutjapkan dengan gaya seorang bombast, bahkan boleh disebut tidak menggunakan ketentuan2 retorika yang konvensional..**”
(editorial Angkatan Bersenjata, 20 Agustus 1968)*

Bentuk keempat dari intertekstualitas yang jelas dalam harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah metadiskursus. Ragam keempat ini membuat sebuah teks ada pada tingkatan yang berbeda dan membuat jarak teks tertentu dengan tingkat teks yang lain. Dapat dikatakan bahwa metadiskursus adalah penampilan pembicara teks dalam situasi yang dominan dan memposisikan objek pada kelompok yang tidak dominan atau menjadi objek yang didefinisikan.

Pemberian definisi secara sepihak sering dilakukan Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Media-media ini menyebut kelompok komunis yang mencoba memberontak dengan sebutan GESTAPU (gerakan September 30) yang merujuk pada kelompok intel kejam jaman Nazi Jerman, atau kelompok kontra revolusioner (kelompok yang mengkhianati revolusi Indonesia). Media massa yang berafiliasi dengan militer ini juga menyebut politikus sipil simpatisan komunis dengan sebutan “para durno” atau kelompok durnoisme. Tidak jarang media Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha menyebut kelompok era Soekarno sebagai Orde Lama yang bobrok.

“...Biarkanlah kum kontra revolusi berteriak2 ! Biarkanlah kaum Nekolim memekik2 ! bagaimanapun djuga teriakan dan pekikan mereka hanja ‘vox clamantis in deserto’ hanya teriakan dipadang pasir, teriakan jang sia2...”(editorial Angkatan Bersenjata, 22 Maret 1966)

“Roda pemerintahan kini telah mulai berputar kembali. Gigi2 roda utama jang telah aus berkarat berupa durno2 dan tjetjunguk telah terpaksa dikikir tjopot....Kebaikan selalu jang dikehendaki dan kedjahatan selalu jang diperdapat. Kedjahatan fitnah – hasut – adu domba – putar balik jang dilakukan oleh kaum durno dan benalu revolusi...(editorial Angkatan Bersenjata, 23 Maret 1966)

“...Sekarang, didjaman kekuasaan orde baru sisa2 Gestapu PKI masih menjakini chajalannja jang disangkanya fakta, bawah TNI/ABRI adalah musuhnja jang pertama...(editorial Angkatan Bersenjata, 31 Juli 1967)

4.10. Diskusi Dan Elaborasi

Dari analisis makro, meso dan mikro yang sudah dilakukan ada beberapa diskusi yang perlu dipertimbangkan ketika mau memahami dinamika media berikut dengan berbagai macam kompleksitas yang ada dalam harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.

Pertama, pola pembingkai dalam serial editorial dan beberapa teks utama yang ada dalam Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata memakai pola alterasi-konflik-negasi- dan legitimasi. Dalam arti, bahwa pola pembingkai teks media yang dilakukan melalui beberapa bingkai konflik terhadap PKI sebagai konflik terhadap ideologi sosialisme-komunis, bingkai konflik terhadap sistem pemerintahan sipil yang korup dan secara moral tidak legitim lagi, bingkai penyadaran pemulihan ekonomi sebagai usaha melegitimasi proses kapitalisasi Indonesia sekaligus mendelegitimasi praktek ekonomi yang

terlalu percaya pada diri sendiri, bingkai delegitimasi kekuasaan kepresidenan yang tidak dilakukan secara frontal tapi mengerosi sumber-sumber legitimasi sosial politik Presiden Soekarno, bingkai pembangunan ekonomi yang lebih pragmatis demi kepentingan rakyat.

Dalam konteks ideologisasi, jelas pola pemingkiaan di atas telah melakukan apa yang disebut dengan konteks interpelasi atau tindakan penyapaan. Interpelasi dalam Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha menempatkan posisi faksi militer sebagai faksi yang berkepentingan untuk memperbaiki situasi yang krisis di satu sisi, tapi juga menempatkan faksi kekuatan lawan (dalam hal ini Presiden Soekarno, faksi komunis, faksi politikus sipil yang oportunis) sebagai faksi yang jelas mengkhianati mandat atau kepercayaan atas kekuasaan yang diberikan rakyat kepada mereka.

Maka tidak mengherankan apabila interpelasi dalam pola pemingkiaan media Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha juga memberikan konteks delegitimasi yang berakibat peminggiran atau penyingkiran secara politik-ekonomi sekaligus juga memberikan konteks legitimasi sosial yang berakibat inklusi kekuasaan secara hegemonik pada faksi militer, khususnya Angkatan Darat.

Kedua, masalah ideologisasi yang tersirat dalam proses pemingkiaan ternyata tidak melulu memperlihatkan perlawanan terhadap ideologi komunisme. Tapi juga proses tarik ulur mendefinisikan warna kapitalisme di

Indonesia. Dalam teks-teks yang ada dalam editorial atau sering terjadi pandangan negatif terhadap kapitalisme liberal, padahal di sisi lain, jelas dikatakan bahwa Indonesia dinyatakan tergantung pada konteks kapitalisme global. Ini berarti bahwa bahwa wacana ideologi yang dibingkai atau diseleksi oleh kedua harian tersebut bukan wacana yang bersifat bipolaristik tapi juga di sana-sini ditunjuk secara jelas pertarungan wacana ideologi kapitalistik itu sendiri. Setidaknya yang terlihat adalah wacana kapitalisme global dengan wacana kapitalisme birokratik nasional.

Arena berita yang tidak bipolaristik menjadikan Angkatan Bersenjata dan Berita berkesan belum menemukan proses identifikasi ideologi yang matang. Hal ini bisa dipahami karena situasi ekonomi politik Indonesia sendiri yang masih belum terbentuk secara lebih matang.

Ketiga, masalah yang selalu menjadi bahan diskusi dalam isi media adalah soal objektivitas pemberitaan. Dari sekian pembungkaihan yang dilakukan oleh kedua harian faksi militer, terlihat bahwa nilai objektivitas perlu didiskusikan lebih mendalam, terutama ketika harus merumuskan objektivitas realitas dalam waktu krisis. Objektivitas pemberitaan yang diangkat oleh Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata mempunyai beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan.

Objektivitas situasi krisis akan sangat ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa atau setidaknya yang mempunyai akses yang luas terhadap

penyebaran arus informasi. Maka yang perlu dilihat adalah sejauh mana Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata merekonstruksi objektivitas pemberitaan yang ada. Ada sejumlah fakta yang memang memenuhi syarat kalau disebut sebagai realitas yang objektif. Tapi masalahnya adalah ketika objektivitas tersebut “dimanfaatkan” untuk mengusung kepentingan subjektif kelompok atau ideologi tertentu.

Situasi krisis memaksa untuk mempunyai kecepatan pengambilan keputusan. Dan ini adalah hal yang persis dituju oleh kedua harian tersebut. Dengan ideologi objektivitas pemberitaan tapi dibungkus dengan monopoli pemberian informasi, maka kedua harian tersebut masuk dalam proses kognisi sosial masyarakat. Sistem kognisi masyarakat dibuat sedemikian rupa terhegemonik sehingga menyetujui begitu saja, tanpa disadari dan kritis, sebagian besar informasi yang dipasok oleh Pusat Penerangan Militer.

Lepas dari seluruh permasalahan objektivitas dan proses ideologisasi media pada waktu itu, ada hal lain yang masih menjadi rantai terputus dalam proses interaksi antara media massa, militer dan ideologi kapitalisme waktu itu. Hal itu adalah bagaimana proses percakapan redaksional yang biasa dilakukan oleh para awak media. Proses pemingkaian tidak bisa lepas begitu saja dengan soal profesionalisme wartawan.

Pertimbangan ekonomi politik sangat mewarnai konteks proses pemingkaian teks media, terutama ketika kedua harian tersebut dipakai untuk

melegitimasi ideologi baru dan mendelegitimasi ideologi yang sudah bangkrut. Dalam hal ini, kedua harian tersebut telah berhasil membuat ruang konsensus sosial terhadap isu-isu tertentu. Keberhasilan ini tidak berhenti begitu saja tapi pembungkaman tersebut juga membuat ruang kontroversi dan menentukan ranah penyimpangan dalam wacana yang berkembang dalam masyarakat dan sejarah Indonesia. Keterbatasan oplah media dan kertas surat kabar tidak menutup efektivitas kedua harian tersebut dalam membentuk wacana legitimasi dan delegitimasi. Penelitian ini mencoba membuka pada pemikiran bahwa efektivitas kedua harian tersebut disebabkan pula oleh pola komunikasi dua tahap dan tradisi lisan yang masih menghinggapi sebagian besar masyarakat Indonesia pada waktu itu.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata media massa bisa terjebak pada situasi di mana media massa dipaksa untuk menjadi media massa patriotik. Terutama dalam situasi krisis, jurnalisme media massa bisa tergoda untuk masuk pada tataran *embedded journalism* demi mengejar tuntutan objektivitas pemberitaan. Tapi masalahnya adalah sejauh mana jurnalisme media massa tetap mengambil jarak dalam merekonstruksi pemberitaan yang sangat diokupasi dengan pertimbangan-pertimbangan keamanan dan ketertiban. Pembungkaman yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha merupakan contoh paling jelas dan kasar dari penerapan atas apa yang disebut *embedded journalism*, terutama dalam konteks komunikasi krisis.

Diskusi lainnya adalah makna kebebasan pers itu sendiri. Dari beberapa pendapat dan anggapan yang berkembang pada para agen media menyebutkan bahwa periode tahun 1965 sampai 1968 adalah periode bulan madu media dengan pemerintah Indonesia waktu itu. Yang perlu didiskusikan adalah apakah memang terjadi hubungan yang serasi antara media massa dengan rejim penguasa waktu itu ? Memang benar bahwa beberapa pers Indonesia mengalami hubungan yang harmonis dengan rejim kepentingan tapi masalahnya ada trade off yang harus pers bayar, yaitu loyalitas dengan rejim militeristik waktu itu. Masalahnya adalah kontrol pers dari militer yang sedemikian kuat. Apalagi dengan kebijaksanaan “uang ketat” yang dilakukan oleh rejim baru waktu itu dalam rangka pemulihan ekonomi yang carut marut. Apabila segala macam sumber informasi dimanfaatkan untuk memulihkan keamanan dan krisis sosial politik oleh pihak militer maka pers harus membayar kebebasan persnya untuk turut “membantu” proses pemulihan tersebut. Di mana persis posisi kebebasan pers dalam konteks komunikasi krisis ? Hal ini bisa menjadi bahan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melalui penelitian teks media yang memakai analisis wacana kritis, terlihat bahwa memang harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha melakukan pembungkusan serta pembingkai pesan legitimasi - delegitimasi sosial-ekonomi dan politik Indonesia tahun 1965 sampai 1968.

Ada beberapa kesimpulan umum yang bisa ditarik dari seluruh konstelasi konteks dan teks yang diperoleh dalam penelitian. Pertama, bahwa proses pembingkai isu dan topik yang berpengaruh pada opini publik masyarakat Indonesia waktu itu sangat dipengaruhi oleh proses legitimasi ideologi baru. Dalam proses legitimasi ideologi baru, maka terdapat bahwa Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha membingkai kerangka ideologi. Setidaknya ada kesan bahwa pola ideologisasi media massa melalui proses ideologisasi kelompok kemudian menjadi alat represif ideologisasi dan pada akhirnya media tersebut menawarkan ideologi negara. Dalam hal ini, pertarungan legitimasi dan delegitimasi ideologi tidak terbatas pada ideologi kapitalisme dengan sosialisme-komunis tapi juga pertarungan legitimasi kapitalisme global dengan kapitalisme nasional-birokrat yang sangat mewarnai sistem dan struktur ekonomi Indonesia.

Kedua, sangat jelas bahwa Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha menggunakan strategi penyeleksian isu, taktik pencarian sumber masalah yang sering dimunculkan dalam bentuk pengkambinghitaman kelompok tertentu, penonjolan akibat destruktif masalah yang bersangkutan, penilaian moral yang selalu menyertai akibat dan rekomendasi tindakan penyelesaian yang sangat berpihak pada kelompok kepentingan.

Ketiga, strategi pembingkaian kedua harian militer rupanya mengarahkan opini publik dalam tiga ragam strategi antara, yaitu strategi opini, strategi kontroversi dan strategi moral. Strategi opini lebih mau menyatakan bahwa pembingkaian kedua harian tersebut mengarahkan opini yang di satu sisi melakukan pembusukan kepada kelompok komunis atau kelompok kontra revolusi tapi di lain pihak menggiring opini bahwa kelompok militer (faksi Soeharto) merupakan kelompok “penyelamat” masyarakat. Strategi kontroversi mau menyatakan bahwa pembingkaian kedua harian tersebut menarik dua kutub yang berlawanan, yaitu kelompok “baik” (kelompok Angkatan Darat, masyarakat) dan kelompok lawan atau kelompok “jahat” yang menyebabkan kesengsaraan dan kekacauan. Strategi moral mau menyatakan bahwa kedua harian mengarahkan nilai, cara pandang, sistem nilai dan ideologi tertentu.

Dalam wacana makro, jelas berkaitan dengan situasi kesejarahan, terutama struktur makro politik ekonomi yang terikat dan mengikat praktek

wacana teks media terutama teks yang diproduksi oleh harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.

Pertama adalah implikasi dalam bentuk strategi komunikasi yang digunakan oleh kedua harian tersebut dalam situasi peralihan atau krisis. Bentuk pemberitaan yang ditayangkan atau dimunculkan sebagai wacana publik merupakan bentuk otoriterianisme informasi. Bentuk otoriterianisme informasi tersebut dilegitimasikan oleh wilayah publik, di mana publik sendiri “membenarkan” wacana legitimasi dan delegitimasi.

Dalam perspektif ini, terlihat secara jelas bahwa publik tidak menentang atau mengingkari nilai berita karena nilai aksi dan moralitas publik dicerminkan atau direpresentasikan dalam sifat otoriter militeristik yang hegemonik. Ada dua hal yang bisa dilihat dalam konstelasi implikasi ini. Satu, publik merasakan “pembebasan” opini publik yang diangkat oleh kedua harian militer tersebut. Dua, sebenarnya publik, terutama masyarakat Indonesia, mengalami kegagalan untuk membentuk dan menilai objektivitas informasi yang diberikan oleh kedua harian tersebut.

Kedua, dalam proses meso, terlihat bahwa massifikasi, komodifikasi dan strukturalisme media massa Indonesia waktu itu yang sangat propagandis, bertujuan dan memberikan warna tertentu dalam proses pembentukan opini publik yang diharapkan oleh kelompok kepentingan dalam hal kelompok militer, kelompok sipil anti sosialisme dan kelompok kekayaan ekonomi-kapitalistik

yang bersifat pragmatik. Meski dalam point ini juga terdapat sejumlah kontradiksi pembangunan kapitalisme di Indonesia.

Ini berarti bahwa komersialisasi pers tidak akan relevan sejauh tidak bersentuhan dengan kepentingan sosial politik pihak atau kelompok kepentingan.

Ketiga, bentuk penerapan peminggiran media massa waktu itu jelas merupakan bentuk kasar dari proses *embedded journalism*. Jurnalisme yang terikat dengan kepentingan tertentu mau tidak mau terbentuk dan dipengaruhi oleh perjuangan kelas yang dijadikan skenario dasar opini publik kelompok kepentingan tertentu. Terlihat dalam penelitian ini juga bahwa pola peminggiran media massa yang dilakukan Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha menggiring publik tanpa terasa sebagai sebuah pemaksaan. Dalam hal telah terjadi, proses hegemonisasi opini publik yang dilakukan oleh kedua harian tersebut. Ini berarti telah terjadi pengkondisian ideologis secara psikologis sehingga masyarakat waktu itu mengalami ekspresionisme epistemologis. Artinya bahwa Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha meski menyediakan wacana legitimasi dan sekaligus peminggiran yang belum selesai tapi masyarakat telah menerima wacana tersebut sebagai sesuatu yang rasional.

Dalam pertimbangan ketiga ini, bisa dilihat bentuk kegagalan dan sekaligus keberhasilan sistem pers perjuangan yang dijadikan acuan industri

media massa Indonesia. Dalam konteks ini juga, terlihat bahwa jurnalisme atau pers dalam situasi krisis menjadi sangat rentan dalam praksis lapangan. Pers dijadikan “pendulum yang mampu berayun ke kanan atau ke kiri”.

5.2. Implikasi Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pola-pola komunikasi yang dilakukan dalam situasi krisis memang mempunyai karakteristik tertentu. Tentu saja, dapat dipahami bahwa komunikasi dalam lingkup situasi krisis bisa ada dalam level konsensus masyarakat atau dalam level kontroversi masyarakat atau bahkan dalam level bidang penyimpangan yang banyak ditolak oleh konvensi-konvensi komunikasi normal. Tapi tetap saja dalam produksi dan ideologisasi teks media, terdapat proses-proses alamiah dalam proses komunikasi massa. Dari beberapa pertimbangan di atas maka terdapat beberapa implikasi penelitian.

Pada tingkatan akademik, penelitian ini menemukan bahwa proses komunikasi krisis terutama ketika kepentingan ideologi masuk menjadi penentu signifikan maka pers atau media massa bisa menjadi alat efektif penyebaran dan hegemonisasi ideologis. Ini berarti media massa merupakan garda paling depan alat ideologi negara atau alat represif ideologi. Padahal di sisi lain, media massa diharapkan menjadi alat kritik dan pengawasan sosial masyarakat terhadap negara. Sekali lagi diteguhkan bahwa media massa merupakan alat

yang tidak bebas nilai. Dengan kata lain, bahwa media massa harus menjadi pilar keempat demokrasi tidak sepenuhnya bisa begitu saja diakomodir oleh media massa. Memang dalam kondisi normal, media massa diperlukan untuk proses demokratisasi.

Tapi di lain pihak, perlu disadari pula media massa bisa berubah menjadi raksasa mengerikan dalam melegitimasi praktek-praktek kebohongan sistem politik atau ideologi tertentu. Persoalan ekonomi politik kritis menjadi faktor signifikan yang bisa diungkap untuk membongkar topeng-topeng ideologis yang ada di balik signifikansi media dalam kehidupan manusia modern.

Kedua adalah implikasi metodologis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Salah satu kriteria penilaian keberhasilan dari penelitian ini adalah kemampuan untuk menemukan latar sejarah yang tepat, menginterpretasi latar tersebut sebagai konteks teks-teks yang ada dan akhirnya menemukan benang merah pembedaan teks yang ada. Sisi lainnya adalah bahwa penelitian ini sudah mengambil posisi untuk memihak “korban” dari teks-teks tersebut. Dari opsi preferensial ini, maka penelitian mengacu pada pendekatan komunikasi selain pendekatan linguistik atau kesejarahan. Faktor kesejarahan dan komunikasi sangat kental menjadi alat efektif mengungkap apa saja yang dirasakan “tersembunyi” dalam setiap teks. Hal tersebut mengakibatkan bahwa penelitian memang harus mengambil sikap multidisipliner. Pemahaman yang tepat bagi

penelitian selanjutnya adalah bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil awal untuk menjejak sejarah komunikasi atau salah satu episode peran media massa bagi pembangunan Indonesia. Selain masih ada keterbatasan metodis yang dilakukan dalam proses penelitian juga dirasakan bahwa diskursus relasi media massa dengan militer, ideologi kapitalisme dan situasi krisis menerbitkan permasalahan-permasalahan baru, terutama ketika kapitalisme global menjadi faktor penentu kekuatan militer, sosial politik negara dan krisis yang dialami oleh sebuah komunitas tertentu.